

**KEBEBASAN BEREKSPRESI  
ANAK-ANAK PAPUA DIBUNGKAM  
(Juli – September 2008)**



**Sekilas Informasi**

**Oleh**

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN  
KEUSKUPAN JAYAPURA**

[www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

**JAYAPURA**

**Maret 2009**



# DAFTAR ISI

## Kata Pengantar

### Bagian I : Lintasan Peristiwa Hak Asasi Manusia Juli-September 2008

#### A. Hak-Hak Sipil dan Politik

1. Kebebasan Warga
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Penanganan Konflik
5. Aspirasi M(erdeka)
6. Pemekaran vs Otsus

#### B. Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

1. Hak Atas Pendidikan
2. Hak Atas Kesehatan
3. Kesejahteraan Umum
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

### Bagian II : Analisis Peristiwa

#### Pengantar

#### A. Analisis Hak-Hak Sipil dan Politik

1. Kebebasan warga
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Penanganan Konflik
5. Aspirasi M(erdeka)
6. Pemekaran vs Otsus

#### B. Catatan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Pendidikan Gratis, Tidak Terlaksana
2. Hak Atas Kesehatan
3. Kesejahteraan Umum
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

#### Penutup

## Kata Pengantar

Pada kesempatan ini Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura menghadirkan kembali seri Papua Aktual No. 15. SKP berupaya menghadirkan lintasan peristiwa Juli – September 2008 yang menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Peristiwa menonjol dan menguras banyak perhatian dalam triwulan ini ialah penembakan Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Bangsa Pribumi Sedunia di Wamena, 9 Agustus 2008 dan berbagai ledakan bom di Timika. Selain itu, wabah kolera di Kabupaten Dogiyai, mahalnya biaya pendidikan serta Pilkada di Kabupaten Biak dan Jayawijaya. Demikian halnya berbagai peristiwa penting lain disajikan dalam Papua Aktual edisi ini.

Patut disadari bahwa kumpulan informasi dalam lintasan peristiwa ini sangat terbatas. Masih banyak peristiwa, entah yang menggembirakan maupun menyedihkan tidak sempat direkam karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Semoga tulisan yang jauh dari sempurna ini membantu semua pihak untuk melihat dan merefleksikan realitas Papua sesungguhnya.

Selamat membaca

Jayapura, Maret 2009



Petrus Supardi ofm  
Penulis

## BAGIAN I

### LINTASAN PERISTIWA HAK ASASI MANUSIA JULI – SEPTEMBER 2008

#### A. Hak-Hak Sipil dan Politik

##### 1. Kebebasan Warga

###### 4 Juli

Sekretaris umum Solidaritas Perempuan Papua (SPP) Abina Wasangai, S.Pd membantah isu yang mengatakan SPP sebagai organisasi separatis. "Kami ini adalah organisasi yang meningkatkan hak-hak perempuan dan bergerak dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat, agama, hukum dan HAM, politik, sosial dan kesejahteraan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup, maka jangan sebut kami separatis".

###### 6 Juli

Di Biak ratusan orang memperingati 10 tahun tragedi "Biak Berdarah" dalam bentuk ibadah. Kegiatan dipusatkan di tempat kejadian 10 tahun silam di bawa menara air minum, Tower Puskesmas Biak Kota. Koordinator kegiatan yang juga Koordinator Umum Satgas Papua, Marinus Rumsombre mengatakan Pemerintah Republik Indonesia harus mengusut tuntas pelanggaran HAM yang terjadi sepuluh tahun lalu. "Kami meminta semua komponen yang terkait, secara khusus Pemerintah Republik Indonesia supaya mengusut kasus pelanggaran HAM berat ini, dan memberikan keadilan bagi keluarga korban".

###### 7 Juli

Belasan Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) dari Unit Kegiatan Mahasiswa yang membidangi Demokrasi, HAM dan Lingkungan yang dikoordinir oleh Petrus Kayoi mendatangi Kantor DPRP untuk bertemu langsung dengan Ketua Komisi F DPRP Ir. Weynand Watori guna membicarakan dan mencari solusi untuk Mama-Mama Pedagang Asli Papua (MPAP), khususnya yang berjualan di depan Galael Jayapura. Tetapi mereka dikecewakan oleh ketidakberadaan Ketua Komisi F ditambah tidak seorang pun utusan Komisi F yang menemui mereka. Sementara para Wakil Ketua DPRP pun semuanya berada di luar daerah. "Kami datang hendak membicarakan nasib mama-mama Papua yang berjualan di depan Galael Jayapura. Sampai sekarang ini Pemerintah Kota Jayapura belum memberikan solusi yang tepat untuk mereka. Setiap saat mama-mama selalu dihantui rasa takut jangan sampai mereka ditertibkan oleh petugas dari Dinas Trantib. Kami tetap berharap Pemkot Jayapura tidak hanya sekedar menertibkan tetapi harus mencari solusi untuk mama-mama ini", tegas Petrus.

###### 8 Juli

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pesimis terhadap upaya Polri mengungkap motif dan pelaku pembunuhan aktivis HAM Munir. Ia mengatakan penyidik memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Karena itu masyarakat jangan terlalu menyalahkan penegak hukum yang telah bekerja keras untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir. "Pemerintah telah berusaha keras menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Hasilnya, sejumlah orang telah di penjara. Hal ini merupakan prestasi. Kalla menambahkan penegakkan HAM di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dibandingkan sepuluh tahun silam. Karena itu, jangan kita hanya melihat sisi negatifnya saja", tegas Kalla.

### **15 Juli**

Sebanyak 807 pelintas batas yang selama ini berdomisili di PNG akan kembali ke Papua, tepatnya di Kabupaten Jayapura. Sebagian mereka kini telah berada di Wutung, Skow, dan Senggi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Bambang Widiyatmoko, SH, M. Si mengatakan kesulitan sekarang ialah lokasi bagi mereka, karena berhubungan dengan pergeseran kehidupan sosial dan bahasa.

### **27 Juli**

Tragedi penyerangan Kantor PDI Pro-Megawati 27 Juli 1996 diperingati secara sederhana dengan melakukan tabur bunga di halaman kantor DPP-PDIP, pembacaan puisi dan orasi. Tragedi yang terjadi 12 tahun silam itu menyebabkan lima orang terbunuh, 149 orang luka-luka dan 136 orang ditahan.

### **7 Agustus**

Sebanyak 40 anggota Kongres Amerika Serikat menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membebaskan dua terpidana makar Filep Karma dan Yusak Pakage karena melakukan Pengibaran Bendera Bintang Kejora, pada 1 Desember 2004 di Lapangan Trikora – Abepura. Duta Besar Indonesia untuk AS, Sudjudnan Parnohadingrat mengatakan surat tersebut tertanggal 29 Juli dan dikirim melalui Kedubes Indonesia di Amerika Serikat kepada Presiden di Jakarta.

### **9 Agustus**

Momentum peringatan Hari Bangsa Pribumi se-Dunia di Kabupaten Biak dilaksanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pemberantasan korupsi bertempat di Halaman Kantor Dewan Adat Biak (DAB). Pihak-pihak yang menandatangani MoU antara lain:

1. Ketua Dewan Adat Biak, Yan Pieter Yarangga.
2. Badan Pekerja Sinode di Tanah Papua Wilayah III, Pdt. Markus Kafiar.
3. Pimpinan Umat Katolik Biak Numfor, Hengky M. Satsoetoeboen.
4. Ketua Majelis Ulama Biak Numfor, H. Muh. Adnan.
5. Direktur Yayasan Rumsran Biak, Ir. Isak Matarihi.
6. Kajari Biak, Abraham A. Sitinjak, SH, MH.
7. Ketua Pengadilan Negeri Biak, Marcellius Suhartono, SH.
8. Kapolres Biak Numfor, AKBP Kif Animanto, S.IK, SH, MH.

Suasana duka kembali melanda Tanah Papua. Seorang anak negeri, Opinus Tabuni ditembak mati pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia yang diselenggarakan Dewan Adat Papua (DAP) dan Dewan Adat Balim di Lapangan Sinapup, Wamena.

Pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia di Lapangan Sinapup, Wamena massa menaikkan tiga bendera yakni Merah Putih, Bendera PBB, Bendera Bintang Kejora dan sebuah Bendera Putih bertuliskan SOS. Kapolda Papua, Irjen Pol, Bagus Ekodanto mengatakan kegiatan yang diselenggarakan Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Wilayah Balim adalah ilegal karena tidak mendapat izin dari pihak kepolisian baik dari Polres Jayawijaya maupun Polda Papua.

### **10 Agustus**

Peristiwa terbakarnya Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia di Wamena mendapat perhatian serius Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. FX. Bagus Ekodanto. Kapolda didampingi Direskrim Polda Papua Kombes Pol Drs. Paulus Waterpauw, Kapolresta Jayapura, AKBP Robert Djonso, SH dan Kapolres Jayapura AKBP Didi Yasmin

langsung berkunjung ke Wamena dan melakukan pertemuan dengan Muspida Kabupaten Jayawijaya. Sementara itu, Sekertaris Umum Dewan Adat Papua (DAP), Leo Imbiri mengatakan pengibaran Bendera Bintang Kejora sengaja dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi itu untuk mengacaukan jalannya upacara.

Ketua Komisi I DPR RI, Theo L. Sambuaga mengatakan langkah 40 anggota Kongres Amerika Serikat yang meminta Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kepastian pembebasan dua terpidana makar Filep Karma dan Yusak Pakage harus ditolak secara tegas. "Dampak setelah penolakan dilakukan tidak perlu dikhawatirkan. Itu merupakan ekspresi politik mereka yang dilakukan atas nama konstituen mereka", tegas Sambuaga. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan Amerika harus menghormati sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebab sanksi yang diberikan sudah melalui proses peradilan yang independen.

### **11 Agustus**

Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengetahui pelaku penembakan Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia di Wamena, tanggal 9 Agustus dipimpin langsung oleh Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Paulus Waterpauw.

Bupati Kabupaten Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM mengimbau seluruh masyarakat Yahukimo yang berada di Kurima dan Tangma yang memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan masyarakat Wamena supaya tidak terpancing dan terprovokasi dengan peristiwa penaikan Bendera Bintang Kejora dan tertembaknya Opinus Tabuni pada peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia di Wamena, 9 Agustus yang lalu.

Persoalan Kemerdekaan Bangsa Papua menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini berkaitan dengan upaya Filep Karma dan Yusak Pakage yang meminta dukungan kongres Amerika untuk membebaskan mereka dari tuntutan makar pada pengibaran Bendera Bintang Kejora 1 Desember 2006 di Lapangan Trikora, Abepura. Hasilnya 40 anggota Kongres AS menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kedua Tahanan Politik ini dibebaskan. Menanggapi sikap 40 anggota kongres itu Kedutaan Besar AS di Indonesia membantah bahwa AS mendukung kemerdekaan Bangsa Papua. "Pemerintah AS tidak mendukung gerakan kemerdekaan apa pun di Indonesia, termasuk gerakan di Papua", kata Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume.

Menyikapi maraknya pemberitaan media massa mengenai surat 40 anggota Kongres AS yang meminta Presiden SBY membebaskan dua terpidana makar Filep Karma dan Yusak Pakage, Ketua Lembaga Pemasarakatan Kelas II A, Abepura Anthonius M. Ayorbaba, SH, MM mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat dari Pemerintah Pusat soal Amnesti bagi kedua Tapol itu.

### **12 Agustus**

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di Wamena pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Internasional 9 Agustus menunjukkan bahwa di Papua masih ada kelompok separatis. "Pengibaran bendera selain "Merah Putih" di Republik ini jelas merupakan separatisme", tegas Panglima Djoko Santoso.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut, S.Pd didampingi Wakil Ketua II, Fadal Al Hamid, dan Ketua DAP Jayawijaya, Lemok Mabel melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. FX. Bagus Ekodanto yang didampingi Direskrim Kombes Pol Paulus Waterpauw, Kabid Humas Kombes Agus Rianto, Kepala Satuan Brimob Kombes Wirabawa dan Kapolres Jayawijaya, AKBP Abdul Aziz Djamaludi, SH sepakat untuk

menyelesaikan kasus penembakan Opinus Tabuni pada 9 Agustus lalu melalui jalur hukum. "Kepolisian akan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap DAP dan panitia penyelenggara DAP wilayah Jayawijaya", kata Kapolda Bagus Ekodanto. Sementara itu, Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut mengatakan pihak DAP akan bersikap kooperatif untuk memberikan masukan kepada petugas yang akan melakukan pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum untuk mencari keadilan dan kebenaran", tegas Forkorus.

Kapolri Jenderal Pol Soetanto mengatakan Mabes Polri telah mengirim tim untuk membantu Polda Papua melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan warga sipil bernama Opinus Tabuni pada 9 Agustus yang lalu. "Kami sedang menyelidiki kasus tersebut", tegas Kapolri Soetanto.

### **13 Agustus**

Untuk mengungkap pelaku penembakan Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia di Wamena, Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. FX. Bagus Ekodanto bersama Direskrim Polda Papua Kombes Pol Drs. Paulus Waterpauw, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Agus Rianto dan Kapolres Jayawijaya AKBP Abdul Aziz menyaksikan secara langsung jalannya olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). "Pada kejadian itu petugas banyak di lokasi TKP termasuk Polri dan TNI sehingga kami melakukan olah TKP untuk mencari objektivitas terjadinya penembakan. Dalam olah TKP petugas telah menemukan bekas darah, selongsong peluru dan bekas tembakan di kayu pagar", kata Kapolda Papua Bagus Ekodanto. Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Prasetyo SH. MM mengatakan Pimpinan Polri, termasuk Kapolda Papua sudah berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku penembakan.

Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Prasetyo, SH mengatakan senjata polisi bukan untuk membunuh rakyat. "Senjata yang dipakai Polisi dibeli dengan uang rakyat sehingga ada aturan penggunaannya, bukan untuk membunuh rakyat", tegas Wakapolda Prasetyo.

Menanggapi penembakan terhadap Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia di Wamena, pihak Elsham Papua, melalui Sekretarisnya Yerry Baransano, Yahamak Yosepha Alomang dan Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Markus Haluk bersama-sama meminta Polda Papua harus bertanggung jawab untuk mengungkap pelaku penembakan itu. "Korban tewas bukan oleh senjata lain tetapi akibat peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan yang mengenai dada sebelah kanan. Di Lapangan tempat berlangsungnya upacara tidak ada orang lain yang memegang senjata, selain aparat keamanan", tegas Markus Haluk. Ketiga Tokoh tersebut juga mengeluarkan empat butir pernyataan yang mendesak pihak Polda dan Pemerintah segera menuntaskan kasus ini, antara lain:

1. Mengutuk dengan keras pelaku penembakan yang menewaskan Opinus Tabuni.
2. Mendesak Sekjen PBB agar menekan Pemerintah Indonesia untuk segera mengungkap pelaku penembakan Opinus Tabuni, sebab pembunuhan terjadi saat upacara Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia yang ditetapkan PBB pada 9 Agustus 2007.
3. Mendesak pihak Polda supaya segera mengungkap, menangkap dan menahan pelaku penembakan.
4. Mendesak Komnas HAM segera membentuk tim penyelidik untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat terhadap Opinus Tabuni.

#### **14 Agustus**

Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut, S.Pd mengatakan pihaknya menolak diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora pada 9 Agustus di Wamena karena tidak dilibatkan sebagai saksi pada kasus tertembaknya Opinus Tabuni. Sebaliknya, pihaknya bersedia diperiksa jika polisi mengungkap pelaku penembakan Opinus Tabuni dan DAP didampingi pelapor khusus Anti Penyiksaan PBB, Manfred Nowak. Sementara itu, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Fdhal Kasim mengatakan penembakan yang terjadi di Wamena merupakan pelanggaran terhadap hak hidup orang, maka harus dituntaskan.

#### **15 Agustus**

Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengirim surat panggilan terhadap para Pimpinan Dewan Adat Papua (DAP) untuk menghadiri pemeriksaan pada 19 Agustus terkait pengibaran Bendera Bintang Kejora 9 Agustus di Wamena, pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia di Lapangan Sinapup, Wamena .

#### **17 Agustus**

Kepolisian Daerah (Polda) Papua melakukan uji balistik di Lapangan SPN Jayapura untuk mengungkap pelaku penembakan terhadap Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia di Wamena. Jalannya uji balistik ini dipimpin langsung oleh Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Drs. Ruslan Riza bersama dua belas anggotanya disaksikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. FX. Bagus Ekodanto, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs. Prasetyo dan Direskrim Polda Papua Kombes Pol Drs. Paulus Waterpauw.

Terpidana kasus penaikan Bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora Abepura, 1 Desember 2004, Filep Karma dan Yusak Pakage mengatakan pihaknya tidak akan menerima remisi sebab mereka tidak bersalah. "Kalau pun kami menerima remisi saya akan tolak, sebab kami tidak bersalah. Kami tidak melakukan makar. Kami menuntut hak kami yang telah dijajah negara Indonesia", kata Filep Karma. Sementara itu, Kalapas Abepura, Anthonius M. Ayorbaba, SH, M.Si mengatakan setiap warga binaan Lapas memiliki hak yang sama untuk menerima remisi dari Pemerintah. Persoalan menolak atau tidak itu hak mereka.

Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. FX. Bagus Ekodanto mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63 berjalan lancar dan aman. "Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan hadiah dari penjajah melainkan melalui perjuangan yang sangat panjang maka generasi muda khususnya yang ada di Papua perlu menghargai sejarah berdirinya negara ini", kata Kapolda Bagus Ekodanto.

#### **18 Agustus**

Tokoh Perempuan Suku Amungme, Mama Yosepha Alomang mengatakan kita harus mengakui bahwa Orang Asli Papua belum menikmati kemerdekaan. "Orang Asli Papua tinggal di pedalaman, di gunung, dan pesisir pantai belum merasakan sentuhan pembangunan. Komunikasi sulit, fasilitas kesehatan dan pendidikan minim. Karena itu untuk membangun Papua harus melibatkan masyarakat adat".

#### **19 Agustus**

Dewan Adat Papua (DAP) selaku penanggung jawab Perayaan Hari Masyarakat Pribumi Internasional di Wamena diperiksa oleh Polda Papua. Mereka yang diperiksa antara lain:

1. Forkorus Yaboisembut, S.Pd, Ketua DAP.
2. Fadhil Al Hamid, Ketua II DAP.
3. Lemok Mabel, Ketua Dewan Adat Baliem.

4. Yulius Hisage, Ketua Panitia Perayaan.
5. Dominikus Sorabut.
6. Adolof Hisage.

Keenam saksi ini didampingi oleh pengacara, antara lain

- Iwan Niode, SH dan Latifah Anum Siregar, SH dari ALDP.
- Hari Maturbongs dan Maria Masella, SH, dari Kontras.
- Silvia Aurisa, SH dan Corry Silva, SH, dari LBH.

## **22 Agustus**

Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanah Papua (KMMPTP) melakukan aksi demonstrasi ke Kantor UNDP untuk mempertanyakan proses hukum terhadap penembakan Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Internasional di Wamena, 9 Agustus lalu dan meminta Polisi menghentikan proses hukum terhadap DAP. "Kami minta proses hukum terhadap Dewan Adat Papua (DAP) dan panitia penyelenggara segera dihentikan karena kegiatan itu berkaitan dengan hari raya yang ditetapkan PBB", tegas Koordinator demo, Buktar Tabuni.

## **2 September**

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Drs. Agus Alua, M.Th mengatakan penembakan Opinus Tabuni dalam aksi Pengibaran Bintang Kejora, pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Internasional di Wamena, 9 Agustus lalu merupakan pelanggaran terhadap PP No. 77 Tahun 2007. "Secara tidak langsung aparat yang melakukan penembakan telah menyalahi arahan Presiden yang mengatakan bahwa penegakan PP No. 77 Tahun 2007 harus dilakukan secara persuasif", tegas Agus Alua. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisebut, S.Pd mengatakan berdasarkan hasil rapat perwakilan DAP, pihaknya telah mengambil keputusan menolak untuk diperiksa oleh Polda Papua sebagai saksi sampai Polisi mengungkap pelaku penembakan Opinus Tabuni.

Proses pemeriksaan terhadap Dewan Adat Papua (DAP) hingga kini masih berjalan, namun sayangnya sampai saat ini belum terungkap siapa pelaku penembakan terhadap Opinus Tabuni pada saat pelaksanaan hari Internasional Bangsa Pribumi 09 Agustus 2008 lalu. Hal ini menimbulkan tanda tanya di benak DAP, karena itu Ketua DAP Forkorus Yaboisebut bersama Ketua DAP Wamena dan Manokwari mendatangi Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) dan bertemu dengan Ketua MRP Agus Alua, M.Th di ruang kerjanya, guna meminta dukungan untuk menghentikan proses pemeriksaan terhadap beberapa pimpinan DAP dan panitia hari pribumi tersebut sebelum mengungkap pelaku penembakan serta mendatangkan Komisi Tinggi PBB. "Kami merasa bahwa mengibarkan bendera itu tidak dosa, tetapi membunuh itu dosa dilihat dari norma agama, adat dan HAM. Karena itu, yang menembak harus diungkap terlebih dahulu supaya adil, mengapa orang dibunuh dan mengapa mereka mengibarkan bendera," kata Yaboisebut usai bertemu Alua, selama kurang lebih satu jam. Sementara secara terpisah Ketua MRP mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi soal penghentian pemeriksaan sesuai permintaan DAP, tetapi akan mengirim surat kepada Kapolda Papua terkait dengan pelanggaran yang dilakukan aparat terhadap pelaksanaan PP No. 77 Tahun 2007 yang merupakan tindakan anarkis. "Saya menjelaskan, tidak mungkin Negara Indonesia mengundang Komisi Tinggi PBB karena pemerintah tidak akan membuka masalah kecil di Wamena ke dunia Internasional dalam rangka menegakkan kewibawaan negara," demikian penjelasannya menanggapi keinginan mendatangkan Komisi Tinggi PBB.

### 17 September

Dewan Adat Papua (DAP) dengan ribuan massa melakukan demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk menuntut kejelasan pelaku penembakan Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Internasional di Lapangan Sinapup Wamena. Demonstrasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut, S.Pd didampingi pengurus DAP Leo Imbiri, Fadal Al Hamid dan Thaha Al Hamid serta Penasihat Hukum Iwan Niode, SH dan Latifah Anum Siregar, SH. Massa bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Drs. John Ibo, Wakil Ketua I Komaruddin Watubun, SH, Wakil Ketua II Paskalis Kosay, S.Pd dan Wakil Ketua III Yop Kogoya, Ketua Komisi F, Weynand Watory, Wakil Ketua Komisi A, Ramses Wally, Wakil Ketua Komisi B, Jubelina Watopa dan beberapa anggota DPRP lainnya. Pada kesempatan ini massa menyampaikan empat tuntutan yaitu

1. Penembakan oleh aparat negara terhadap Opinus Tabuni merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah menginjak-injak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia.
2. Penancapan Bendera Merah Putih, SOS dan Bintang Kejora bukan alasan untuk membunuh masyarakat adat Papua, karena penancapan ini sebagai bentuk protes terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi selama ini.
3. Peristiwa tewasnya Opinus Tabuni bukan merupakan persoalan adat tetapi pembunuhan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan masalah politik.
4. Penembakan terhadap Opinus Tabuni harus menjadi peristiwa yang terakhir di atas Tanah Papua.

Setelah membacakan tuntutan massa juga membakar PP No. 77 Tajun 2007 yang mengatur tentang lambang dan simbol daerah.<sup>1</sup>

Ratusan Massa di Biak melakukan demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Biak Numfor menuntut Pemerintah dan aparat kepolisian segera menyelesaikan kasus penembakan terhadap Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Internasional di Lapangan Sinapup Wamena. Koordinator Aksi, Warner Baransano mengatakan peristiwa tewasnya Opinus Tabuni bukan persoalan adat melainkan pembunuhan yang berkaitan dengan masalah politik karena itu penyelesaiannya pun harus melalui jalur politik serta pertanggungjawaban hukum dan moral oleh negara. "Kami minta pihak kepolisian segera mengungkapkan hasil penyelidikan dan penyidikannya secara terbuka".

### 18 September

Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto mengatakan dari hasil pemeriksaan barang bukti tidak dapat dibandingkan dengan proyektil dari 47 pucuk senjata milik anggota Polisi Polres Jayawijaya yang bertugas saat peristiwa penembakan Opinus Tabuni, sebab proyektil yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah proyektil *full metal jacket round nose* kaliber 9 mm. Senjata jenis ini digunakan oleh TNI dan Polri, tetapi di Polri hanya digunakan oleh Mabes Polri, Brimob dan Densus 88.

### 19 September

Menyikapi penembakan warga sipil bernama Opinus Tabuni pada Peringatan Hari Masyarakat Pribumi Se-Dunia di Lapangan Sinapup, Wamena Komnas HAM Jakarta menurunkan Tim Pemantau Peristiwa Wamena. Tim Pemantau itu diketuai Yoseph Adi Prasetyo bersama empat anggota masing-masing Endang Sri Melani, Helmy Rosyida, Indahwati dan Naroki. "Kami membuka *online* untuk terus mengikuti proses ini dan kami menangkap penjelasan bahwa senjata itu tidak ada di dalam standart yang digunakan jajaran Polri sebab ada kaliber 9 mm", kata Yoseph.

1 Lihat, [www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

Hasil sementara penyelidikan uji balistik Tim Puslabfor Polri terhadap proyektil yang diambil dari tubuh korban penembakan Opinus Tabuni menunjukkan bahwa proyektil *full metal jacket rose nose* kaliber 99 bukan berasal dari senjata api kepolisian mendapat tanggapan dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A. Y. Nasution melalui Asisten Kasdam Letkol Inf. Khairully mengatakan kalau senjata api itu bukan berasal dari aparat kepolisian harus ditunjukkan dengan bukti-bukti yang akurat, kuat, dan benar serta berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Paskalis Letsoin, SH mengatakan pihaknya sangat pesimis bahwa Polisi mampu mengungkap pelaku penembakan Opinus Tabuni, meski pun demikian tetap berharap Polisi berani mengungkap pelaku penembakan. "Polda Papua harus berani mengungkap dan menyeret pelaku penembakan tersebut, baik berasal dari masyarakat sipil bersenjata maupun oknum aparat keamanan".

### **24 September**

Dua dari 43 warga Papua yang meminta suaka politik ke Australia akhir 2005 lalu kembali ke Papua. Kedua peminta suaka yang kembali itu adalah Yubel Kareni kembali ke Serui dan Hana Gobay kembali ke Merauke. Menanggapi kepulangan kedua peminta suaka itu, Bupati Kabupaten Merauke, Drs. John Gluba Gebze mengatakan sangat istimewa karena hidup di negeri sendiri kita dapat lebih leluasa bergerak daripada di negeri orang. Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP, Paskalis Kossay mengatakan hendaknya teladan kedua warga ini menjadi pelajaran bagi yang ingin minta suaka politik ke negara lain, di sana ternyata mereka hidup susah.

### **25 September**

Menyikapi banyaknya aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora di Tanah Papua, Advokat Senior, Anthon Raharusun mengatakan pemerintah dan pihak keamanan tidak perlu melakukan tindakan represif sebab hal ini merupakan aspirasi simbolik yang masih berada dalam konteks demokrasi yang harus dicarikan akar permasalahannya tanpa harus rakyat terus-menerus menjadi korban dari ketidakadilan. "Simbol bendera yang diekspresikan harus dilihat sebagai dilema yang perlu dicarikan solusi sosial-politiknya sepanjang tidak membentuk sebuah negara baru".

## **2. Pertahanan Dan Keamanan**

### **1 Juli**

Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. FX. Bagus Ekodanto meminta masyarakat turut mengawasi kinerja Polisi dan melaporkan apabila menemukan polisi yang arogan dan bertindak tidak sesuai aturan. "Sifat arogansi Polri sudah ditinggalkan sejak reformasi. Jadi kalau ada anggota yang nakal silakan lapor. Sebab, polisi harus dekat dengan masyarakat, polisi milik masyarakat, bukan milik siapa-siapa", tegas Kapolda Papua Bagus Ekodanto pada saat perayaan HUT Bhayangkara ke-62 di halaman Mapolres Keerom.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Haryadi Soetanto, mengatakan upaya persuasif dan dialog terus dibangun oleh Kodam XVII/Cenderawasih untuk menyadarkan anggota TPN/OPM. Upaya ini cukup berhasil karena banyak anggota TPN/OPM di Pegunungan seperti Oksibil dan Enarotali yang mau turun gunung dan siap kembali ke pangkuan NKRI. Pangdam juga mengatakan mereka yang kembali ke pangkuan NKRI akan dijamin keselamatannya dan kehidupan selanjutnya akan difasilitasi pemerintah. Sementara itu, Sekda Provinsi Papua Drs. Tedjo Soeprapto, MM menjelaskan bahwa mereka yang telah kembali bergabung dengan masyarakat akan didampingi, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup.

## **26 Juli**

Pangdam XVIII/ Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto mengingatkan lembaga adat di Papua, termasuk Dewan Adat Papua (DAP) untuk tidak memanfaatkan eksistensinya untuk kepentingan politik. "Lembaga adat tidak boleh membicarakan hal-hal politis yang akan mengganggu dan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

## **19 Agustus**

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Agustadi Sasongko mengatakan penyelesaian masalah di Papua dengan kelompok sipil bersenjata perlu dilakukan melalui jalan dialog bukan dengan kekerasan. "MRP dan DPRP sebagai lembaga kultural memiliki peran yang amat besar untuk memanggil saudara-saudara kita yang belum sepaham untuk berdialog. OPM sudah tidak ada yang ada adalah mereka yang belum sepaham sehingga perlu dialog bukan kekerasan", tegas KSAD Agustadi.

## **26 Agustus**

Sersan Mayor Bram Wariensi, anggota TNI Kaimana melakukan penembakan terhadap Sri Lestari warga sipil di Pasar Baru Kaimana. Hasil visum menunjukkan korban tertembak di punggung dan melukai hati serta paru-paru. Komandan Kodim 1760 Fakfak, Letkol (Inf) Asep Joko Ruchwarsito mengatakan peristiwa ini merupakan kesalahan anggotanya. "Kami sudah menemui keluarga korban. Dan kami pastikan bahwa anggota kami ini akan dihukum setimpal dengan perbuatannya", tegas Asep.

Seorang anggota Polisi dari Polres Persiapan Kabupaten Yahukimo melakukan penembakan terhadap seorang warga sipil bernama Soni Keykera. Kapolres Persiapan Kabupaten Yahukimo, AKBP Christian A. A mengatakan penembakan terjadi karena korban dan oknum polisi tidak bisa menahan emosi.

## **12 September**

Pesawat asing Australia, Cape Air Transportation, PRM2-68/Reg. HV. PFP mendarat di Bandara Mopah Merauke pada pk 11.28 WP tanpa memiliki dokumen apa pun. Para awak dalam pesawat tersebut antara lain Willam Henry Scott (pilot), Vera Scott (co-pilot), Hubert Hoper, Karen Burke, Keit Rowald Mortimer (penumpang).

Pk. 17.30 WP terjadi perkelahian di antara dua kelompok warga di Kampung Pruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Perkelahian ini dipicu oleh kepemimpinan ganda di dalam tubuh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) antara kubu Marianus Magai dengan Thomas Tabuni.

## **13 September**

Dua kubu yang bertikai di Kampung Pruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya berhasil didamaikan. Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe mengatakan pimpinan Partai Politik dan elite-elite politik supaya menghentikan pertikaian dan perkelahian yang dapat menyebabkan pertumpahan darah dan berhenti menggunakan rakyat untuk kepentingan politiknya. Sementara itu kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pihak yang bertikai, Muspida Puncak Jaya dan Pejabat Bupati Kabupaten Puncak, Simon Alom, S.Sos berisi:

1. Perkelahian dinyatakan berakhir dan tidak menimbulkan dendam di antara kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak tidak mempermasalahkan Suku Dani dan Suku Damal dalam kehidupan bermasyarakat di kedua kabupaten.
3. Kedua belah pihak siap membangun Kabupaten Puncak bersama aparaturnya.

### **14 September**

Pk. 22.30 WP bom meledak di depan Bandara Moses Kilangin Timika, tepat di samping gardu induk listrik milik PTFI sekitar Mile 21.

Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Drs. Paulus Waterpauw mengatakan ledakan yang terjadi di Jembatan Mile 39 dan Mile 51 Timika masih dalam penyelidikan Tim Labfor Makasar, Penyidik Reskrim Polres Mimika, Polda Papua dan Bareskrim Mabes Polri. "Kami telah selesai melakukan olah TKP dan mengumpulkan pecahan mortir pada lokasi ledakan yang rencananya akan dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri", kata Waterpauw.

Menanggapi berbagai peristiwa peledakan bom dan penaikan Bendera di Timika, Kapolres Timika, AKBP GC. Mansnembra mengatakan pihaknya telah menetapkan Timika dalam status Siaga I.

Dewan Adat Papua (DAP) tetap berkomitmen meminta Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam kasus penembakan terhadap Opinus Tabuni pada 9 Agustus yang lalu. Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut, S.Pd mengatakan pihaknya menuntut pengungkapan pelaku penembakan, motif penembakan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kasus ini.

### **15 September**

Kapolri Jenderal Pol. Sutanto mengatakan ledakan yang terjadi di Timika masih kategori tingkat bawah. Ia mengatakan ledakan berasal dari bom rakitan menggunakan mortir produksi 1941.

Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs. Prasetyo meninjau lokasi peledakan bom di Gardu dekat Bandara Moses Kilangin Timika.

### **17 September**

Kapolres Mimika, AKBP GC. Mansnembra mengatakan ledakan di Jembatan Kali Kabur, Mile 39 merupakan ledakan bom sedangkan ledakan di Mile 50 dekat penampungan solar PTFI merupakan ledakan mortir buatan tahun 1941-1943. "Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ledakan yang terjadi secara beruntun di areal PTFI", tegas Kapolres Mansnembra.

Pk. 15.15 WP beberapa warga mengibarkan Bendera Bintang Kejora di Lapangan Sepak Bola, Kwamki Lama Timika. Bendera yang diperkirakan berukuran 50x30 cm itu dibawa lari oleh pelaku saat aparat kepolisian datang ke TKP. Aparat kepolisian mengamankan tiang bendera.

Tiga terdakwa kasus pengibaran Bendera Bintang Kejora di Manokwari atas nama Jack Wanggai (juru bicara WPNA), Elimelekh Kaiway dan Frans Kareth dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jan Manopo, SH.

### **23 September**

Pk. 03. 30 WP Bendera Bintang Kejora berkibar di Jalan Cemara, tepat di Kantor Panel Dewan Adat Papua (DAP) Mimika, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. Aparat-kepolisian Polres Mimika pada pk. 30.45 menyergap dan menangkap 18 tersangka dan barang bukti berupa Bendera Bintang Kejora berukuran 130x50 cm dan satu buah tiang bendera. Aparat kepolisian juga menyita anak panah, 2 buah senapan angin dan beberapa parang. Kapolres Mimika, AKBP Godhelp C. Mansnembra mengatakan bendera yang dikibarkan kali ini berbeda dengan bendera yang

dikibarkan 2007 karena bendera yang dikibarkan 2007 dijahit di Belanda. "Ini murni aksi makar, tetapi kita masih pilah-pilah siapa yang terlibat langsung dan siapa yang hanya menonton".

Pemukulan yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura terhadap Nara pidana Politik (Napol), Ferdinand Pakage mendapat tanggapan serius dari Koordinator Sekretaris Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey. Frits Ramandey mengatakan sebagai petugas LP seharusnya memberikan pembinaan mental dan keterampilan kepada para nara pidana dan apabila ada yang melanggar harus dilakukan pendekatan persuasif bukan dengan tindakan represif/pemukulan seperti ini. "Dari keterangan korban dia dipukul satu kali dan mengenai mata sehingga mengeluarkan darah. Ini adalah tindakan pidana. Oleh karena itu, kami minta pelakunya harus ditindak tegas dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku", tegas Frits.

### **3. Penyelenggaraan Pemerintahan**

#### **1 Juli**

Serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kakanwil Depag) Provinsi Papua dari pejabat lama M. Mayor kepada pejabat baru Altindike, S. SPAK, Msi yang rencananya digelar di Aula Asrama Haji Kotaraja batal dilaksanakan karena didatangi sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Papua Untuk Penegak Hak Asli Orang Papua. Koordinator Aliansi Masyarakat Papua Untuk Penegak Hak Asli Orang Papua, Nahason Uty mengatakan penunjukan Altindike, S. SPAK, Msi sebagai Kepala Kakanwil Depag Provinsi Papua menunjukkan sikap otoriter Bimas Kristen karena tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat asli Papua. "Jika Pemerintah Jakarta berkomitmen membangun Papua maka hal prinsip ialah memberdayakan Orang Papua, bukan mendatangkan orang luar untuk menduduki jabatan penting di Papua. Pejabat yang dilantik harus orang Papua, siapa pun orangnya. Kami tidak ingin orang luar yang tidak tahu tentang Papua", tegas Nahason Uty.

Imbauan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Benny Sweny, S.Sos kepada anggota KPU Kabupaten/Kota untuk bertindak sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku mendapat sambutan positif dari Ketua KPU Kota Jayapura Drs. Hendrik B. Bleskadit, M.Si. "Kalau ada yang melanggar, memihak dan tidak transparan akan diganti. Kami KPU Kota akan bekerja maksimal karena Kota ini menjadi barometer suksesnya Pemilu di Provinsi Papua", tegas Bleskadit. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Keerom, Aloysius Renwarin, SH mengatakan KPU adalah lembaga yang independen dan netral yang bertugas menyelenggarakan pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah. Karena itu anggota KPU harus bertindak profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengemban tugas.

#### **2 Juli**

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Drs. Agus Alue Alua mengatakan akan melakukan upaya konkrit untuk mewujudkan keterwakilan masyarakat asli Papua di lembaga DPRP sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. "Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua harus memprioritaskan masyarakat asli Papua. Hal ini dapat tercapai dengan memberikan 11 kursi dari 56 kursi yang tersedia. Tetapi, UU No.10 Tahun 2008 tidak menyebutkan kekhususan untuk Pemilihan di Papua. Untuk mengatasi ini kami akan melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menyukseskan pelaksanaan Otsus terutama dalam bidang politik, jika tidak Otsus akan jatuh", tegas Alua. Sementara itu, salah seorang anggota MRP dari Pokja Perempuan Yakoba Tjo'e, SH mengatakan "Kami akan boikot pemilu apabila kami tidak diindahkan oleh pemerintah".

Wakil Ketua II MRP Dra. Hana Hikoyabi mengatakan masih ada proses demokrasi yang diskriminasi terhadap keterwakilan perempuan di Tanah Papua, khususnya dalam bidang politik. Karena itu, Pokja perempuan melakukan *hearing* 30% keterwakilan perempuan dan mencari titik temunya sesuai UU No. 21 Tahun 2001. "Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra seajar kaum laki-laki", tegas Hana Hikoyabi.

Proses audit terhadap materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Gubernur Provinsi Papua Tahun 2007 hingga saat ini belum tuntas. "Harapan kami jika bisa secepatnya, karena bukan hanya sidang LKPJ saja yang akan dibahas tetapi juga sidang anggaran perubahan 2008 belum dibahas termasuk sidang APBD 2009 serta sejumlah sidang non APBD lainnya", kata Ketua Komisi C DPRD Yan L. Ayomi, S. Sos. Sementara itu, Sekda Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM mengatakan proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPJ Gubernur masih berjalan. "Kami minta kepada semua pihak agar bersabar, jika audit sudah selesai maka materi LKPJ bisa langsung disusun dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas", kata Tedjo Suprpto.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Papua Se Indonesia (BEMSI), Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI) dan masyarakat umum melakukan demonstrasi di halaman Kantor DPR Kabupaten Jayawijaya. Mereka menuntut kejelasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir jabatan Bupati lima tahun berjalan. Mereka menuntut KPU Kabupaten Jayawijaya tidak menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah hingga semua laporan pertanggungjawaban jelas. "Kami minta Pilkada Jayawijaya ditunda sampai tahun 2010, karena banyak persoalan yang belum diselesaikan Pemerintah Jayawijaya", tegas Koordinator demo Yan Matuan.

Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen (PAK) Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua melalui Kepala Seksi Tenaga Kependidikan, Johny Marwery, S.Th, MA mengatakan program sertifikasi guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) untuk Provinsi Papua tahun 2008 tidak dilaksanakan karena telah dilakukan pada tahun 2007. "Provinsi Papua akan mendapat jatah program sertifikasi guru PAK pada tahun 2009", kata Johny Marwery.

### 3 Juli

Menanggapi sikap Majelis Rakyat Papua (MRP) yang akan memboikot Pemilu 2009, jika pemerintah tidak mengindahkan keterwakilan perempuan dan 11 kursi untuk orang Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Haryadi Soetanto mengatakan sebaiknya MRP meletakkan pada posisinya sesuai dengan peran dan amanat yang ada dalam undang-undang. Undang-undang telah mengamanatkan kepada MRP untuk memperhatikan pemberdayaan perempuan, adat-istiadat dan agama. "Tekuni hal ini dahulu, jangan masuk ke dalam ranah politik", tegas Pangdam Haryadi.

Dr. Agus Sumule, salah seorang perumus UU No. 21 tentang Otsus Papua mengatakan rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memboikot Pemilu 2009, jika keterwakilan perempuan dan 11 kursi untuk orang Papua tidak terpenuhi bukan jalan keluar. "Tanggung jawab MRP memang untuk mengingatkan semua parpol, tetapi memboikot Pemilu, bukan jalan keluar. Kalau ingin banyak orang asli Papua masuk anggota DPRD, maka harus mengacu pada Pasal 28 ayat 3 UU No. 21 yang mengatakan bahwa rekrutmen politik oleh Parpol di Provinsi Papua harus memprioritaskan masyarakat asli Papua", kata Sumule.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshary, AZ,MA mengatakan Pemilu 2009 yang semula ditetapkan pada 5 April, mundur ke 9 April. Pengunduran ini dilakukan demi mengakomodasi permintaan sejumlah elemen publik yang menolak pemungutan suara pada Minggu. "Alasan utama pengunduran adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pemilih yang memeluk Nasrani untuk beribadah. Selain itu, pada saat yang sama warga Tionghoa juga merayakan hari raya Ching Bing", kata Hafiz.

#### **4 Juli**

Tanggapan berbagai Parpol yang mengatakan upaya MRP untuk memperjuangkan 11 kursi DPRP untuk orang asli Papua adalah terlambat mendapat tanggapan dari Wakil Ketua II MRP Dra. Hana Hikoyabi. Ia mengatakan tidak ada yang terlambat, kemarin pihaknya telah mengingatkan DPRP bahwa masih ada 'PR' yang belum selesai. Selain itu, hal ini telah disampaikan kepada DPRP dalam bentuk pokok pikiran yang tertulis bersama agenda lainnya, sehingga pihaknya tidak setuju jika dikatakan terlambat. Hal senada diungkapkan Ketua Pokja Agama MRP Pdt. Benyamin Yantewo yang menyesalkan utusan sejumlah Parpol yang mengatakan upaya MRP memperjuangkan keterwakilan perempuan dan 11 kursi DPRP untuk orang asli Papua adalah terlambat. Ia mengatakan berbicara mengenai Undang-Undang, maka yang memiliki wewenang adalah DPRP bukan MRP, jangan melempar bola ke MRP. Ia juga menyesalkan keberangkatan Ketua KPU Provinsi Papua yang berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah 11 kursi untuk orang asli Papua. "Itu salah mengapa koordinasi ke pusat, KPU pusat tidak punya urusan dengan 11 kursi. Itu urusan Gubernur, MRP dan DPRP", tegas Yantewo.

Sekretaris Dewan Adat Keerom, Hubertus Kwamberi mengatakan akan memboikot Pemilu, jika pihak terkait tidak memperhatikan upaya MRP dalam mengusahakan keterwakilan perempuan dan 11 kursi untuk orang asli Papua di DPRP. "Dalam Otsus disebutkan keterwakilan masyarakat adat di DPRP dan DPRD jumlahnya mencapai seperempat dari jumlah legislatif yang ada. Jadi kami sangat setuju dan akan melakukan boikot pemilu kalau tidak ada utusan langsung dari masyarakat adat".

Manajer Operasional SKP Keuskupan Jayapura, Frederika Korain, SH mempertanyakan kinerja DPR Papua dalam membela hak-hak dasar orang asli Papua. Ia mengatakan perjuangan MRP mengenai keterwakilan perempuan dan 11 kursi DPRP untuk orang asli Papua merupakan bagian dari upaya penegakan hak-hak dasar orang asli Papua guna terlibat dalam politik dan pemerintahan yang dijamin. "Sesungguhnya DPRP tidak peduli terhadap implementasi UU No. 21 Tahun 2001 karena terbukti selama keanggotaan DPRP periode ini tidak satu pun Perdasu dan Perdasus yang dihasilkan untuk melindungi orang asli Papua, termasuk penjabaran pasal 28 UU No. 21 itu tidak terlaksana", tegas Frederika. Sementara itu, Sekjen Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP), Yan P. Mandenas juga mempertanyakan kinerja DPR Papua selama 5 tahun ini dan menegaskan bahwa pernyataan DPRP yang mengatakan upaya MRP memperjuangkan 11 kursi untuk orang asli Papua sudah terlambat adalah salah dan keliru.

#### **7 Juli**

Hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua menemukan masih banyak pengelolaan aset daerah yang tidak dilengkapi bukti-bukti mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kota Jayapura, terutama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang langsung menyiapkan tim sensus untuk mendata aset milik Pemkot Jayapura. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Jayapura, Drs. Achmad Idrus, MM mengatakan aset Kota Jayapura mencapai Rp 829 miliar, dan hingga saat ini baru 80% yang memiliki bukti untuk mendukung neraca kekayaan daerah. "Pekot sedang menyiapkan tim sensus untuk mendata dan

menginventarisir kembali kekayaan yang dimiliki, termasuk aset tanah", tegas Idrus.

## **8 Juli**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 34 Parpol sebagai peserta Pemilu legislatif 2009. Hal ini tertuang dalam surat Keputusan KPU No. 43/15-BA/VII/2008 tentang Penetapan Verifikasi Faktual Parpol. "Parpol yang dinyatakan lolos adalah yang memenuhi persyaratan sesuai UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 8 ayat 1 huruf a, b, c, dan d", tegas Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

Ke-34 Parpol yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti Pemilu legislatif 2009, antara lain:

### **PARPOL BARU**

1. Partai Barisan Nasional.
2. Partai Demokrasi Pembaharuan.
3. Partai Gerakan Indonesia Raya.
4. Partai Hati Nurani Rakyat.
5. Partai Indonesia Sejahtera.
6. Partai Karya Perjuangan.
7. Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
9. Partai Kedaulatan.
10. Partai Matahari Bangsa.
11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan.
12. Partai Patriot.
13. Partai Peduli Rakyat Nasional.
14. Partai Pemuda Indonesia.
15. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia..
16. Partai Perjuangan Indonesia Baru.
17. Partai Persatuan Daerah.
18. Partai Republik Nusantara.

### **PARPOL LAMA**

19. Partai Amanat Nasional.
20. Partai Bintang Reformasi.
21. Partai Bulan Bintang.
22. Partai Damai Sejahtera.
23. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
24. Partai Demokrasi Kebangsaan.
25. Partai Demokrat.
26. Partai Golongan Karya.
27. Partai Karya Peduli Bangsa.
28. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.
29. Partai Keadilan Sejahtera.
30. Partai Kebangkitan Bangsa.
31. Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme.
32. Partai Pelopor.
33. Partai Penegak Demokrasi Indonesia.
34. Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara itu, Ketua Pokja Tahapan Verifikasi Faktual KPU Pusat, Andi Nurpati mengatakan masih ada kesempatan revisi apabila terjadi kesalahan verifikasi yang dilakukan panitia Pokja atau KPU Daerah. "Bila nilainya signifikan untuk melakukan perubahan parpol yang lolos, saya akan mengajukan perubahan dalam rapat pleno", kata Andi Nurpati.

Sebanyak 23 Parpol di Provinsi Papua yang mengikuti verifikasi faktual hanya 12 Parpol yang dinyatakan lolos, sedangkan 11 lainnya dinyatakan gugur. Ke-12 Parpol yang lolos itu antara lain:

1. Partai Hanura.
2. Partai Karya Perjuangan.
3. Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
4. Partai Kedaulatan.
5. Partai Kedaulatan.
6. Partai Matahari Bangsa.
7. Partai Patriot.
8. Partai Peduli Rakyat Nasional.
9. Partai Pemuda Indonesia.
10. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
11. Partai Perjuangan Indonesia Baru.
12. Partai Persatuan Daerah.

Selain itu, ada 6 Parpol baru yang tidak ikut verifikasi di Papua, namun lolos dalam verifikasi KPU Pusat dan berhak menjadi peserta pemilu 2009 yaitu:

13. Partai Barisan Nasional (PBN).
14. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
15. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
16. Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK).
17. Partai Republiku Nusantara (PRN).
18. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

"Dari ke-6 Parpol tersebut, baru Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang memiliki pengurus di Provinsi Papua", kata anggota KPU Provinsi Papua, Hasjim Sangadji.

Menanggapi ancaman pihak Dewan Adat Keerom yang disampaikan Sekretarisnya Hubertus Kwambre, SH untuk memboikot Pemilu 2009, Ketua KPU Provinsi Papua, Beny Sweny mengatakan proses Pemilu di Kabupaten Keerom akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ada. "Setiap warga negara mempunyai hak untuk memberikan suara pada Pemilu. Karena itu adalah hak maka tergantung pada masyarakat, apakah mau menggunakan haknya atau tidak. Jika masyarakat memboikot Pemilu maka aspirasi mereka tidak akan diperjuangkan oleh anggota DPRD terpilih", tegas Beny.

### **9 Juli**

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prof. DR. Anwar Nasution di hadapan dua ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan negara masih rendah. Hal ini ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk di Papua. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan di semua lini terutama peningkatan SDM, penguasaan teknologi informasi dan pembenahan sistem pengendalian internal pemerintah dan patuh terhadap undang-undang.

### **10 Juli**

Aliansi Masyarakat Mimika Bersatu untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika ke Polda Papua atas dugaan korupsi yang terjadi pada Tahun Anggaran 2004, 2005, dan 2006 sebesar Rp 900 miliar. Koordinator Aliansi Masyarakat Mimika Bersatu untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Wilhelmus R. Dekme mengatakan dugaan penyelewengan dana terjadi pada pembangunan infrastruktur, bantuan kemasyarakatan, perjalanan dinas, pajak penghasilan yang tidak dipotong dan korupsi pada pembelian Kapal Karaka II Tahun 2004 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 90 miliar.

### **11 Juli**

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos mengatakan dalam melakukan kampanye partai politik tidak boleh mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, partai politik juga tidak boleh menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta Pemilu yang lain. Parpol juga tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, baik kendaraan maupun gedung; PNS yang hadir sebagai peserta kampanye tidak boleh menggunakan atribut PNS, dan partai politik dalam melakukan kampanye tidak boleh melibatkan anak-anak. "Tidak boleh menghasut atau mengadu domba baik perseorangan maupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap seseorang, sekelompok masyarakat atau peserta Pemilu. Fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan selama kampanye dan anak-anak jangan dilibatkan", tegas Beny Sweny.

Menanggapi pernyataan anggota KPU Provinsi Papua, Drs. Hasjim Sangadji yang mengatakan dari enam partai politik hanya satu partai politik yakni PKNU yang telah memiliki pengurus, Ketua Pimpinan Kolektif Partai Pembaruan Demokrasi (PDP) Provinsi Papua, Pdt. Herman Saud, M.Th mengatakan pernyataan tersebut telah mementahkan upaya partainya (PDP) yang telah melakukan pelantikan terhadap ke-17 Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Pembaruan di Papua. "Sangadji harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Kami tidak mau menjadi bagian parpol yang dirugikan dengan pernyataan dan pemberitaan tersebut".

### **15 Juli**

Rapat Pimpinan Daerah II (Rapinda) Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire diwarnai aksi demo yang berbuntut ricuh. Aksi ini terjadi karena Kader Golkar Isayas Douw tidak masuk dalam kandidat Calon Bupati Nabire dari Partai Golkar.

Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny mengatakan dari 75 orang yang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPD Papua hanya 29 orang yang mengembalikan berkas formulir pendaftaran. Mereka yang mengembalikan formulir pendaftaran itu tiga di antaranya wajah lama yaitu Ferdinand Ibo Yatipay, Toni Tesar dan Markus Zonggonau.

Menanggapi masih adanya kepengurusan Partai Politik ganda, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke, R. Sujatmiko mengharapkan setiap politisi seharusnya memilih satu Partai Politik saja, agar dalam pencalonan nanti tidak mengalami hambatan.

Masyarakat Tiom mensyukuri pembentukan Kabupaten Lanny Jaya dan pengangkatan Ir. Pribadi Sukartono, MM sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Lanny Jaya pada 21 Juni yang dalam pesta yang sangat meriah. Acara ini dihadiri sekitar 15 ribu massa dari 10 Distrik yang ada di Kabupaten Lanny Jaya.

### **16 Juli**

Massa pendukung Calon Bupati Kabupaten Nabire dari Partai Golkar yang kalah dalam pemungutan suara Cabup Partai Golkar, Daniel Buttu mengepung Hotel Nusantara, tempat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Drs. John Ibo, MM menginap. Massa menuntut agar pihak DPD Golkar Papua dan DPP Golkar Pusat untuk tidak melakukan intervensi dalam pemilihan calon Bupati.

### **17 Juli**

Sekretaris Tim Restrukturisasi Kelembagaan Provinsi Papua yang juga menjabat Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Ibrahim IS. Badaruddin, M.Si mengatakan

pihaknya akan segera melakukan restrukturisasi kelembagaan di Papua sesuai dengan amanat PP No. 41 Tahun 2008. Perangkat daerah yang ada di jajaran Pemerintah Provinsi Papua sekarang terdiri dari 19 dinas, 16 badan, 7 biro dan 3 asisten dan 56 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan segera dirampingkan menjadi 15 dinas, 12 badan dan 7 biro, 3 asisten dan hanya 20 UPTD. "Dengan perubahan ini maka ada 541 jabatan yang akan hilang yakni esalon IV 450 lebih, esalon III 378 dan esalon II sekitar 7 jabatan", tegas Badaruddin.

Kantor Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Irian Jaya Barat dipalang oleh massa yang menamakan diri kelompok 315. Kantor dipalang karena Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dinilai tidak melaksanakan tugas dengan serius dan jarang masuk kantor tanpa menunjuk pelaksana tugas.

Para terdakwa kasus *illegal logging* di Wamena divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 30 juta oleh Pengadilan Negeri Wamena. Mereka yang divonis itu antara lain:

1. Ahmad Madong (37).
2. Ansar Dudu (55),
3. Yusuf Saleng (54).
4. Nico Walela (36).
5. Mulyadi Bantang (40) dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 30 juta.

#### **19 Juli**

Menyikapi situasi politik di Papua yang kian memanas menjelang pesta demokrasi Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar doa bersama perwakilan setiap agama yakni Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu dan Budha di ruang rapat Kantor KPU Provinsi Papua. Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos mengatakan doa bersama ini dilaksanakan untuk membangun kekuatan dan meminta pertolongan Tuhan agar proses Pemilu dapat berjalan dengan lancar. "Saya berterimakasih atas kehadirannya, ini merupakan dukungan yang berharga bagi kami, sebab tanpa dukungan doa kami tidak dapat berbuat apa-apa".

#### **21 Juli**

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Mahfud Mannan, SH.MH mengatakan upaya pembarantasan kasus korupsi di lingkungan kejaksaan tinggi Papua dan Papua Barat mulai menunjukkan adanya keseriusan. Hal ini terbukti selama semester pertama (Januari - Juni) Kejaksaan menangani 31 kasus, 9 diantaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri di setiap Kabupaten dan Kota. "Kejati Papua menangani 6 perkara korupsi, Kejari Jayapura menangani 4 perkara korupsi, Kejari Biak 3, Kejari Sorong 6, Kejari Fakfak 2, Kejari Merauke 3, Kejari Nabire 3, Kejari Serui 3 dan Kejari Timika 1 perkara", tegas Mahfud.

Menyikapi banyaknya kader Parpol yang pindah dari partainya ke partai lain, Bupati Kabupaten Keerom, Drs. Celcius Watae mengatakan hendaknya kader partai tidak menjadi "kutu loncat" yang pindah dari baju yang satu ke baju lain, sehingga tidak terjadi konflik baik dalam partai maupun dalam masyarakat. "Kalau kader dari partai lain masuk tentu kader militan dalam partai dilupakan dan kalau ada permasalahan justru oknum baru itu yang mencederai partai bersangkutan", tegas Watae.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, Drs. Hendrik Bertus Bleskadit, M.Si mengatakan jumlah penduduk Kota Jayapura berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jayapura 17 Juli berada di atas 200 ribu maka kuota kursi DPRD Kota Jayapura tetap aman yakni 30 kursi. "Awalnya data yang masuk ke pusat 189. 672 jiwa, tetapi setelah ada data susulan jumlahnya mencapai 200. 145 jiwa, sehingga memenuhi

syarat untuk tetap 30 kursi. Untuk wilayah Kota Jayapura ada 3 daerah pemilihan yakni Dapil I Distrik Jayapura Utara, Dapil II Distrik Jayapura Selatan dan Dapil III Distrik Abepura yang meliputi wilayah Abepura, Heram dan Muaratami", kata Bleskadit.

Massa dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pilkada Jayawijaya melakukan aksi demonstrasi di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua. Mereka menuntut Gubernur Barnabas Suebu segera menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebelum Pilkada berlangsung. Koordinator lapangan Usman Yogobi mengatakan kedatangan mereka untuk meminta Gubernur menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jayawijaya seperti audit dana Tahun Anggaran 2004-2008 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Plt. Bupati Jayawijaya.

Menjelang Pilkada Bupati Kabupaten Biak Numfor, Koalisi Padat Karya Keadilan yang terdiri dari Partai Golkar dan PKP Indonesia secara resmi mengusung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen, S.Sos. MM sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. Alimudin Sabe. Maryen selaku Cabup mengatakan ia memilih Alimudin karena dinilai berpengalaman di bidang pemerintah sebagai pamong murni yang telah bekerja di Biak Numfor selama 33 tahun. "Harapan saya jika kami terpilih maka tidak susah mengatur pemerintahan, sebab Wakil Bupati adalah orang pamong asli dan sudah menjabat Sekda serta sudah mengenal dan dikenal masyarakat Biak Numfor", tegas Maryen.

## **22 Juli**

Menyikapi maraknya perdebatan 11 kursi DPRD untuk orang asli Papua, Ketua KPU Provinsi Papua Benny Swenny, S. Sos mengatakan akan memfasilitasi Ketua MRP Drs. Agus Alua, M.Th untuk bertemu dengan Ketua KPU Pusat di Jakarta guna membicarakan persoalan ini. "Sesuai kesepakatan KPU Provinsi Papua dalam menindaklanjuti pertemuan dengan MRP maka kami akan menjembatani Ketua MRP untuk bertemu secara langsung dengan Ketua KPU Pusat dan anggotanya", kata Benny Sweny.

Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Kundrat Gusbager mengharapkan Pemerintah Provinsi Papua, para Bupati dan Wakil Bupati se-Papua memberikan dukungan penuh terhadap sosialisasi UU Partai Politik, UU Pemilu dan berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan Pemilu yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas).

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Mahmud Mannan, SH. MH mengatakan akan mencopot empat jaksa yang melakukan pelanggaran dan merusak citra kejaksaan. Keempat Jaksa itu masing-masing bertugas di Kejari Timika dan Kejati Papua. "Dua akan dipecat dan dua lainnya akan dicopot dari jaksa fungsional karena melakukan pemerasan, selingkuh dan tidak melaksanakan tugas dengan baik", kata Mahmud Mannan.

Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) melakukan demonstrasi ke Kantor Pengadilan Tinggi Jayapura. Mereka menuntut Pengadilan Tinggi segera membebaskan kader GMPI, Marthen Luther Lie. Ketua GMPI Korda Papua, Yulianus Dwaa, A.MG mengatakan penahanan Marthen Luther Lie tidak memiliki dasar hukum maka ia harus segera dibebaskan.

## **23 Juli**

Persidangan delapan orang mantan anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004 yaitu Drs. Theo B. Opki, Didimus Yahuli, Yahya Pagawak, Drs. Demianus Jehaduk, Step Kogoya, Letinus Jikwa, Yulianus Waisimon dan Dewan Esama digelar di Pengadilan Negeri Wamena. Persidangan ini bertujuan mendengarkan keterangan para terdakwa.

Rencana pelantikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Puncak Jaya oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S. Sos batal dilakukan karena didatangi puluhan massa dari komponen masyarakat dan mahasiswa Kabupaten Puncak Jaya. Anggota Tim Seleksi KPU Puncak Jaya, Emy Ricson Enembe, SE mengatakan pihaknya kecewa terhadap kinerja KPU Provinsi Papua karena menambahkan 2 nama yakni Deinais Geley, S.Sos dan Pdt. Simeon Heluka dalam daftar yang akan dilantik menjadi anggota KPU Puncak Jaya padahal kedua nama tersebut tidak pernah ikut dalam seleksi di KPU Kabupaten Puncak Jaya. "Ini ada kepentingan apa sehingga tiba-tiba mereka berdua datang untuk dilantik?", tegas Ricson Enembe.

#### **24 Juli**

Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan alat evaporasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura di Pengadilan Negeri Jayapura dengan terdakwa dr. Paulina Watofa Sp.R diwarnai aksi protes dari pihak keluarga dan Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Mereka menuntut saksi kunci dr. Clemens Manyakori Sp.R untuk hadir dan memberikan kesaksian. "Sebaiknya sidang diberhentikan saja jika dr. Clemens tidak bisa dihadirkan, sebab dia yang tahu persis pengadaan alat Evaporasi tersebut di Rumah Sakit Dok II", tegas Gerald Yoku, salah seorang anggota keluarga dr. Paulina Watofa.

Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2009-2014 hari ini dibuka. Empat dari enam koalisi secara resmi telah mendeklarasikan calonnya. Koalisi Padat Karya Keadilan mengusung pasangan Yusuf M Maryen, S.Sos, MM/Drs Alimudin Sabe, Koalisi Biak Untuk Semua mengusung pasangan Obet Albert Sroyer/Drs. Hamdan, M.Si, Koalisi Kebangkitan Bangsa mengusung Ir. H.E Macbon, M.Si/Andi Firman M,SE, Koalisi BNBB mengusung pasangan Adrianus Kafiar, SE/Ir. Joko Wahyudi, sementara koalisi Aimindo dan Biak Bersatu belum mendeklarasikan calonnya.

Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto mengeluhkan sikap kurang harmonis di antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. "Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ada gejala Pemerintah Daerah mau jalan sendiri-sendiri. Hal ini harus diluruskan".

#### **25 Juli**

Ketua Pokja Pendaftaran Calon DPR-RI, KPU Papua Jakobus Irianto membantah tuduhan KPU Pusat yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua tidak ada calon perempuan. Ia mengatakan dari 77 orang yang mendaftar, 7 orang adalah perempuan.

#### **26 Juli**

Bupati Kabupaten Biak Numfor, Yusuf Melianus Maryen, S.Sos mengatakan pemekaran Distrik dan Kampung bertujuan memperpendek rentang kendali pelayanan. "Sejak 2007 Kabupaten Biak Numfor telah memekarkan 9 Distrik dan 61 Kampung sehingga sekarang ada 19 Distrik dan 171 Kampung/Kelurahan" kata Bupati Maryen.

Pasangan Obed Albert Sroyer dan Drs. Hamdan, M.Si resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2009-2014. Pasangan ini didukung oleh Koalisi Biak untuk Semua yang merupakan gabungan dari enam Partai Politik: PPP, PAN, PBB,PSI, PBSD dan Partai Pelopor.

#### **28 Juli**

Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si mengatakan mulai hari ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan Tahun 2007. BPK akan melaksanakan tugasnya selama 30-46 hari.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Hasyim Sangadji mengatakan penetapan jumlah kursi legislatif akan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk pada daerah pemilihan (Dapil). Adapun Provinsi Papua dibagi menjadi VI Dapil, antara lain:

- I. Dapil I : Kabupaten dan Kota Jayapura: 9 kursi.
- II. Dapil II : Keerom, Yahukimo, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang: 8 kursi.
- III. Dapil III : Merauke dan Mappi: 7 kursi.
- IV. Dapil IV : Kabupaten Jayawijaya: 13 kursi.
- V. Dapil V : Mimika, Paniai, Dogiyai, dan Nabire: 12 kursi.
- VI. Dapil VI : Biak, Supiori, Yapen, Waropen dan Mamberamo Tengah: 7 kursi

Upaya Ketua MRP, Agus Alua dan Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny dalam memperjuangkan 11 kursi untuk orang asli Papua di DPRP belum membuahkan hasil maksimal karena terdapat beda interpretasi terhadap UU No. 21 Tahun 2001 pasal 6 ayat 2 tentang pemilihan dan pengangkatan anggota DPRP. Dalam pertemuan pihak MRP dan KPU Provinsi Papua dengan KPU Pusat diputuskan bahwa semua anggota DPRP harus melalui proses pemilihan bukan pengangkatan agar lebih selektif, dan adil. "11 kursi untuk orang Papua asli juga harus melalui pemilihan bukan pengangkatan", tegas Benny.

Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Wamena menuntut tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta bagi tiga orang mantan Anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004 yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ketiga mantan Anggota DPRD yang dituntut itu masing-masing Yance Feri Kogoya, Timotius Wakur dan Gabriel Lagowan.

Pasangan Ir. H.E Mackbon, M.Si – Andi Firman Madjadi, SE yang diusung Koalisi Kebangkitan Bangsa secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Biak Numfor, sebagai bakal Balon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor. Pendaftaran ini diiringi ribuan massa dan tarian adat yang dimulai dari Kantor DPC Kabupaten Biak Numfor menuju Kantor KPU. "Setelah pendaftaran ini kami akan melakukan konsolidasi ke tingkat akar rumput dan menunggu hasil penetapan dari KPU", kata Wakil Balon Bupati Andi Firman Madjadi, SE

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KKPPI) Provinsi Papua, Santce W. Wonetorey, S.Sos mengatakan banyak Undang-Undang dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak mengakomodir kepentingan perempuan.

## 29 Juli

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Biak Numfor tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati Yusuf M. Maryen, S.Sos, MM dan Wakil Bupati, Adrianus Kafiar, SE tahun 2004-2008 secara resmi ditutup. Pada kesempatan ini DPRD Biak Numfor juga mengesahkan tiga peraturan daerah (Perda) yaitu a) Perda susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Distrik; b) Susunan organisasi dan tata kerja kelurahan; c) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor. Sedangkan satu Perda yang ditunda yaitu tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendaftarkan diri menjadi Caleg harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS. "Dalam kaitan dengan pencalonan sebagai anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maka PNS harus mengundurkan diri dan tidak boleh ditarik lagi menjadi PNS meski pun tidak terpilih menjadi anggota DPR. Hal ini sesuai UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 50 huruf k".

### 30 Juli

Turun Kampung (Turkam) tahap II yang dilakukan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH yang dimulai 9 Juli di Kampung Hubiliki, Elelim, Kabupaten Yalimo hari ini resmi ditutup di Kampung Mapuru Jaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

Sekjen Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Cahaya Toli, Hosea Genongga, S.Sos mengatakan pemekaran Kabupaten Cahaya Toli perlu dilakukan karena wilayah Kabupaten Tolikara sekarang terlalu luas. "Pemekaran ini bertujuan mempermudah jangkauan pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan", tegas Hosea.

Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Biak Numfor akan berakhir hari ini pukul 00.00 WP. Hingga saat ini telah ada 4 pasangan Cabup/Cawabup yang mendaftarkan diri di Kantor KPUD Biak Numfor, antara lain:

No.	Nama Koalisi / Parpol	Balon Bupati / Wakil
1.	Padat Karya Keadilan(Golkar & PKPI)	Yusuf M. Maeyen, S.Sos, MM/Drs. Amiluddin Sabe
2.	Biak Numfor Bangkit Bersama (PDI-P, PDS, PPD & Patriot Pancasila)	Adrianus Kafiar, SE/Ir. Joko Wahyudi
3.	Kebangkitan Bangsa (PKB & PNI Marhaenisme)	Ir. H.E Mackbon/Andi Firman Madjadi, SE
4.	Koalisi Biak Untuk Semua (PPP, PBS, PAN, Pelopor, PBB & PSI)	Obet Albert Sroyer/Drs. Hamdan, M.Si

Sementara itu, 2 pasangan yang tidak diterima oleh KPUD Biak Numfor karena kuota Parpol yang mendukung tidak cukup yakni pasangan, Elisabeth Fitowin S.Pd/Lasarus Boseran, SE dan Pasangan Drs. Max Msen/Samuel Rumansara.

### 1 Agustus

Ketua Pokja Pendaftaran Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di KPU Provinsi Papua, Irianto Jacobus mengatakan sebanyak 78 bakal calon anggota DPD RI mendaftar dan mengambil formulir tetapi yang mengembalikan hanya 30 orang. "Dari 30 pendaftar yang mengembalikan berkas, setelah dilakukan verifikasi administrasi hanya 15 orang yang lolos, empat di antaranya adalah perempuan", kata Irianto. Adapun ke-15 Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua itu adalah

1. Sitor Simbolon, SH.
2. Marcus Louis Zonggonao, BA.
3. Pdt. Elion Numberi, S.Th.
4. Helina Murib.
5. Drs. Albert Melianus Pugu.
6. Drs. Billy Wilhelmus Jamlean.
7. Annie Numberi.
8. Ferdinanda W. Ibo Yatipay.
9. Tonny Tesar.
10. Drs. YTL. Palittin.
11. Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM.
12. Hasbi Suaib, ST
13. Terry J. Antoh Asmuruf, SH, MM.
14. Zainal Abidin Bay.
15. Hendrik S. Korwa, SIP.

#### 4 Agustus

Massa dari perwakilan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya menggelar demonstrasi di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka menuntut dua nama anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya yang direkrut oleh KPU tanpa melalui seleksi KPU Kabupaten Puncak Jaya segera dicoret. Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny mengatakan setelah melalui pembicaraan yang alot akhirnya dibuat kesepakatan bersama yang memuat dua hal pokok yaitu,

1. Calon anggota KPU Puncak Jaya yang memenuhi syarat undang-undang yang akan dilantik yaitu, Jenifer Tabuni, Aletius Tabuni dan Yopenius Wonda
2. Merekrut usulan tambahan dari 10 besar yang diusulkan oleh Tim Seleksi.

"Kedua opsi ini akan dibawa ke pleno KPU Papua dan akan dikonsultasikan ke Biro Hukum KPU Pusat, degan catatan tidak ada batas waktunya", tegas Benny.

Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Massa yang dikoordinir oleh Yusak Murib menuntut Lukas Enembe segera turun dari jabatannya dan KPU Provinsi Papua segera melantik KPUD Puncak Jaya. "Kami masyarakat Puncak Jaya dengan tegas menolak Lukas Enembe dan meminta KPU Provinsi segera melantik hasil kerja tim seleksi KPUD Puncak Jaya atas nama Aletius Tabuni, Darlin Tabuni, Yopenius Wonda, Denio Wonda, dan Meki Wonda. Bukan Deinas dan Hiluka".

Ratusan massa melakukan demonstrasi ke Kantor Kejaksaan Negeri Biak menuntut Kejaksaan Negeri Biak segera menuntaskan berbagai kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Koordinator demonstrasi Marice Rumbiak mempertanyakan mengapa Kejari Biak tidak menyelesaikan kasus-kasus korupsi padahal pencuri ayam saja dijatuhi hukuman penjara. "Tidak ada kasus korupsi yang diselesaikan maka kami menterjemahkan KUHP sebagai "Kasih Uang Habis Perkara", tegas Marice. Sementara itu Kajati Biak A. Sitingjak di depan pendemo mengatakan ia akan menuntaskan berbagai kasus korupsi tanpa memandang bulu. "Sejak dilantik saya sudah berkomitmen memberantas korupsi di Biak", tegas Sitingjak.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Daan Daat ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri karena perannya sebagai Direktur Utama PT Kawei Sejahtera Maining yang melakukan illegal mining nikel di Pulau Kawei, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. "Yang bersangkutan telah ditahan Mabes Polri pada Minggu 28 Juli yang lalu dan dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri karena perannya sebagai Direktur Utama PT Kawei Sejahtera Mining", tegas Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Drs. Paulus Waterpauw.

#### 5 Agustus

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta penanganan kasus korupsi di daerah tidak perlu membutuhkan surat izin Presiden melainkan cukup surat pemberitahuan saja. Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho mengatakan pejabat yang terlibat korupsi tidak perlu meminta surat izin, tapi cukup pemberitahuan saja agar kasus cepat diproses dan tidak melalui mekanisme yang panjang dan lama.

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Sudiro Husodo, SH mengatakan pihaknya masih melakukan proses hukum terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Mappi dan Boven Digoel. Dugaan korupsi yang terjadi di Mappi meliputi proyek pengadaan mesin pembangkit tenaga listrik. Sedangkan dugaan korupsi di Boven Digoel meliputi proyek pengadaan kapal, proyek pengadaan tiang listrik dan penggunaan dana kedua proyek sebesar Rp 12 miliar.

## 6 Agustus

Ketua Dewan Adat Biak, Piter Yarangga mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya Kepala Kejaksaan Negeri Biak, Abraham A. Sitinjak, SH, MH dan Kapolres Biak Numfor Kif Aminanto, SH, MH dalam mengusut kasus korupsi. "Masyarakat Adat Biak mendukung 100% pengusutan kasus korupsi karena sudah lama masyarakat menderita karena penyalahgunaan uang rakyat".

Masyarakat Kampung Pagaleme sebagai pemilik ulayat lokasi Kantor Bupati Puncak Jaya memalang Kantor Bupati Puncak Jaya karena belum dilakukan pembayaran ganti rugi tanah oleh Pemkab Puncak Jaya. "Kami merelakan Pemkab membangun perkantoran di atas tanah kami namun kami menuntut janji Bupati dan Wakil Bupati untuk membayar ganti rugi harus segera dilakukan" kata Koordinator pemalangan Roman Telenggen. Menanggapi tuntutan warga pelaksana harian Sekda Puncak Jaya, Syamsudin Roma, S.Sos mengatakan Bupati Kabupaten Puncak Jaya sedang keluar daerah, tetapi Bupati sudah berjanji bahwa kembalinya ke Puncak Jaya akan segera dilakukan pembayaran ganti rugi tanah.

Dirjen HAM Depkum HAM, Harkristuti Harkrisnowo di Jakarta mengatakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM Berat pada masa mendatang Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). "Dengan meratifikasi ICC berarti pemerintah menyatakan tunduk pada peraturan ICC, namun ICC tidak dapat menangani kasus-kasus masa lalu. Jadi lebih kepada pencegahan. ICC berlaku secara internasional yang berfungsi untuk menangani kejahatan-kejahatan berat seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan genosida".

## 7 Agustus

Hari ini tepat pk. 13.25 WP bertempat di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, sebanyak 104 anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Ikrar kesetiaan dibacakan oleh Komandan Kompi dari Paulus Kalakdana, Engel Kalakmabin di hadapan Menko Kesra, Aburisal Bakrie. Mereka yang menyerahkan diri terdiri atas anak-anak 25 orang, perempuan 8 orang dan laki-laki 71 orang. Selain itu ada 50 TPN/OPM dari kelompok Agustinus Kapropka juga bergabung dengan NKRI. Anggota TPN/OPM ini diterima langsung oleh Menko Kesra, Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dan Kepala BIN Syamsir Siregar. Sementara itu, pejabat Provinsi Papua yang turut hadir ialah Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, Ketua MRP Agus Alua dan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Wellington Wenda.

Direktur ICS Papua, Budi Setyanto, SH mengatakan masa kerja 56 anggota DPRP akan segera berakhir tetapi pekerjaan yang dilakukan selama lima tahun (2004-2009) tidak maksimal. Bahkan tiga fungsi DPRP yakni legislasi, *budgeting*, dan pengawasan politik tidak berjalan. "Fungsi legislasi seharusnya selama 5 tahun DPRP bisa menyelesaikan amanat Otsus yaitu 11 Perdasus dan 17 Perdasi, tetapi itu tidak terjadi. DPRP juga tidak mengkritisi APBD yang diajukan Pemerintah bahkan tidak pernah membantah dan merevisi *budget*", tegas Budi.

Kelompok Suku Nafri dan Wamena yang terlibat bentrok bertemu di Kantor DPRD Kota Jayapura. Pertemuan ini dihadiri oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura Yulius Mambay, Ketua LMA Port Numbay yang juga Ondoafi Nafri, George Awi dan Kepala Suku Besar Jayawijaya, Philipus Halitopo. "Pertemuan dilakukan agar permasalahan ini dapat diselesaikan sehingga tidak ada pihak lain yang mengambil kesempatan untuk menunggangi permasalahan ini", kata Kapolresta

Jayapura, Roberth Djoenso.

Menko Kesra, Aburisal Bakrie mengaku tidak mengetahui wabah kolera yang menelan ratusan jiwa (data Gereja 232 jiwa) di Kabupaten Dogiyai. "Saya belum mendengar laporan tentang kasus wabah kolera itu, bahkan letak Dogiyai juga kami belum tahu. Jika memang terjadi akan segera ditangani melalui pendekatan bersama yang kuncinya adalah kesejahteraan rakyat terutama di bidang kesehatan", kata Aburisal Bakrie. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan hasil penelitian mereka ke Pemerintah Pusat.

Menko Kesra, Aburisal Bakrie meresmikan Kantor Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada kesempatan ini Menko Kesra menjelaskan bahwa sejak 2007 telah direalisasikan Program Penanganan Pasca Bencana (PPPB) senilai Rp 16 miliar yang bersumber dari dana bantuan atau hibah pemerintah pusat yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Mahfud Mannan, SH mengatakan kasus *illegal logging* di Papua 2005-2007 sangat tinggi, bahkan dalam kurun waktu itu kejaksaan mengajukan 29 kasus *illegal logging* dan diputus bebas oleh pengadilan. "Selama 2005-2007 kasus *illegal logging* menonjol di Papua, tetapi lebih menonjol lagi karena 29 kasus yang diajukan diputus bebas oleh pengadilan".

### **9 Agustus**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya, Marten Jitmau, S.Pd mengatakan hingga saat ini jumlah pemilih di Kabupaten Puncak Jaya yang telah terdaftar sebanyak 14. 614 dari 16 Distrik yang ada, tetapi hal ini masih bersifat sementara karena ada kemungkinan warga yang meninggal dan pindah serta datang.

Dunia penerbangan Papua kembali dirundung duka, Pesawat PC 60 milik Association Mission Aviation (AMA) hilang di Distrik Ndundu Kabupaten Tolikara. Pesawat ini diterbangkan oleh Pilot Dave Claffer asal Amerika Serikat.

### **10 Agustus**

Proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan dan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua mengalami keterlambatan karena banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlambat memasukkan laporannya. Kepala Bappeda Provinsi Papua, Drs. Alex Rumaseb mengharapkan akhir Agustus semua sudah selesai karena akan berpengaruh pada jadwal persidangan di DPRP.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Biak Numfor melantik 561 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di 187 Kampung/Kelurahan. Selain itu, KPU juga melantik 95 anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 19 Distrik.

### **12 Agustus**

Kejaksaan Negeri Serui menetapkan 3 tersangka korupsi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Waropen terkait proyek pembuatan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) tahun 2004-2005 dengan nilai proyek Rp 600 juta. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain Drs. Kaleb Imbiri, M.Si (Kepala Bappeda Waropen), Drs. Kalilus Bonay (Staf Bappeda Waropen), dan Syafrudin Daerlan, SE, M.Si (Kabag Ekonomi Bappeda Provinsi Papua).

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, Drs. Eddy Rachman, MM. AK mengatakan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan pengentasan kemiskinan. Pengawasan dana akan dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu represif bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penuntasan kasus KKN melalui kerja sama dengan Polri dan Kejagung. Preventif melalui evaluasi dan operasional audit untuk menghilangkan titik KKN. Dan represif melalui upaya penyadapan dan penangkapan di lapangan. "BPKP akan melakukan gebrakan bila terjadi penyalahgunaan dana".

### **13 Agustus**

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Drs. Eddy Rachman, MM mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk memeriksa setiap anggaran pemerintah termasuk dana yang disalurkan ke setiap perguruan tinggi. "Kami dipercaya presiden menjadi aparat pengawasan internal pemerintah termasuk mengawasi dana pemerintah yang mengalir ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta apabila menerima bantuan pemerintah. Korupsi dapat terjadi melalui tiga unsur pokok yakni tekanan, sistem dan ketahanan moral".

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Benny Sweny S.Sos mengatakan verifikasi berkas bakal caleg DPRD Puncak Jaya akan dilakukan oleh KPU Provinsi Papua karena anggota KPU Puncak Jaya belum dilantik. "Saat ini semua KPU Kabupaten/Kota telah dilantik kecuali Puncak Jaya belum dilantik. Hal ini merupakan kegagalan Tim Seleksi karena tidak melaksanakan tahapan secara baik. Karena itu, atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan Parpol peserta Pemilu di Puncak Jaya".

### **14 Agustus**

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Merauke mulai menerima berkas pengajuan nama calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Merauke dari setiap Partai politik yang ada di Merauke. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Merauke juga sangat menekankan pentingnya keterwakilan perempuan yakni 30%. "Pengajuan nama calon legislatif mulai dibuka hari ini dan berlangsung hingga 19 Agustus mendatang. Tetapi kalau ada parpol yang calegnya memiliki data ayang belum lengkap bisa didaftar terlebih dahulu. Demikian halnya harus memperhatikan keterwakilan perempuan yakni 30% jika tidak akan dikembalikan", anggota KPU Merauke Ibnu Jaya Su'ud.

Berkas kelengkapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor yang diusung Koalisi Padat Karya Keadilan Yusuf M. Maryen dan Drs. Alimuddin diserahkan langsung oleh Pimpinan Koalisi Padat Karya Keadilan, Hengki R. Pontonuwu di Kantor KPU Biak Numfor.

Kapolres Biak Numfor, AKBP Kif Aminanto, SIK, SH, MH mengatakan pihaknya telah meminta BPKP untuk mengaudit dugaan korupsi dana bantuan keagamaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp 830 juta.

### **15 Agustus**

Kapolres Biak Numfor, AKBP Kif Aminanto, SIK, SH, MH mengatakan pihaknya telah meminta BPKP untuk mengaudit dugaan korupsi dana bantuan keagamaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp 830 juta.

Menyikapi banyaknya Caleg yang berstatus PNS, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Matius Awaitau SE, mengatakan PNS yang mau mendaftarkan diri

sebagai Caleg harus mengundurkan diri secara permanen dari PNS.

### **19 Agustus**

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, dr. Petrus Tjia mengatakan biaya pemeriksaan bagi para Calon Legislatif (Caleg) sebesar Rp 550 ribu sudah sesuai aturan yang berlaku yakni Perda No. 5 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah membuka pendaftaran Caleg sejak tanggal 14 - 19 Agustus, namun hingga kini baru dua Partai Politik yang mendaftarkan Calegnya yaitu PKS dan PDI-P.

Kepala Kejaksaan Negeri Serui, Constan R. Ansanay, SH mengatakan pihaknya melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Yapen Waropen dan Sekda Yapen Waropen atas dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Yapen Waropen tahun anggaran 2004-2005 sebesar Rp 7,6 miliar.

### **20 Agustus**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua memperpanjang pendaftaran Caleg hingga hari ini (Rabu, 20/08, pk.18.00 WP). Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos mengatakan perpanjangan pendaftaran karena ada beberapa Partai seperti Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka dan Partai Kedaulatan memiliki kepengurusan ganda. Selain itu, di daerah-daerah belum banyak Parpol yang mendaftarkan calonnya seperti di Sarmi, Yahukimo, Nduga, Paniai, dan Mimika baru ada 2 parpol yang mendaftar. Sementara di Lanny Jaya dan Jayawijaya belum ada yang mendaftar, sedangkan di Kabupaten lainnya bervariasi antara 15-30 Parpol yang baru mendaftar.

Forum Komunikasi Kristen Indonesia Papua (FKKIP) mendukung sikap MRP untuk memboikot Pemilu jika tuntutan 11 kursi untuk orang asli Papua di DPRP tidak dipenuhi. Wakil Koordinator Bidang Denominasi Gereja-Gereja FKKIP, Pdt. Wiem Mauri mengatakan di era Otsus Orang Papua menginginkan ada supremasi hukum yang baik, tidak ada tindakan arogan dan mau mendengarkan pikiran Orang Papua.

### **21 Agustus**

Cendekiawan asal Pegunungan Tengah, Hironimus Hubi mempertanyakan banyaknya anggota MRP yang masuk partai dan menjadi pengurus serta Caleg. Ia mengatakan sebagian anggota MRP ada yang menjadi Ketua Parpol seperti Partai Hanura, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Golkar, PDI-P, Partai Basarnas, Partai Gerindra, PBR, Partai Bintang Matahari, PKB Muhaimin Iskandar dan PKB versi Gus Dur.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena memvonis 3 orang mantan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 199-2004 dengan hukuman satu tahun penjara, denda Rp 50 juta dan membayar uang pergantian sebesar Rp 170 juta. Mereka yang dijatuhi vonis itu adalah Yance Feri Kogoya, Timotius Wakur, Gabriel Lagowan.

### **22 Agustus**

Menyikapi adanya beberapa anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2009, Politisi yang juga Caleg Partai Golkar, Hironimus Hubi mengatakan Pimpinan MRP harus segera mengambil sikap terhadap persoalan ini. "Pimpinan MRP harus memperhatikan hal ini dan Caleg bersangkutan harus mengundurkan diri dari MRP sebab MRP merupakan lembaga kultural yang meliputi agama, adat dan perempuan".

## 22 Agustus

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima 2700 berkas kasus dugaan korupsi termasuk dugaan korupsi di Papua yang dilaporkan masyarakat. "Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah. Apabila tidak ditangani dengan baik maka kami mengambil alih kasus itu".

## 24 Agustus

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Merauke, Anthonius Kaize mengatakan verifikasi awal terhadap 627 Caleg yang mendaftarkan diri ditemukan banyak PNS terutama guru. "Sebagian besar Caleg Pemilu tahun ini adalah guru yang masih aktif, namun sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik mereka harus mengundurkan diri dari PNS".

## 25 Agustus

Tokoh intelektual Biak Numfor meminta Pilkada Biak Numfor ditunda hingga 2010 setelah Pemilu Legislatif dan Presiden. Hal ini dikarenakan calon independen tidak diakomodir dalam Pilkada. "Patut dipertanyakan mengapa calon independen tidak diakomodir dalam Pilkada, padahal aturan calon independen sudah ada", kata salah seorang tokoh intelektual Biak Numfor Rudolof Morin.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, Drs. Hendrik C. Bleskadit mengatakan sejak dibuka hingga penutupan, 19 Agustus sebanyak 801 Caleg dari 38 Parpol yang mendaftarkan diri. "Dari verifikasi yang dilakukan terhadap 801 Caleg hanya 610 Caleg yang memasukkan berkas secara lengkap sedangkan 191 Caleg tidak lengkap".

Menyambut pesta demokrasi Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayawijaya membagi 4 daerah pemilihan (Dapil) yang meliputi:

1. Daerah Pemilihan I : Distrik Wamena
2. Daerah Pemilihan II : Distrik Asolokobal dan Distrik Walelagama
3. Daerah Pemilihan III : Distrik Hubikosi, Pelebaga, Musatfak dan Kurulu
4. Daerah Pemilihan IV : Distrik Yalengga, Wollo, Asologaima dan Distrik Bolakme.

Ketua KPUD Kabupaten Jayawijaya, Alexander Mauri mengatakan pembagian daerah pemilihan (Dapil) dilakukan berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Jayawijaya yang mencapai 162.700 jiwa dengan 30 kursi legislatif yang akan diperebutkan pada Pemilu legislatif 2009 nanti.

Kabupaten Mamberamo Tengah dengan jumlah penduduk 39.883 jiwa akan memperebutkan 20 kursi legislatif dibagi menjadi tiga daerah pemilihan:

1. Daerah Pemilihan I : Distrik Kobakma dan Megambilis.
2. Daerah Pemilihan II : Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa.
3. Daerah Pemilihan III : Distrik Kelila.

Kabupaten Lanny Jaya dibagi ke dalam tiga daerah pemilihan (Dapil) yaitu

1. Daerah Pemilihan I : Distrik Tiom, Distrik Malagaineri, dan Distrik Tiom Neri.
2. Daerah Pemilihan II : Distrik Pirime, Balingga dan Kwiyawage.
3. Daerah Pemilihan III : Distrik Makki, Gamelia, Dimba dan Distrik Poga.

Jumlah penduduk Kabupaten Lanny Jaya adalah 164.288 akan memperebutkan 25 kursi legislatif.

Kabupaten Yalimo dibagi menjadi dua daerah pemilihan (Dapil) yaitu

1. Daerah Pemilihan I : Distrik Elelim, Abenaho dan Distrik Benawa.
2. Daerah Pemilihan II : Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili.

Jumlah penduduk 46.570 jiwa akan memperebutkan 20 kursi legislatif.

Kabupaten Nduga terbagi menjadi dua daerah pemilihan (Dapil) yaitu

1. Daerah Pemilihan I : Distrik Kenyam, Wosak, Mbua dan Distrik Gearek.
2. Daerah Pemilihan II : Distrik Mapenduma, Yigi, Muda, dan Distrik Geselema.

Jumlah penduduk 50.910 dan memperebutkan 20 kursi.

## 26 Agustus

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mempertanyakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2007. "Sampai sekarang kami belum mengetahui hasil audit keuangan 2007 oleh BPK, padahal telah selesai dilakukan", kata Demas Patty, S.Pd, dari Fraksi Golkar.

Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya menerima penghargaan sebagai Kota dan Kabupaten Peduli Kehutanan 2008 bersama 20 Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia. Menteri Kehutanan, MS Kaban dalam acara penyerahan penghargaan mengatakan hutan kita yang kritis sangat luas mencapai 1,9 juta ha lahan kritis berada di kawasan hutan dan 10,7 juta ha berada di kawasan lain. Maka upaya para Bupati dan Wali Kota dalam perlindungan dan pembangunan hutan sangat dihargai.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua masih menunggu surat izin Presiden untuk memeriksa Bupati Kabupaten Tolikara, John Tabo terkait dugaan korupsi saat menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya periode 1999-2004. "Kami telah mengirim surat ke Kapolri untuk meminta persetujuan Presiden guna memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka karena selama ini baru sebagai saksi", kata Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Paulus Waterpauw. Menanggapi hal ini, John Tabo mengatakan dirinya akan memenuhi panggilan apabila ada surat izin dari Presiden.

Komandan Resort Militer (Danrem) 172/PYW mengadakan tatap muka dengan sepuluh orang Tokoh Masyarakat (Tomas) Jayapura. Dalam tatap muka ini hal-hal yang didiskusikan antara lain persoalan seputar SKB 5 Menteri dan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Salah seorang tokoh masyarakat meminta jangan lagi menciptakan ketidakadilan bagi Orang Papua dengan memberi stigma kepada orang Papua sebagai OPM.

Pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura serius menangani kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anggota DPRD terhadap Kristin, petugas medis RSUD Dok II Jayapura. "Polisi serius menangani kasus ini dengan mengirimkan surat izin pemeriksaan ke Depdagri", kata Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, SH.

Pejabat Bupati Kabupaten Jayawijaya, Washington Turnip, SH mengatakan akan menyukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Ia menambahkan beberapa calon yang mengemuka antara lain:

1. Budiman Kogoya : Mantan Ketua DPRD Jayawijaya.
2. Nikolas Jigibalom : Mantan Wakil Bupati Jayawijaya.
3. Simeon Itlai : Mantan anggota DPRD Irian Jaya.
4. Jhon Wempi Wetipo : PNS.
5. Jeremias Wetipo : Calon independen.

Kepolisian Resort (Polres) Biak Numfor menyerahkan empat tersangka kasus korupsi pengadaan meubeler Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 349 juta ke Kejaksaan Negeri Biak.

### **27 Agustus**

Bupati Yapen Waropen, Sulaiman Daud Betawi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penggunaan APBD Kabupaten Yapen Waropen 2005 dan 2006 yang tidak sesuai prosedur. "Hari ini KPK melakukan upaya penahanan terhadap Sulaiman Daud Betawi", kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Upaya Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memperjuangkan keterwakilan 11 orang Asli Papua di kursi DPRP mulai mendapatkan titik terang. Tim lobi yang dipimpin Wakil Ketua II MRP Dra. Hana Hikoyabi melakukan pertemuan dengan Ketua KPU Pusat Prof. Dr. HA. Hafiz Anshary yang memberikan jawaban sangat positif yakni mendukung 11 kursi untuk orang asli Papua. "Ketua KPU Pusat memahami dan menerima kami, sebab hal yang kami perjuangkan untuk kepentingan rakyat Papua maka akan dicari mekanisme dan tata cara 11 kursi tersebut".

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto mengatakan di seluruh Indonesia terdapat 335 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tetapi hanya 80 PDAM yang berada dalam kategori sehat dan layak sedangkan 139 berada dalam kondisi sakit dan 116 kondisi kurang sehat dengan tingkat kehilangan air sekitar 37%.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mimika menyerahkan hasil rapat pleno penentuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Mimika ke DPRD Mimika. Penyerahan hasil pleno KPUD ini mendapat pengawalan ketat dari satuan Brimob karena adanya kelompok kontra yang akan menduduki Kantor DPRD pasca penyerahan hasil pleno.

### **28 Agustus**

Para terdakwa kasus korupsi di PD. Irian Bakti yang merugikan Pemda Provinsi Papua senilai Rp 1, 75 miliar mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Mereka yang terlibat dalam kasus korupsi ini dan disidangkan adalah Direktur Utama (Dirut), Mathias Sarwa, SE. MM, Direktur Keuangan Drs. Jantje Lagu, AK, MM, Direktur Niaga, Kahimuddin M. Achmad, SE dan Direktur SDM, Berth Titihalawa, SE, MM.

### **29 Agustus**

Ketua Pokja Pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) KPU Provinsi Papua Drs. S.A. Hasjim Sangadji mengatakan apabila ada anggota MRP yang hendak mendaftarkan diri menjadi Caleg DPRP pada Pemilu 2009 harus mengundurkan diri sari MRP. "Sesuai aturan dalam UU No. 10 Tahun 2008, karena anggota MRP gajinya bersumber dari anggaran negara maka jika ingin menjadi Caleg yang bersangkutan harus mengundurkan diri", tegas Sangadji.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan lima pasangan Calon Bupati yang akan maju dalam Pilkada Biak Numfor 2008. Kelima pasangan itu adalah:

1. Yusuf M. Maryen, S.Sos, MM/Drs. Amiluddin Sabe.
2. Adrianus Kafiari, SE/Ir. Joko Wahyudi.
3. Obet Albert Sroyer/Drs. Hamdan, M.Si.
4. Ir. H.E Mackbon/Andi Firman Madjadi, SE.
5. Reynelda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th/Max Richard Funmawi Krey, A.md.Ts.

### 30 Agustus

Tiga pasangan bakal calon perseorangan bupati dan wakil bupati masing-masing, Agus Kosy dan Timotius Peyon, Yoram Yogobi dan Laurensius L. Lani, Abner Wetipo dan Agipa P Walli, mengajukan keberatannya ke Panwas Jayawijaya karena menduga bahwa ada kecurangan dalam pleno KPUD Jayawijaya dalam penetapan calon bupati dan wakil bupati. Dalam sebuah pertemuan mediasi yang difasilitasi Panswas Jayawijaya dan dihadiri pihak KPUD serta para pasangan calon dimaksud, mereka mengungkapkan bahwa hasil keputusan pleno verifikasi KPUD tidak terbuka karena hasilnya tidak diumumkan ke publik, gugatan itu, pihak KPUD yang diwakili Alexander Mauri dan Cosmos Kosay yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan bahwa hasil verifikasi sudah sesuai aturan. Menurut Alex Mauri, bahwa intinya ketiga bakal calon ini gugur karena *softcopy* berkas bakal calon menunjukkan ketidaksesuaian dengan *hardcopy* berkas tersebut. Di mana untuk kasus pasangan Y Yogobi dan L Lani digugurkan karena saat menggunakan program *sitarli* untuk membaca *softcopy* berkasnya, ternyata hasil dukungan yang diperoleh hanya 5 persen, berbeda dengan yang ada pada *hardcopy*. Sementara itu, pasangan Wetipo-Wali ditemukan dukungan yang dimasukkan tidak ada tanda tangannya. Namun penjelasan KPUD tidak bisa diterima tiga pasangan bakal calon karena mereka merasa memiliki bukti dengan dibawanya *hardcopy* berkas masing-masing. Selain itu, mereka menyalahkan petugas Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemilihan Daerah. Dua lembaga kepanjangan tangan dari KPUD ini dinilai tidak bekerja optimal karena tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang calon perseorangan, juga sengaja menahan berkas para pasangan yang seharusnya diserahkan ke KPUD.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono mengatakan rekening pribadi pejabat tidak boleh digabung dengan rekening pengelolaan keuangan daerah, sebab pejabat akan mengambil bunga bank yang tumbuh. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dengan bunga bank untuk pejabat.

Kontras Papua menyelenggarakan dialog yang berlangsung selama dua hari di Hotel Muspagco, Jayapura. Selain untuk membahas masalah pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya Papua, penyelenggaraan acara ini juga merupakan bentuk peringatan hari orang hilang sedunia. Forum dialog yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Tanah Papua ini mendesak Pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai ukuran keseriusan pemerintah mengintegrasikan diri dalam orde keadilan Internasional dan dalam menghentikan impunitas. "Ratifikasi statuta merupakan mekanisme sistem keadilan internasional menjadi satu kebutuhan untuk menghentikan impunitas bagi berbagai kejahatan internasional yang serius yang tidak tuntas serta mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari," kata Ketua Kontras Papua, Harry Maturbongs. Menurutnya, desakan forum ini juga terkait dengan fakta pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang dinilai tidak membawa perubahan bagi penghormatan, kemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM di Tanah Papua. Meski pun pada pasal 45 UU tersebut memberikan peluang bagi penegakan HAM dengan pembentukan Komnas HAM Perwakilan Papua, Pengadilan HAM, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), namun hingga saat ini tidak diimplementasikan.

### 1 September

Ketua Pokja Pendaftaran Caleg KPU Provinsi Papua, Drs. S. A. Hasjim Sangadji mengatakan pihaknya belum memberikan pernyataan tentang adanya ijazah palsu dalam proses verifikasi Caleg. "Kami bersama tim dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua baru saja selesai melakukan penelitian terhadap ijazah-ijazah para bakal Caleg. Hasil penelitian ternyata ada kopian ijazah yang tidak memiliki tanggal. Dan ada ijazah

yang tidak memiliki nomor. Karena itu kami akan minta ijazah asli dan menyerahkan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua untuk dicek”, kata Hasjim. KPU Provinsi Papua juga akan mengembalikan berkas Caleg yang belum lengkap ke masing-masing Parpol pada tanggal 3 dan 4 September, dan diberikan waktu 7 hari untuk melengkapi berkas para Caleg, termasuk diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan nomor urut Caleg.

Bupati Kabupaten Yahukimo, Ones Pahabol, SE, MM mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Yahukimo supaya berhati-hati dalam mengikuti Partai Politik atau menjadi Caleg karena bertentangan dengan aturan kepegawaian. “PNS yang berpolitik harus berhati-hati karena dalam peraturan tidak diperbolehkan berpolitik. Kalau mau menjadi Caleg harus mengundurkan diri dari PNS, dan belum tentu lolos menjadi anggota legislatif. Karena itu harus dipikirkan secara mendalam”, tegas Bupati Pahabol.

Berkaitan dengan masa puasa yang sedang dijalani oleh umat muslim, Bupati Kabupaten Yahukimo, Ones Pahabol, SE, MM mengatakan guna menciptakan kerukunan dan keharmonisan umat beragama maka setiap orang dituntut untuk saling menghargai. “Saling menghargai antarumat beragama dan toleransi yang telah dibangun selama ini harus senantiasa dijaga. Puasa harus menjadi momentum untuk koreksi diri dengan meninggalkan hal-hal yang buruk dan berubah ke arah yang lebih baik”, kata Ones Pahabol.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Maiyasyah Johan mengatakan, izin Presiden untuk kepentingan pemeriksaan terhadap para kepala daerah, baik Gubernur, Walikota/Bupati maupun anggota DPR-RI/DPRD yang diduga terlibat korupsi terganjal birokrasi di kesekretariatan negara. Bahkan ada dugaan bahwa ada oknum-oknum yang bisa memainkan peranan di sekretariat negara sehingga berkas untuk pengajuan izin Presiden itu tidak sampai kepada Presiden.

## **2 September**

Pernyataan Ketua Pokja Pendaftaran Caleg KPU Provinsi Papua, Drs. S. A. Hasjim Sangadji yang mengatakan bahwa dalam verifikasi Caleg DPRP pihaknya menemukan adanya indikasi ijazah palsu mendapat tanggapan dari beberapa Pimpinan Partai Politik di Papua. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK), dr. John Manangsang mengatakan apabila ada yang menggunakan ijazah palsu sebaiknya segera mengundurkan diri. “Jika menggunakan ijazah palsu sebaiknya mengundurkan diri saja, itu lebih terhormat, sebab ijazah merupakan formalitas yang legal”, kata John. Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua, Elpius Hugi mengatakan sebaiknya KPU membuktikan dengan cara memanggil yang bersangkutan dan menanyakannya secara pribadi atau menanyakan ke Pimpinan Parpol yang bersangkutan. Sementara itu, Ketua Pokja Pendaftaran Caleg KPU Provinsi Papua, Drs. S. A. Hasjim Sangadji mengatakan apabila ijazah asli tidak ada maka KPU dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran akan melakukan klarifikasi ke lembaga yang mengeluarkan ijazah itu untuk memastikan keasliannya. Dan apabila diketahui ijazah itu benar-benar palsu maka yang bersangkutan langsung dicoret dari daftar bakal Caleg.

Kepala Badan Perbatasan Daerah Provinsi Papua, Berty Fernandes mengatakan bahwa rencana pemulangan (Repatriasi) 708 warga negara Indonesia asal Papua yang saat ini tinggal di Papua New Guinea (PNG), kini hanya tinggal menunggu waktu dan keputusan dari pemerintah pusat kapan mereka dipulangkan. Dikatakan bahwa program nasional ini sudah ditentukan tempat-tempat yang akan menjadi tujuan para repatriasi menurut

jumlahnya, yakni Kabupaten Jayapura 451 orang; Biak 8 orang; Kabupaten Sorong 9 orang; Jayawijaya 13 orang; puncak jaya 9 orang; Merauke 32 orang; Tolikara 4 orang; Keerom 31 orang; Boven Digoel 108 orang; dan Kabupaten Mimika 49 orang.

Setelah melalui penyaringan dan seleksi yang sangat ketat akhirnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Papua mengumumkan 17 nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk ditetapkan KPU Pusat, sebagai peserta dalam pemilihan umum (Pemilu), 9 April 2009. Tujuh belas calon DPD RI Dapil Provinsi Papua dimaksud yakni: Ny. Anie Numberi/Betawi 4.989 suara; Drs. Paulus Sumino 3.129 suara; Ny. Frederika Yatipai/Ibo 3.036 suara; Ny. Helina Murib 2.792 suara; Tonny Tesar 2.555 suara; Markus Zonggonau 2.240 suara; Sitor Simbolon 2.323 suara; Pdt. Elion Numberi 2.305 suara; Alberth M. Pugu 2.435 suara; Drs. Billy Yamlean 2.019 suara; Syahbud Ngabalin 2.014 suara; Drs. YTL Pailitin 3.129 suara; Hasbi Suaib 2.133 suara; Drs. Tery Antoh Asmuruf 2.366 suara; Zainal Abidin Bay 2.309 suara; Ny. Sofia Monim 2.107 suara; Hendrik Korwa 2.079 suara.

### **3 September**

"Setelah kita melakukan verifikasi terhadap 1.283 bakal caleg dari 38 parpol, kita menemukan 30 PNS dan 4 orang anggota MRP itu, setelah dilakukan verifikasi terhadap 1.283 bakal caleg dari 38 Parpol." Demikian disampaikan anggota KPU Pokja pencalonan anggota DPRP dan Divisi Teknis Pemilu, Drs. S.A Hasjim Sangadji dalam pertemuan dengan berbagai pengurus parpol di ruang rapat KPU Provinsi Papua.

Ketua MRP, Agus Alue Alua menilai bahwa anggota MRP yang terlibat dalam pencalonan legislatif tidak perlu menyertakan surat pengunduran diri sebagai syarat pendaftarannya, kecuali jika anggota tersebut telah dinyatakan terpilih sesuai pengumuman hasil pemilihan umum. Karena MRP merupakan institusi yang sama kedudukannya dengan DPR hanya berbeda dalam lingkup tugas, namun kedua lembaga tersebut berbeda dari PNS maupun TNI/Polri yang tidak boleh berpolitik karena menguasai aset negara. "MRP tidak menguasai aset negara, kedudukannya sama dengan DPR hanya saja tugas yang berbeda. Untuk itu kami putuskan untuk calon legislatif dari MRP dan DPD syaratnya sama dengan DPD, tidak disertai dengan surat pengunduran diri karena posisinya sama, hanya beda kamar".

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengembalikan seluruh berkas administrasi kepada masing-masing caleg dan parpol karena belum seratus persen memenuhi persyaratan yang diajukan KPU.

Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH menegaskan, program repatriasi orang Papua dengan jumlah peserta 192 kepala keluarga (KK) atau 708 jiwa dari Papua New Guinea ke Provinsi Papua harus mengikuti kebijakan yang ditempuh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain para repatriasi tidak diperlakukan secara istimewa agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara sesama orang Papua. Hal itu disampaikan Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (Bikda) Provinsi Papua, Fred Manufandu, SH.

### **4 September**

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam pertemuan dengan para pemimpin Gereja-Gereja Kristen di Papua mengatakan saat ini di Papua terdapat dua persoalan besar dan krusial yang membunuh jati diri dan kehidupan rakyat Papua yaitu korupsi di kalangan birokrasi dan penyebaran HIV/AIDS.

Menyikapi pelaksanaan Otsus Papua yang sudah berjalan 7 tahun, tetapi tidak membawa perubahan bagi Orang Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melakukan dengar pendapat terkait UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua di Ruang Kerja Komisi A DPRD. Hadir dalam acara ini antara lain, Ketua DPRD, Drs. John Ibo, MM, Wakil Ketua Komisi A, Yance Kayame, SH, Wakil Ketua Komisi A, Ramses Wali, SH, Anggota Komisi A, Miriam Ambolon, Ketua Komisi E, Zakarias Yopo, Ketua Komisi F, Ir. Weynand Watory, Wakil Ketua MRP, Dra. Hana Hikoyaby dan anggota MRP lainnya. Pada kesempatan ini terungkap bahwa semakin banyak uang di Papua bukan mensejahterakan masyarakat asli Papua. Justru melahirkan jurang pemisah di antara sesama Orang Asli Papua. Padahal Otsus ada karena jeritan, rintihan, air mata dan tetesan darah Orang Asli Papua yang hidup di kampung-kampung terpencil. Ketua MRP Dra. Hana Hikoyaby mengatakan saat ini Gubernur, Ketua DPRD, Ketua MRP dan pejabat-pejabat lain adalah Orang Asli Papua, namun kurang memperhatikan Orang Asli Papua, sehingga uang yang begitu besar hanya dinikmati oleh orang tertentu saja, dan masyarakat yang hidup di kampung-kampung tetap sengsara. Sementara itu, Ketua DPRD, Drs. John Ibo, MM mengatakan ke depan pertemuan seperti ini harus tetap dilakukan dengan menghadirkan Gubernur. "Ke depan pertemuan ini perlu ditindak lanjuti. Sebab lewat pertemuan seperti ini akan terungkap berbagai permasalahan yang perlu dicari solusinya demi kesejahteraan masyarakat Papua", tegas John Ibo.

### 10 September

Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayawijaya untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Jayawijaya 2008 dinilai oleh Ketua DPRD Jayawijaya, Yance Ferry Kogoya sebagai tindakan yang terlalu terburu-buru karena mantan Plt. Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom sampai saat ini belum menyampaikan LKPJ 5 tahunan kepada rakyat melalui DPRD Jayawijaya dalam sidang paripurna. "Kami menilai KPUD terburu-buru melakukan rapat pleno pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dari parpol maupun perseorangan/independen", tegas Yance Kogoya.

John Wempi Wetipo/John Richard Banua melakukan syukuran bersama massa pendukung dan pimpinan Parpol yang mengusung mereka setelah dinyatakan lolos verifikasi dan dalam pencabutan nomor urut peserta Pilkada mendapat nomor urut 4. "Selaku kandidat kami berdua menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pimpinan Partai dan seluruh lapisan masyarakat yang mendukung kami dalam Pilkada Jayawijaya 2008-2013", tegas John Wetipo didampingi John Banua.

Tim dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang terdiri atas Drs. Hasjim Sangadji, Selfiana Sangenafa, SH, Drs. Irianto Jacobus dan Sadrak Nawipa, S. Sos melakukan uji kelayakan terhadap 10 orang calon anggota KPUD Biak Numfor. Ke-10 orang yang mengikuti uji kelayakan itu adalah

1. Dicky Iwanggin
2. Frans Y.S Rumaropen, SE
3. Kasim Abdul Hamid, SH
4. Diana D. Simbiak, S.Sos
5. Zacharias Koewa, SE
6. Pdt. John F.B Pah, S.Th
7. Millian P. Tiblola, S.Pi
8. Alexander M. Sapulete, SE
9. Sergius Wabiser
10. Paulus Ughude, SE

Direktur Eksekutif *Institute for Civil Strengthening (ICS)* Papua, Budi Setyanto, SH mengatakan langkah Polda Papua untuk melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua sudah tepat. "Jika terbukti melakukan korupsi maka harus diproses sesuai hukum, jika tidak maka polisi harus melepaskan secara hukum".

### **15 September**

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* dan Imparsial melakukan penelitian penyimpangan keuangan daerah Kabupaten Merauke. Wakil Koordinator ICW, Danang Widoyoko mengatakan dalam penelitian pihaknya menemukan beberapa indikasi korupsi, pemborosan dan perbuatan melanggar hukum. Hal-hal yang dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan Bupati Merauke Drs. John G. Gebze antara lain:

1. Pembelian Pesawat Boeing 737-300 (KLI & AOBA), dan operasionalnya bekerja sama dengan PT Merpati Nusantara Airlines dengan nilai investasi Rp 75,51 miliar.
2. Gaji Bupati Merauke pada 2008 mencapai Rp 11 miliar. Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Honor ekstra Kepala daerah pada 2008 yang diadministrasikan sebesar Rp 926 juta. Pada 2006 yang lalu honor ini mencapai Rp 2,10 miliar.
4. Setiap tahun ada pengadaan mobil untuk Bupati dan Wakil Bupati.
5. Di bidang Pendidikan dan Kesehatan dana sebagian besar berada di Dinas bukan Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah.

Menanggapi hasil temuan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dan Imparsial Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan akan menurunkan tim untuk melakukan audit terhadap Pemerintah Kabupaten Merauke, terutama berkaitan dengan pembelian pesawat Boeing 737-300.

### **16 September**

Hasil temuan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengenai dugaan korupsi di Kabupaten Merauke ditantang oleh Bupati Merauke, Drs. John Gluba Gebze. Gebze mengatakan ICW sebaiknya jangan hanya berbicara tetapi harus datang melihat kondisi nyata dan menunjukkan bukti. "Jangan seperti Tikus! Diam-diam gigit dan lari sembunyi". "Kami ini dilahirkan bukan untuk menjadi koruptor tetapi menjadi pengubah masyarakat menuju kesejahteraan. Di saat BBM naik dan anak sekolah pun tidak mampu maka kami memberikan sepeda kepada anak-anak".

### **17 September**

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama 4,5 jam sebagai saksi atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Yapen Waropen, Soleman Daud Betawi yang menyelewengkan dana APBD 2005-2006 senilai Rp 8,8 miliar. "Saya datang ke sini sebagai saksi kasus Yapen Waropen, sekaligus membantu kerja KPK", kata Suebu.

Menanggapi hasil temuan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang mengatakan 57% anggaran kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, drg. Josef Rinta M. Kes mengatakan bukan 57% melainkan 90% dana dikelola oleh Dinas Kesehatan tetapi semua diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan yaitu pembelian obat-obatan untuk masyarakat, pengadaan kendaraan roda dua, pengadaan peralatan medis, pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pelatihan bagi tenaga kesehatan.

Kapolda Papua, Irjen Polisi Drs. Bagus Ekodanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berani mengambil langkah tegas sehingga tidak terjadi konflik dalam Pemilu. "Memang gara-gara tidak lolos Caleg atau adanya dualisme kepemimpinan dalam satu partai politik berpotensi terjadinya konflik, karena itu KPU harus berani mengambil langkah. Kalau terjadi keributan Polisi akan mengambil langkah, tetapi sebaiknya keributan tidak perlu terjadi", tegas Kapolda Papua, Bagus Ekodanto.

### **18 September**

Ratusan Mama-Mama Pedagang Asli Papua (MPAP) yang selama ini berjualan di Depan Toko Galael, Jalan Irian, Ampera, Depan Bank Papua, dan Depan Toko Matahari bersama puluhan mahasiswa dari Unit DEHALING Universitas Cenderawasih (Uncen) melakukan demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). MPAP yang selama ini didampingi oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura menuntut Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua segera membangun pasar yang layak untuk mereka di Kota Tengah Jayapura. Wakil Ketua III DPRP, Paskalis Kossy yang menemui Mama-Mama berjanji bahwa pihaknya akan berjuang memasukkan pembangunan pasar untuk Mama-Mama dalam APBD Provinsi Papua 2009.<sup>2</sup>

### **19 September**

Kapolda Papua Irjen Pol Drs. FX. Bagus Ekodanto membantah tuduhan yang mengatakan Polda Papua lambat dan tidak serius menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau anggota dewan di Papua. Berkaitan dengan penangkapan terhadap Bupati Yapen Waropen, Drs. Daud Soleman Betawi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda mengatakan hal ini berkaitan dengan kewenangan di mana KPK dapat langsung menangkap dan memeriksa tanpa menunggu surat izin Presiden atau Mendagri sementara Kejaksaan dan kepolisian harus melalui prosedur perizinan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komaruddin Watubun, SH mengatakan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura harus duduk bersama-sama membicarakan dan mencari solusi untuk Mama-Mama Pedagang Asli Papua (MPAP) yang meminta dibangun pasar yang layak untuk mereka di tengah Kota Jayapura. "Keberadaan mama-mama pedagang asli Papua ini memang sangat memprihatinkan karena itu sudah saatnya mereka mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan. Mereka harus mendapatkan prioritas melalui dana Otsus sebab Otsus itu untuk orang asli Papua", tegas Watubun.

Menanggapi upaya Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memperjuangkan 11 kursi bagi orang asli Papua, Ketua Komisi A DPRP yang membidangi Otsus, Ramses Wally mengatakan perjuangan itu untuk mengakomodir kepentingan sendiri guna maju dalam Caleg Pemilu 2009. Hal ini diperkuat dengan kebijakan Pimpinan MRP yang mengeluarkan keputusan yang mengizinkan anggota MRP maju sebagai Caleg. "Majunya anggota MRP menjadi Caleg merupakan alasan memperjuangkan 11 kursi", kata Ramses Wally.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jayapura, Drs. Hendrikus Bertus Bleskadit, M.Si mengatakan setelah diplenokan maka pada 26 September nanti pihaknya akan mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) Kota Jayapura.

### **23 September**

Guna menindaklanjuti hasil temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) perihal dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kabupaten Merauke Drs. Johannes Gluba Gebze, Pemerintah Provinsi Papua telah menurunkan Bawasda Papua, BPKP Perwakilan Papua

<sup>2</sup> [www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

dan BPKP Papua untuk melakukan penyelidikan penyimpangan dana yang dilakukan oleh Bupati Merauke. Tim ini akan berada di Merauke selama tiga puluh hari. Menanggapi hal ini, John G. Gebze mengatakan pihaknya menerima kehadiran tim investigasi, tetapi harus tetap mengedepankan praduga tak bersalah. "Jangan sampai ada rekayasa dalam investigasi ini. Kalau memang ada ketidakberesan, mengapa lembaga berwenang tidak segera menindaklanjutinya?", tegas Gebze.

### **25 September**

Wakil Ketua II DPRD, Paskalis Kossay mengatakan, sebanyak 24 Rancangan Perdas/Perdasus yang diajukan Pemerintah, hanya 10 yang siap disahkan menjadi produk hukum dan 1 Raperdasus dipending karena masih harus dikaji lagi.

Ke-10 Perdas/Perdasus itu antara lain:

1. Raperdasus pelaksanaan tugas dan wewenang MRP.
2. Raperdasus pelaksanaan hak dan kewajiban MRP.
3. Raperdasus kedudukan dan protokoler pimpinan dan anggota MRP.
4. Raperdasus penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
5. Raperdasus pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
6. Raperdasus Jasa Ketatausahaan.
7. Raperdasus pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
8. Raperdasus Jasa Konstruksi.
9. Raperdasus tata kerja RSUD Jayapura.
10. Raperdasus pelayanan kesehatan.

Raperdasus yang masih ditunda pembahasannya yaitu Raperdasus masyarakat hukum adat dan pemanfaatan sumber daya alam.

Bupati Yahukimo, Ones Pahabol menyangsikan dan meragukan data pemilih Provinsi Papua yang disampaikan Ketua KPU Provinsi Papua, Banny Sweny, S.Sos yakni 1,6 juta. "Kami sangat menyangsikan data yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua, karena banyak penduduk kami orang Pegunungan Tengah Papua umumnya belum terdata menjadi pemilih", kata Pahabol.

Bupati Kabupaten Merauke, Drs. John Gluba Gebze mengatakan Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional akan membangun 7 Universitas Negeri baru di Indonesia, salah satunya di Merauke. Universitas ini diharapkan menjadi komunitas orang-orang miskin terutama rakyat kecil yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke luar daerah. "Kami berterimakasih kepada Pemerintah Pusat yang sudah bisa menanggapi harapan masyarakat terutama orang miskin yang selalu bergelut antara kepala dan perut".

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Nikolas Jigibalom/Ribka Haluk melakukan kampanye di Distrik Kurulu. Di hadapan masa pendukung, Jigibalom/Ribka mengatakan apabila terpilih pihaknya akan menciptakan suasana aman dan stabil guna mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagai andalan dunia. Pihaknya bertekad memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, pasangan ini juga berjanji akan mengembangkan empat sektor utama yaitu infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan yang akan dikembangkan secara simultan dan berkelanjutan.

### **26 September**

Koordinator *Papua Corruption Watch (PWC)*, Rifa'i Darus, SH meminta aparat penegak hukum segera mengusut penggunaan dana penyusunan Perdas/Perdasus sebesar Rp 22 miliar. "PWC mendesak aparat penegak hukum pro aktif melakukan penyelidikan atas penggunaan dana Rp 22 miliar. Kapolda dan Kajati harus menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktek korupsi di Papua ini. PWC juga meminta BPK melakukan

audit investigasi dan audit kerja panitia Legislasi", tegas Darus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua melaksanakan Pleno Terbuka Penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pemilu 2009 di Kantor KPU Provinsi Papua. Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny, S.Sos mengatakan pada mulanya pihaknya menerima 1.302 berkas calon, kemudian dikembalikan pada 10 September menjadi 1.195 orang dan dilakukan verifikasi lagi hingga menjadi DCS sisa 1.112 orang. Ia juga menambahkan masyarakat dapat memberikan masukan terhadap para DCS ini agar dapat dilakukan verifikasi faktual. "Yang perlu diberikan ke KPU ialah terkait latar belakang pendidikan DCS, status keanggotaan apakah PNS, TNI, Polri karena ada yang menyamar sebagai pegawai swasta padahal PNS", tegas Benny.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupten Merauke menetapkan 572 Daftar Caleg Sementara (DCS) dari 35 Parpol yang mendaftarkan Calegnya di KPUD Merauke.

Pemerintah Kota Jayapura memberikan bantuan hibah sebesar Rp 500 juta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jayapura. "Tadi saya tandatangani bantuan hibah Pemerintah Kota Jayapura untuk KPUD Kota Jayapura", kata Sekretaris KPUD Kota Jayapura, Izak Hindom, SH.

Pernyataan Bupati Yahukimo, Ones Pahabol yang mengatakan jumlah pemilih di Kabupaten Yahukimo mengalami kenaikan dari tahun 2004 130.000 pemilih dan Pemilu 2009 342.000 pemilih mendapat tanggapan serius dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Benny Sweny, S. Sos. Ia mengatakan lonjakan yang mencapai 100% ini adalah irasional karena itu pihaknya akan memanggil KPU Yahukimo untuk membentuk tim pemutakhiran data. "Tim ini akan melibatkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk mencocokkan data base dengan situasi di lapangan", tegas Benny.

Pengawas Pemilu (Panwas) Pilkada Tingkat Distrik melakukan demonstrasi ke Kantor Panwas Pilkada Kabupaten Biak Numfor menuntut agar honor mereka segera dibayar. Para pendemo diterima oleh Sekretaris Panwas Kabupaten Biak Numfor, Anjas yang menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran karena kekurangan dana. "Pemda telah mengucurkan dana Rp 600 juta tetapi itu pas-pasan untuk membiayai gaji dan operasional Panwas tingkat Kabupaten", kata Anjas.

### **27 September**

Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Jayawijaya nomor urut 3, Budiman Kogoya/Yustus Medlama dalam Kampanye di Distrik Wollo Jayawijaya mengatakan pihaknya akan melakukan perubahan bagi masyarakat Jayawijaya guna mencapai masyarakat Jayawijaya yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin. Selain itu, di hadapan ribuan massa pendukungnya Budiman/Yustus berjanji akan mengembangkan pendidikan dan sarana prasarana kesehatan serta peningkatan gizi di seluruh pelosok Kampung dan Distrik.

### **28 September**

Keluarga Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos mendapat teror dari orang tidak dikenal. Benny mengatakan sejak Simulasi Pemilu di Keerom seminggu yang lalu pihaknya selalu mendapat teror dari sekelompok orang. Mereka berteriak-teriak dari pagar depan rumah, sehingga keluarga saya menjadi takut. Ada yang berteriak, Ketua KPU goblok, tidak bisa menyelesaikan masalah Pilkada Jayawijaya. "Yang berhak mengeluarkan keputusan tentang Pilkada Jayawijaya adalah KPU Jayawijaya. KPU Provinsi Papua sifatnya hanya membimbing bukan membuat keputusan", kata Benny.

Kejaksaan Agung akan menangani korupsi minimal Rp 10 miliar, Kejaksaan Tinggi menangani kasus korupsi di bawah Rp 10 miliar dan Kejaksaan Negeri di bawah Rp 2,5 miliar. Menanggapi kebijakan Kejaksaan Agung ini, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengatakan pihaknya akan terus mengawasi setiap perkara korupsi yang akan ditangani Kejaksaan Agung karena Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap setiap perkara korupsi yang ditangani penegak hukum lain.

### **29 September**

Pk. 14.00 WP di Lapangan Sinapuk Wamena pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor urut 3, Budiman Kogoya/ Yustus Medlama melakukan kampanye. Kampanye ini dihadiri sekitar 40 ribu massa. Di hadapan massa, Budiman/Yustus mengatakan pihaknya tidak mau mengubur janji tetapi akan melakukan perubahan apabila terpilih untuk memimpin Jayawijaya 5 tahun ke depan. "Kami bertekad menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Kami akan melakukan perubahan dan menjadikan masyarakat Jayawijaya hidup sejahtera dan lebih baik", tegas Budiman. Turut memberikan kampanye, Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Drs. John Ibo, MM dan Bupati Tolikara, Jhon Tabo, MBA.

Ketua Komisi Pemilihan Daerah (KPU) Kabupaten Biak Numfor menggelar pertemuan dengan lima pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Biak Numfor. Pada pertemuan ini ditetapkan bahwa waktu kampanye akan dilakukan sebagai berikut: 5-11 Oktober kampanye melalui media massa, tanggal 13 Oktober pawai keliling, 14-24 Oktober dilakukan kampanye terbuka dan 25 Oktober dilakukan debat kandidat di TVMP atau Lensa Papua. "Kami akan segera pleno penetapan agenda kampanye ini. Kami harap semua kandidat, dan massa pendukung melakukan kampanye sesuai aturan yang berlaku", kata Ketua KPU Biak Numfor, Decky Iwanggin.

## **4. Penanganan Konflik**

### **7 Juli**

Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKKUB) Kabupaten Keerom dikukuhkan oleh Bupati Keerom, Drs. Celcius Watae. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Keerom, Christa Simatupang mengatakan mereka yang telah dikukuhkan akan mengikuti pembekalan mengenai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 Tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah.

### **4 Agustus**

Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) melakukan demonstrasi di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua. Massa yang datang dengan beraneka poster dan spanduk yang antara lain bertuliskan "Pancasila Yes, Syariah No", Gubernur, DPRD beri kami Perdasi dan Perdasus sebagai jaminan janji imanmu bagi Tuhan dan rakyat Papua", dan lain-lain. Ada pun massa yang datang membawa sejumlah tuntutan antara lain:

- I. Menolak UU dan Hukum Syariah dalam bentuk dan nama apa pun.
- II. Segera ditutup dan menghentikan operasional bank-bank yang bernuansa syariah.
- III. Menolak pendirian dan pengembangan Islamic Center.
- IV. Mendesak segera dibentuknya komisi hukum dan *Ad Hoc*.
  1. Membuat Perdasi dan Perdasus tentang keagamaan seperti:
    - Meniadakan sarana-sarana ibadah di tempat kerja milik Pemerintah.
    - Memperketat syarat-syarat membangun rumah-rumah.

2. Membuat Perdasi dan Perdasus yang mengatur secara tegas bahwa Hari Minggu sebagai hari ibadah bagi umat Kristen.
  3. Membuat Perdasi dan Perdasus yang menegaskan Manokwari sebagai Kota Injil.
  4. Membuat Perdasi dan Perdasus yang mengatur hak-hak politik orang asli Papua di lembaga legislatif khususnya 11 kursi di DPRD.
  5. Membuat Perdasus yang mengatur perangkat dan kepegawaian yang memprioritaskan Orang Papua.
  6. Pembuatan Perdasi dan Perdasus tentang pembatasan migrasi penduduk.
  7. Pembuatan Perdasi dan Perdasus tentang pencabutan izin minuman keras dan tempat-tempat prostitusi.
  8. Pembuatan Perdasi dan Perdasus tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
  9. Pembuatan Perdasi dan Perdasus tentang pengaturan hak ulayat masyarakat adat Papua.
  10. Pembuatan Perdasi dan Perdasus tentang pengaturan pendidikan khusus yang sesuai budaya Papua.
  11. Pembuatan Perdasi dan Perdasus tentang sistem asuransi kesehatan yang bermutu.
  12. Pembuatan Perdasi dan Perdasus tentang HIV/AIDS.
- V. Menuntut kepada Gubernur supaya segera mengganti Dr. Achmad Hatari, M.Si sebagai Badan Keuangan Provinsi Papua karena tidak berkomitmen melaksanakan Perdasus No. 1/2006 tentang pembagian dana penerimaan daerah Provinsi Papua yang telah ditetapkan DPRD.
- VI. Bila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Gubernur, DPRD dan MRP tidak membuat ke-12 Perdasus/Perdasi maka kami akan melakukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena melalaikan UU No. 21 Tahun 2001 Pasal 75.

Massa hendak menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH tetapi tidak berhasil karena Gubernur sedang berada di luar negeri. Massa selanjutnya diterima oleh Sekda Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM dan massa pun berorasi. Setelah itu, massa beralih ke Kantor DPRD dengan melakukan *long march*. Tiba di Kantor DPRD massa membacakan tuntutan dan menyerahkannya kepada Ketua Komisi A DPRD, Yance Kayame, SH didampingi Wakil Ketua Komisi A, Ramses Wally dan sebagian anggota komisi.

#### **1 September**

Sekelompok warga melakukan pengrusakan Kantor Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura di Distrik Heram, Kota Jayapura. Dalam aksi ini warga tidak hanya merusak Kantor tetapi juga melakukan penganiayaan terhadap Anike Mirino selaku Pjs. Ketua GMKI Cabang Jayapura dan Mesak Ulo, Sekretaris Fungsional Bidang Organisasi.

#### **4 September**

OKP Kristen di Tanah Papua yang terdiri atas GMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Generasi Muda Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (FGM-GKI) menyatakan bahwa pelaku pengrusakan Kantor GMKI Cabang Jayapura dan penganiayaan terhadap dua Pengurus GMKI harus ditindak tegas dan diproses secara hukum. Sekretaris FGM-GKI, Roberth Wanggai mengatakan Polisi harus memproses kasus ini. "Akibat kasus ini, dua kader kami mengalami trauma dan penderitaan fisik akibat luka memar di siku kanan dan lutut kanan bengkok", tegas Roberth Wanggai.

Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, SH mengatakan selama periode Januari-Juni pihaknya menangani 52 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus-kasus tersebut yang diproses hingga ke Kejaksaan Negeri Jayapura sebanyak 13 kasus, 21 kasus diselesaikan secara kekeluargaan, 12 kasus dalam proses. Sedangkan selama Juli-Agustus pihaknya menangani 7 kasus, 2 diantaranya kasus perlindungan anak. Kapolresta mengatakan berbagai kasus KDRT terjadi dipicu oleh miras. "Hampir semua kasus KDRT yang dilaporkan dan kami tangani saat ini dipicu oleh miras".

Para guru di SD Inpres Perumnas IV Padang Bulan melakukan mogok mengajar. Hal ini dilakukan karena sehari sebelumnya seorang warga dalam kondisi dipengaruhi miras (mabuk) masuk ke sekolah dan merusak gedung sekolah. Kepala SD Inpres Perumnas IV, Ny. Tarek Tompodung membantah jika para guru melakukan mogok.

### **5 September**

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, Dra. WW Kambuaya, MM mengatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya pengrusakan gedung sekolah SD Inpres Perumnas IV. "Kami sudah mendapat laporan dari pihak sekolah. Semoga aparat segera mengambil tindakan supaya proses belajar mengajar dapat berjalan kembali".

### **30 Oktober**

Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura, Betty A. Puy, SE mengatakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan yang berdampak pada kekerasan psikis, seksual, ekonomi dan budaya. Ia menambahkan pihaknya terus berjuang mensosialisasikan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. "Kami ingin semua elemen sadar bahwa kekerasan selain berdampak buruk, pelakunya juga dapat dijerat hukum", kata Betty Puy.

## **5. Aspirasi M(erdeka)**

### **2 Juli**

Aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan makam Theys Hiyo Eluay, sekitar pk. 06. 00 WP mendapat tanggapan dari Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. FX. Bagus Ekodanto, SH. Kapolda mengatakan "Tidak ada masalah, itu hanya ulah satu dua orang saja. Secara keseluruhan tidak ada masalah. Ini hanya dilakukan oleh orang tertentu dan perorangan saja. Saya anggap hal yang biasa".

### **3 Juli**

Aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan makam Theys Hiyo Eluay mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut. Ia melihat hal itu sebagai isu murahan yang dilakukan pihak tertentu untuk menjebak orang Papua. "Jika memang ada pengibaran Bendera Bintang Kejora, mana barang buktinya? Mengapa polisi tidak mengusut pelakunya yang hingga kini masih simpang siur".

### **19 Juli**

Pk. 04.32 sekelompok masyarakat sipil berjumlah yang dipimpin Simon Tutuop dan Tadeus Weripang mengibarkan Bendera Bintang Kejora di halaman depan Gedung Pepera Jl. R.A Kartini Fakfak Papua Barat. Dalam insiden ini sebanyak 49 orang ditangkap dan digiring ke Mapolres Fakfak untuk dimintai keterangan. "Para pelaku pengibaran Bendera Bintang Kejora telah ditahan di Mapolres Fakfak dan akan diancam dengan pasal makar seperti kasus tarian cakalele dengan membawa bendera RMS di hadapan Presiden beberapa waktu lalu di Ambon", kata Kapolres Fakfak AKBP Drs. Wachyono.

## **20 Juli**

Kepolisian Resort (Polres) Fakfak telah menetapkan 9 orang tersangka pengibaran Bendera Bintang Kejora di halaman depan Gedung Pepera, Fakfak. Adapun ke-9 orang tersebut adalah

1. Simon Tutuop, 58 tahun, mantan Tapol yang peristiwa pendeklarasian. Kemerdekaan Papua Barat, 3 Juli 1982 di Jayapura.
2. Tadeus Weripang, 52 tahun, mantan Tapol yang peristiwa pendeklarasian. Kemerdekaan Papua Barat, 3 Juli 1982 di Jayapura.
3. Viktor Tutuop, 42 tahun.
4. Tomas Nimbitkendik, 19 tahun.
5. Benediktus Tutuop, 35 tahun.
6. Teles Piahar, 20 tahun.
7. Walter Warpopor, 60 tahun.
8. Daniel Nimbitkendik, 19 tahun.
9. Simon Hindom, 50 tahun.

## **11 Agustus**

Orang Papua memahami bahwa Bendera Bintang Kejora sudah diterima oleh Pemerintah Indonesia, sebab persoalan Bendera Bintang Kejora sudah diperjuangkan oleh DPRP dengan membuat draft Rancangan Perdasus tentang Simbol-Symbol Papua yang pernah diajukan MRP kepada DPRP. Selain itu, DPRP juga telah melakukan pembicaraan dengan Menko Polhukam, Mendagri dan Kepala BIN sejak 2007 tentang Bendera Bintang Kejora. "Sangat disayangkan hanya karena Bendera Bintang Kejora rakyat jadi korban", kata Ketua Komisi F DPRP, Ir. Weynand Watori.

## **6. Pemekaran vs Otsus**

### **5 Juli**

Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yani mengatakan banyak masyarakat belum memahami Otsus Papua, padahal Otsus sudah berjalan 7 tahun. "Saya menanyakan kepada mama-mama yang berjualan di depan Galael Jayapura tentang apa itu Otsus, ternyata dijawab Otsus adalah program bagi uang yang dilakukan oleh Ketua RT/RW".

### **19 Juli**

Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) Dra. Hana Hikoyabi mengatakan amandemen Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004 tentang MRP sudah selesai dan hanya menunggu tandatangan presiden tetapi hingga saat ini belum jelas. "Hal paling krusial yang diamandemen itu adalah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004 itu adalah menyangkut keuangan yakni pembayaran gaji pimpinan dan anggota mengacu pada SK Gubernur dianggap menyalahi PP tersebut. Selama proses amandemen gaji pimpinan dan anggota MRP dibayar sesuai PP 54/2004".

### **28 Juli**

Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Tanah Papua (KMMPTP) yang hendak melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dihadang dan dibubarkan oleh aparat kepolisian dari satuan Polsekta Abepura. "Setelah kami melakukan negosiasi mereka langsung membubarkan diri karena surat yang disampaikan untuk melakukan demo belum sesuai prosedur yakni 3x24 jam sebelum kegiatan ini dilakukan harus sudah disampaikan kepada pihak kepolisian", kata Kapolsekta Abepura AKP Domingus Rumaropen. Sementara itu koordinator demo Buktar Tabuni mengatakan setelah membenahi surat izin kepada pihak kepolisian demo akan digelar lagi untuk menuntut dilaksanakan dialog publik terkait Otsus selama tujuh tahun berjalan yang terkesan gagal termasuk semakin banyaknya pelanggaran HAM di era Otsus.

Kerukunan Alumni Gajah Madah (Kagama) akan terus mendorong pemekaran Distrik di Provinsi Papua menuju Papua Baru. Ketua Senat Akademik Universitas Gajah Madah Prof. Sutaryo mengatakan perlu pengembangan awal yang dimulai dari Distrik. "Kelembagaan Distrik harus terus kita dorong menjadi salah satu titik pemekaran untuk seluruh daerah di Papua", kata Sutaryo. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH melalui Sekda Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto mengatakan keberadaan Kagama di Provinsi Papua sangat diperlukan untuk menambah nuansa baru dalam upaya membangun dan memajukan Papua menuju Papua Baru. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun Papua menuju Papua yang damai dan sejahtera yaitu melanjutkan program turun kampung dalam bentuk konkret seperti pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik, pemberdayaan ekonomi rakyat dan infrastruktur kampung yang memadai.

#### **29 Juli**

*Papua Indigenous Action (PIA)* menuntut Gubernur Provinsi Papua untuk segera melakukan dialog tentang Otsus. Ketua PIA, Sem Samuel Yaru mengatakan, "Orang Papua telah kehilangan hak dan martabat karena tidak ada kepastian tentang Otsus. Kami mendesak Gubernur dan pihak MRP supaya segera melakukan dialog tentang Otsus".

#### **6 Agustus**

Ketua DPRD, Drs. John Ibo, MM mengatakan Raperdas tentang Kependudukan akan direvisi. Hal yang paling krusial dan dianggap radikal ialah bunyi salah satu pasal yang mengatakan pembatasan penduduk dari Provinsi di luar Papua masuk ke Papua. "Aturan model begini tentu sangat tidak adil, ini dapat memicu konflik dalam masyarakat karena kita ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut UUD 1945 dan Dasar Negara Pancasila".

#### **14 Agustus**

Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si mengatakan Otsus sudah berjalan tujuh tahun dan dana yang dikucurkan sudah mencapai Rp 18 triliun namun masyarakat belum merasakan manfaatnya karena terjadi pembiasan dalam penggunaan dana Otsus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan rencana definitif yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua.

#### **25 Agustus**

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan pelaksanaan Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sarana infrastruktur mampu meredam isu separatistis di Papua. "Kesejahteraan masyarakat. Itulah strategi meredam isu separatistis".

#### **26 September**

Masyarakat Adat Grime Nawa melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) I untuk menyiapkan pemekaran Grime Nawa menjadi Kabupaten definitif. Ketua Tim Kerja Pemekaran Kabupaten Grime Nawa, Arnold Udam, SH mengatakan masyarakat telah siap menyambut pemekaran Grime Nawa menjadi Kabupaten. "Dalam Musda ini kita rancang *grand design*nya sehingga setelah resmi menjadi Kabupaten, Pjs melaksanakan apa yang dihasilkan dalam Musda ini", kata Arnold Udam.

## B. Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

### 1. Hak Atas Pendidikan

#### 3 Juli

Komisi E DPR Papua memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw untuk mengklarifikasi pungutan biaya pendaftaran siswa baru yang sangat tinggi. Sekretaris Komisi E, Dra. Hulda Wanggober mengatakan kami mempertanyakan apakah dana APBD tidak cukup sehingga sekolah harus menarik biaya yang besar, bahkan ada sekolah yang memungut hingga Rp 1,4 juta per siswa. "Mulai Juli ini tidak ada lagi SMA/SMK yang memungut biaya lebih dari Rp 500.000", tegas Hulda Wanggober. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw mengatakan, "Kami telah menulis surat kepada semua Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran di Kabupaten dan Kota, tetapi kurang ditanggapi, maka kami akan melakukan investigasi".

#### 4 Juli

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Keerom, Christoforus Sakir, BA mengingatkan setiap Kepala Sekolah (Kepsek) untuk tidak memungut biaya pendaftaran siswa baru. "Saya dengan tegas melarang pihak sekolah untuk melakukan pungutan biaya masuk sekolah. Kalau ada sekolah yang melakukan pungutan, segera laporkan ke saya, supaya saya tindak mereka".

#### 7 Juli

Wakil Ketua II MRP, Dra. Hana Hikoyabi mengatakan merosotnya mutu pendidikan dan banyaknya persoalan pendidikan di Papua disebabkan belum adanya aturan yang mengakomodir tentang pendidikan di Papua. "Belum adanya Perdasi/Perdasus tentang pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab lemahnya kualitas pendidikan di Papua. Karena itu, pokok-pokok pikiran yang pernah disampaikan MRP ke lembaga legislatif maupun eksekutif antara lain memuat regulasi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan porsi anggaran pendidikan harus mendapat perhatian serius agar pengembangan SDM di Papua dapat terlaksana".

Menyikapi maraknya pungutan liar (Pungli) yang terjadi saat Penerimaan Siswa Baru (PSB), Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan pungutan PSB dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Fakta yang terjadi ialah murid diminta untuk membayar uang seragam baru, pembangunan sekolah dan gedung, padahal sekolah sudah menerima dana BOS. Ia menambahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Pendidikan dan PP tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Khusus PP tentang Dana Pendidikan, Pemerintah telah menetapkan garis besar alokasi dana bagi siswa mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sementara itu, Koordinator Monitoring dan Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan mengatakan pihaknya juga akan melaporkan pungutan liar dalam Pendaftaran Siswa Baru ke KPK. "Walau jumlahnya kecil, tapi merugikan kepentingan masyarakat dan hal ini merupakan tindakan pemerasan Dinas Pendidikan terhadap sekolah".

#### 8 Juli

Sesuai instruksi Pemerintah untuk membebaskan biaya pendaftaran siswa baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta, maka setiap sekolah diingatkan lagi untuk tidak memungut biaya pendaftaran. Wakil Ketua Komisi E DPRP, Dra. Hulda Wanggober mengatakan sesuai instruksi pemerintah pendidikan dasar wajib belajar (Wajar) 9 tahun harus gratis, baik di sekolah negeri maupun

swasta. "Pemerintah sudah mengalokasikan dana khusus untuk wajib belajar 9 tahun baik melalui APBN, dana BOS, dan bantuan dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jika pendidikan wajib belajar 9 tahun masih ada pungutan, maka itu sama dengan pelanggaran HAM", tegas Hulda Wanggober.

Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua telah melarang pungutan Penerimaan Siswa Baru (PSB) namun hal ini masih terjadi. Di SD Inpres Abeale I Sentani, Kabupaten Jayapura menetapkan biaya masuk bagi murid baru sebesar Rp 1.000.000. Kepala SD Inpres Abeale I Sentani, Yosefince Suebu, A. Ma.Pd mengatakan pungutan sebesar Rp 1.000.000, itu sudah ada kesepakatan dengan orang tua murid. "Biaya tersebut dipakai untuk pengadaan pakaian seragam putih-merah, seragam kotak-kotak 1 stel plus dasi, seragam batik 1 stel, seragam olah raga plus celana, dasi, topi bordir, kaos kaki Abeale 1 pasang, buku tulis Abeale, dan uang partisipasi sebesar Rp 538.000. Ia menambahkan biaya itu juga dipakai untuk mendukung program sekolah yang sarana pembelajarannya menggunakan televisi dan VCD player, dan mengganti meja dan kursi yang telah rusak", kata Yosefince. Menanggapi kebijakan sekolah ini Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayapura, Karel Maniagasi S.Pd mengatakan hal itu masih dalam batas yang wajar karena telah disetujui oleh orang tua dan demi peningkatan mutu pendidikan. "Saya setuju dengan Kepala Sekolah karena sudah sesuai dengan prosedur", kata Karel.

### 9 Juli

Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo meluncurkan *Global Development Learning Network (GDLN)*. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh antarkampus. Mahasiswa dapat melakukan telewicara dengan berbagai disiplin pembelajaran dari seluruh anggota GDLN yang berjumlah 220 Universitas di Asia Tenggara, guna menjembatani kesenjangan mutu antarperguruan tinggi di Indonesia. Ia menambahkan GDLN merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) demi pertukaran informasi dan pengetahuan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua Drs. James Modouw sangat kecewa dan menyesalkan sikap Kepala SMP Negeri 3 Kurima, Distrik Apalapsili, Kabupaten Jayawijaya yang meluluskan siswa yang tidak mengikuti Ujian Nasional (UN). "Saya akan tindaklanjuti laporan ini karena merupakan pembunuhan karakter dan proses pembodohan kepada masyarakat khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung bangsa dan negara", tegas Modouw.

### 15 Juli

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Ketua Komisi E DPRD, Drs. Zakarias Yoppo mempertanyakan penyaluran dana beasiswa edukatif program S3 bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pendidik karena selama ini penerimanya bukan saja tenaga pendidik, tetapi ada juga dari sejumlah Dinas (lembaga pemerintah).

### 16 Juli

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kota Jayapura, Dra. W.W Kambuaya, MM mengingatkan setiap sekolah supaya tidak melakukan kekerasan selama Masa Orientasi Sekolah (MOS). "Sesuai petunjuk MOS merupakan pengenalan lingkungan sekolah yang bersifat edukatif, pengenalan fasilitas sekolah dan etika moral kepada siswa baru, tanpa kekerasan".

### 24 Juli

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan peningkatan kualitas guru tetap menjadi perhatian Pemerintah. "Selain masalah kekurangan guru, hal yang paling

mendasar dan perlu mendapat perhatian serius adalah peningkatan kualitas guru", tegas Gubernur Suebu.

### **25 Juli**

Pada saat melakukan Turun Kampung (Turkam) di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH berjanji untuk memecat guru-guru yang malas mengajar dan mau tinggal di Kota.

### **26 Juli**

Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof. Dr. Berth Kambuaya M.BA, mengatakan semua dosen harus fokus pada tugas utamanya, yakni mengajar agar proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai ketentuan sebab hingga saat ini masih ada dosen yang memiliki banyak kesibukan di luar kampus.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak transparan, bahkan di beberapa sekolah terjadi penyelewengan dana BOS. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. Paul Indubri mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan ke sekolah apakah laporan masyarakat ini benar atau tidak.

Ketua Komisi A DPRD, Paulus Sumino meminta Pemerintah Provinsi Papua tidak hanya mengalokasikan dana pendidikan untuk pendidikan SD, SMP dan SLTA, tetapi harus juga memperhatikan pendidikan jangka pendek melalui pelatihan dan kursus-kursus untuk meningkatkan keahlian masyarakat.

Guru kontrak di Kabupaten Keerom, tepatnya di Distrik Arso Timur mogok mengajar karena gaji mereka tidak dibayar. "Sudah tiga bulan guru kontrak yang mengajar di Arso Timur tidak pernah mengajar lagi karena gaji mereka tidak dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Keerom", kata tokoh masyarakat Distrik Arso Timur, Willem Itungkir.

### **12 Agustus**

Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Surya Dharma mengatakan kualitas Kepala Sekolah melalui rekrutmen atas campur tangan Bupati /Walikota sangat rendah. Hal ini juga terjadi di Provinsi Papua sebagaimana yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw, MM. Ia mengatakan Kepala Sekolah merupakan orang pertama di lingkungan sekolah untuk menentukan baik buruknya proses belajar mengajar di sekolah maka sekolah harus memiliki Kepala Sekolah yang benar-benar berkualitas dan tahu akan tugas-tugasnya. "Penunjukan Kepala Sekolah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.13 Tahun 2007 yakni memperhatikan kepribadian, sosial, manajerial, supervisi dan kewirausahaan. Ke depan apabila penunjukan yang saat ini menjadi kewenangan Kabupaten/Kota tidak memperhatikan kualitas maka kami dari Provinsi akan mengambil alih hal ini".

### **13 Agustus**

Wakil Ketua II DPRD Paskalis Kosay S.Pd meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena dinilai belum mampu membantu sekolah-sekolah dalam melaksanakan program pendidikan secara maksimal. "Dana BOS belum efektif dalam membantu meringankan biaya operasional sekolah. Bahkan ada tambahan dana dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Otsus, tetapi sekolah selalu mengalami kekurangan dana. Hal ini sangat aneh, maka pemerintah harus segera melakukan evaluasi".

### **14 Agustus**

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memilih SMP Negeri I Waris, Kabupaten Keerom sebagai salah satu wilayah pengembangan sekolah perbatasan. "Terkait program tersebut Depdiknas untuk triwulan pertama mengucurkan dana sebesar Rp 400-500 juta. Dana ini untuk pengembangan fasilitas asrama", kata sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, Zakarias Zoo.

### **19 Agustus**

Pemerintah Pusat memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Wali Kota Jayapura MR Kambu mengatakan setiap sekolah yang telah menerima dana BOS tidak boleh memungut biaya pada orang tua peserta didik. "Tiap sekolah tidak boleh memungut biaya apa pun dari para orang tua, kalau mau memungut harus ada pembicaraan dengan orang tua. Apabila ada sekolah yang berani memungut tanpa pembicaraan dengan orang tua murid akan diberikan sanksi tegas", kata Kambu.

### **29 Agustus**

Rektor Universitas Cenderawasih, Prof. DR. Bert Kambuaya, MBA mengeluhkan kenyataan minimnya sarana-prasarana perkuliahan, seperti laboratorium serta jumlah ruang kuliah yang tidak cukup untuk menampung seluruh mahasiswa di Universitas Cenderawasih (Uncen) yang berjumlah 13 ribu orang. Dijelaskan bahwa saat ini FKIP sedang melaksanakan program belajar jarak jauh bagi mahasiswa PGSD di Merauke, Mappi, Boven Digoel, Keerom, Sarmi, Bintuni dan Yahukimo yang seluruhnya berjumlah 1000 orang. Selain itu, ada 5 program studi yang bergabung dengan FMIPA dan terpaksa menggunakan Stadion Mahacendra Uncen, ada juga 500 mahasiswa S1 PGSD yang masih menggunakan bekas ruang-ruang SPG yang sudah mulai rapuh. Dengan dana dari Pemda Papua (yang sumbernya dari dana Otsus) sebesar Rp 1,5 miliar pada tahun 2008 dan Rp 1 miliar pada tahun 2007, dinilainya sangat minim untuk mendukung pengembangan pendidikan. Terkait dengan sejumlah kebutuhan itu, di hadapan ratusan mahasiswa dan Gubernur Bas Sueba yang baru saja selesai menyampaikan kuliah umum, rektor mengatakan bahwa dirinya sangat mengharapkan dukungan dari Gubernur menyangkut persoalan yang dialami.

### **1 September**

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendidikan, namun biaya pendidikan masih sangat mahal karena selama ini penggunaan anggaran pendidikan kurang tepat. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dibandingkan pendidikan di luar negeri pendidikan di Indonesia masih tergolong murah, namun jika dibandingkan pendapatan per kapita memang agak mahal. "Apakah semua sekolah dapat melaksanakan anggaran dengan baik? Semua kebutuhan harus dihitung dengan cermat dan dipenuhi sesuai prioritas, tidak asal dibelanjakan".

### **3 September**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada anggaran pendidikan karena memiliki patokan dana 20% yang merupakan anggaran terbesar dalam departemen dan memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam penyimpangan dan kebocoran anggaran. Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan pihaknya meminta izin untuk ikut serta mengawasi penyusunan anggaran sekaligus menyamakan persepsi. Hal ini dikatakan Antasari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi IX DPR RI yang membahas sistem mekanisme teknis dalam keikutsertaan KPK mengawasi penyusunan APBN.

### **15 September**

Kepala Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya, Mesius Enumbi, SIP mengatakan empat Sekolah Dasar (SD) di Yamo tidak memiliki guru yang mengajar. Semua guru yang ditugaskan di masing-masing sekolah tidak mengajar sehingga anak-anak terlantar. "Kami sudah memiliki empat SD di Distrik Yamo tetapi sampai sekarang hanya 1 guru saja yang mengajar di masing-masing sekolah. Banyak guru yang telah lama meninggalkan tempat tugasnya dan berkeliaran di Mulia. Kami Pemerintah Distrik telah memberi surat teguran tetapi tidak dihiraukan", tegas Mesius Enumbi.

### **16 September**

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw, MMT mengatakan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran mulai menerapkan kebijakan Pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Papua. Secara khusus di Kabupaten pemekaran SMK lebih diutamakan daripada SMA. "Ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Papua untuk lebih memprioritaskan SMK dibandingkan SMA agar dapat menghadirkan tenaga-tenaga yang handal dan siap kerja".

### **26 September**

Untuk meningkatkan mutu dosen maka Pemerintah Provinsi Papua melalui Subdin Bina Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua bekerja sama dengan *Indonesian Australia Language Foundation (IALF)* dan Universitas Cenderawasih Jayapura melaksanakan seleksi bagi 17 orang dosen untuk menerima beasiswa pendidikan S2 dan S3 di luar negeri. "Ini merupakan wujud nyata pengembangan SDM bagi Orang Papua khususnya di bidang pendidikan, khususnya menyiapkan generasi pembangun masa depan Papua yang lebih baik", kata Kepala Subdin Bina Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs. Lazarus Hara, MM.

Pemerintah Provinsi Papua dalam tahun 2008 memberikan bantuan beasiswa bagi para dosen di Papua dan Papua Barat. Bantuan diberikan kepada para dosen yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Kepala Subdin Bina Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs. Lazarus Hara, MM mengatakan beasiswa yang diberikan yaitu 60 orang untuk program magister yang terdiri dari 25 orang dari Uncen, 20 dari Unipa dan 15 dari PTS. Untuk program doktor, Uncen 10 orang, Unipa 6 orang, PTS 4 orang.

## **2. Hak Atas Kesehatan**

### **1 Juli**

Guna meningkatkan ketrampilan tenaga medis Dinas Kesehatan Provinsi Papua akan melatih 1800 bidan secara bertahap. Kasubdin Bina Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinkes Provinsi Papua Marthen Sagrim, SKM, M. Kes mengatakan tenaga bidan yang ada harus memiliki kompetensi dan ketrampilan agar bisa bersaing dengan bidan yang datang dari luar Papua. Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan yang telah dilakukan, di mana hingga saat ini sudah 442 bidan yang sudah dilatih dalam melayani masyarakat.

### **8 Juli**

Pesta Minuman Keras (Miras) kembali menelan korban jiwa. Di Sentani, Kabupaten Jayapura, seorang tewas dan dua orang dalam kondisi kritis setelah mengkonsumsi miras jenis Wisky Robinson sebanyak 8 botol. Korban yang tewas adalah Dominggus Wenda, sedangkan yang kritis adalah Yepius Wenda dan Kalikayok Kogoya.

### **21 Juli**

Guna mengantisipasi penyebaran virus HIV-AIDS di Kabupaten Yahukimo maka Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo bekerja sama dengan Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) Papua melakukan kajian terhadap perilaku dan kerentanan masyarakat terhadap HIV-AIDS di Kabupaten Yahukimo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, Sam-Arisoy, mengatakan kajian ini dilakukan karena mobilitas masyarakat keluar dan masuk Yahukimo sangat tinggi. "Yahukimo berada di antara dua daerah yang paling tinggi prevalensi HIV/AIDS yakni Timika dan Merauke. Kondisi ini makin memprihatinkan dengan tingginya mobilitas penduduk", kata Sam Arisoy.

### **22 Juli**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, dr. Jenggo Suwarko mengatakan Pemerintah akan memberikan insentif kepada para petugas kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, kepulauan atau pulau-pulau terluar. "Besarnya insentif Rp 1-1,5 juta. Ini merupakan bentuk keadilan bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil".

### **24 Juli**

Direktur Yayasan Gratia, dr. John Manangsang mengatakan pada awal 2009 pihaknya akan membangun Rumah Sakit bertaraf Internasional di Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur. "Rencana ini telah kami rancang cukup lama dan akhirnya ada investor yang berani bekerja sama dalam pembangunan rumah sakit ini", kata dr. John. Rencananya Rumah Sakit ini akan dibangun di atas lahan seluas 5 ha dan diperkirakan menelan dana Rp 7 miliar.

### **28 Juli**

Sebanyak 172 warga Dogyai meninggal dunia akibat muntaber dan kolera. Korban meninggal terdiri atas anak-anak, remaja, pemuda hingga orang dewasa. Hal ini dikemukakan oleh Pdt. Dr. Beny Giay dari KPKC Sinode Kingmi Papua yang didampingi oleh Br. J. Budi Hernawan ofm dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Fr. Saul Wanimbo dari SKP Keuskupan Timika dan Pastor Dr. Neles Tebay Pr dari STFT "Fajar Timur" Abepura dalam konferensi pers tentang wabah muntaber dan kolera di Kantor Keuskupan Jayapura. Mereka mendesak pihak Pemerintah Provinsi Papua, DPRD dan MRP segera mengambil langkah dengan mengirimkan tim medis kelapangan untuk melakukan pengobatan bagi warga yang menderita wabah tersebut. "Selanjutnya pemerintah harus menyelidiki penyebab wabah muntaber dan kolera dan segera mengumumkan kepada masyarakat, agar menghentikan berbagai kecemasan yang sedang berkembang", kata Benny Giay. Sementara itu, Pastor Dr. Neles Tebay Pr mengatakan Pemerintah tidak boleh menyederhanakan persoalan ini sebab orang mati secara terus-menerus. "Pemerintah harus mampu membuktikan secara ilmiah tentang penyebab wabah ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berpraduga bahwa wabah ini disebarkan oleh oknum tertentu sehingga membuat masyarakat marah dan melakukan penyerangan terhadap oknum yang dicurigai itu".<sup>3</sup>

### **29 Juli**

Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah kolera dan diare yang telah menelan 172 orang di Lembah Kamuu, Kabupaten Dogiyai mendapat perhatian serius dari DPRD. Wakil Ketua DPRD, Komaruddin Watubun mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu untuk menanyakan sudah sejauh mana penanganan kasus ini. "Kami akan terus mendorong dan berteriak supaya Pemerintah memperhatikan persoalan ini, sebab bukan soal 172 orang yang mati tetapi soal nyawa manusia. Nyawa tidak bisa dibeli bahkan satu nyawa manusia pun tetap ada nilainya", tegas Komaruddin.

3 [www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

### **30 Juli**

Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua perihal KLB wabah kolera dan diare yang telah menelan 172 jiwa di Kabupaten Dogiyai sebagaimana yang dilaporkan Gereja-Gereja di Papua.

Menyikapi KLB wabah kolera dan diare yang menelan ratusan jiwa di Lembah Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Sukaswara mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah menurunkan tim yakni 6 dokter, 4 dokter dari Departemen Kesehatan dan 2 orang dokter dari Provinsi. Pihaknya juga telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, dr. Bagus Sukaswara juga mengatakan wabah kolera dan diare ini disebabkan oleh makanan dan minuman, tetapi untuk lebih jelasnya masih menunggu hasil survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan.

Sebanyak 20 orang meninggal akibat minuman keras (miras). Mereka yang meninggal itu terdiri atas 2 orang warga Sentani dan 18 warga Thailand yang berada di Merauke. Sementara itu, sebanyak 71 orang lainnya dinyatakan selamat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke.

### **31 Juli**

Pesta miras kini melibatkan anak-anak. Di Sentani tepatnya di Jembatan Kali Belo, Sentani sepasang suami istri memaksa anak mereka yang bernama Roy dan keponakan mereka Ino (5 tahun) untuk sama-sama melakukan pesta miras akibatnya kedua anak ini mabuk berat.

### **1 Agustus**

Tiga orang Anak Buah Kapal (ABK) Thailand di Merauke masuk RSUD Merauke dalam kondisi kritis karena mengkonsumsi miras. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, dr. Petrus Tjia mengatakan di antara tiga orang itu satu bernama Moo mengalami buta total. Sementara itu 21 orang korban minuman keras (miras) yang dirawat di RSUD Merauke sehari sebelumnya kini tinggal 13 orang.

### **7 Agustus**

Pdt. Dr. Beny Giay dari KPKC Sinode Kingmi Papua mengatakan korban meninggal akibat wabah kolera di Kabupaten Dogiyai bertambah 7 orang sehingga jumlah total korban meninggal sampai saat ini sebanyak 239 orang. "Ada 7 korban yang baru saja meninggal di Distrik Komopa, Kabupaten Paniai. Saya baru dari sana dua hari lalu dan wabah telah menyebar ke Kabupaten Paniai".

### **9 Agustus**

Menanggapi berbagai pemberitaan media mengenai kasus wabah kolera dan muntaber di Kabupaten Dogiyai, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Sukaswara mengeluarkan data resmi yang mengatakan sampai saat ini jumlah penderita kolera sebanyak 547 dan yang meninggal 98 orang. "Maksud kami memberikan informasi ini supaya masyarakat tidak bingung, sebab situasi ini bisa saja dipolitisi", tegas Wagub Hesegem.

### **13 Agustus**

Menyikapi maraknya isu formalin pada sejumlah makanan dr. John Manangsang dari Komisi E DPRD mengatakan pihak Balai POM harus menindaklanjuti isu tersebut dengan mengambil sampel makanan dan melakukan pemeriksaan pada sampel dan menganalisisnya. "Balai POM harus menindaklanjuti isu tersebut, sebab mereka memiliki

peran penting dalam memberikan ketenangan dan jaminan kepada masyarakat”.

Pesta miras kembali memakan korban jiwa. Di Koya Barat dua orang meninggal setelah mengkonsumsi miras masing-masing Paite Pawa (32) dan Junus Jikwa (26).

#### **14 Agustus**

Rumah Sakit Jiwa Abepura menerima 500 Calon Legislatif (Caleg) yang menjalani test mental dan kepribadian. Menurut dokter jiwa RSJ Abepura, dr. Samo Adi, Sp.Kj dari 500 orang yang mengikuti tes 150 orang mengalami gangguan jiwa walau kadarnya tidak terlalu berat; dan 3 orang yang mengalami gangguan serius yang akan mengganggu tugas dan pekerjaan sebagai seorang Caleg.

#### **23 Agustus**

Wabah Kolera yang menelan ratusan nyawa manusia di Kabupaten Dogiyai sejak Apri-Juli mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengatakan wabah sudah teratasi. Ia menambahkan pula perlu perbaikan sanitasi lingkungan secara serius.

#### **24 Agustus**

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) mengatakan mengangkat tangan karena gagal menanggulangi persebaran HIV/AIDS di tanah air. Sekretaris KPAN Nafsiah Mboi mengatakan ada satu cara yang sangat efektif tetapi hingga kini belum berjalan optimal yakni pembenahan moral bangsa ini agar menjauhi seks bebas dan tidak malu menggunakan kondom. Data akumulatif Departemen Kesehatan menyebutkan hingga kini pengidap AIDS mencapai 12.686 dihimpun dari 32 Provinsi, dan 15 Kabupaten/Kota. Kasus AIDS terbanyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau.

#### **25 Agustus**

Sekretaris Komisi E DPRD, Yosephina Pigay mengatakan distribusi bahan makanan ke lokasi wabah kolera di Kabupaten Dogiyai mengalami hambatan karena tidak didukung dana. “Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial telah memberikan bantuan berupa sandang, pangan dan papan sudah cukup, tetapi karena masalah ongkos sehingga tidak diantar sampai ke tempat tujuan”.

#### **27 Agustus**

Kepolisian Resort Pegunungan Bintang, hingga saat ini masih kesulitan memberantas peredaran minuman keras (miras) walau sudah sering melakukan razia, karena masyarakat lebih banyak mengkonsumsi miras yang diracik sendiri (oplosan) yang bahan dasarnya dari beberapa tumbuhan seperti pisang, nenas, dan bunga trompet. Kapolres Pegunungan Bintang, Koptol Alfred mengatakan bahwa pihaknya sering melakukan *sweeping* terhadap penumpang di Bandara Oksibil dan bila ditemukan langsung disita. Menurutnya, “tercatat sedikitnya lima kasus kematian yang disebabkan miras oplosan.”

#### **4 September**

Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena sangat memprihatinkan karena banyak sarana seperti kamar mandi, kamar cuci, air tidak mengalir dan WC rusak parah. Selain itu, banyak tempat tidur pasien tidak memiliki sprei, bantal dan ada pula tempat tidur yang hampir patah. “Akibat kondisi seperti ini memaksa para pasien pergi ke rumah keluarga atau kenalan di sekitar RSUD untuk buang air dan mandi”, kata Daniel Yikwa, salah seorang pasien.

### 10 September

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Paskalis Kosay mengatakan wabah kolera dan muntaber yang terjadi di Kabupaten Dogiyai telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Keputusan ini diambil setelah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Asisten II Sekda Provinsi Papua, Drs. HP. Kaisiepo, MM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Sukašwara dan sejumlah instansi lain di Ruang Panitia Anggaran DPRD. "Jadi mulai sekarang kasus wabah kolera dan muntaber di Kabupaten Dogiyai kita tetapkan sebagai KLB dan karena kondisi mereka hingga sekarang masih sangat mengkhawatirkan maka kami minta Gubernur secepatnya mengambil langkah proaktif", kata Paskalis Kossay.

### 15 September

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Drs. John Ibo, MM dalam pidato pengantar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua Tahun 2007 mengatakan pihaknya telah melaporkan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Kolera di Kabupaten Dogiyai kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah. "Kedua pejabat negara menyatakan ikut prihatin dengan KLB di Kabupaten Dogiyai, sehingga pemerintah harus serius memberikan bantuan tenaga medis, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan lainnya bagi para korban", kata John Ibo.

### 25 September

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, drg. Jhon Lopulalan mengatakan Puskesmas Waris, Kabupaten Keerom dinaikkan statusnya menjadi Puskesmas Rawat Inap. "Keberadaan Puskesmas Rawat Inap di Waris ini supaya dapat melayani pasien rawat inap sehingga tidak perlu mencari tempat rujukan yang lebih jauh, kecuali yang tidak tertolong di sini dirujuk ke RSUD Jayapura. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memperpendek tingkat pelayanan di bidang kesehatan" kata Jhon Lopulalan.

## 3. Kesejahteraan Umum

### 4 Juli

Menanggapi sorotan Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe mengenai keberadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang hingga kini belum tuntas, Koordinator *Papua Corruption Watch (PWC)*, Rifai Darus, SH mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek PLTMH yang ditangani Dinas Pertambangan dan Energi Papua. "Tim investigasi akan ke Puncak Jaya Senin besok. Kita akan melihat secara langsung bagaimana realisasi pembangunan PLTMH yang nilai proyeknya mencapai Rp 11 miliar lebih dan bersumber dari dana Otsus 2007".

### 15 Agustus

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di depan anggota DPR-RI berjanji menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2009. Khusus untuk gaji guru minimal Rp 2 juta per bulan.

### 28 Agustus

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang senilai Rp 98,947 miliar untuk pembangunan daerah perbatasan RI-PNG. Bantuan diserahkan melalui Asisten Menko Kesra, Mayjen TNI (Purn) Sudiyatma kepada Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Drs. Wellington Wenda. Kepala Dinas PU Pegunungan Bintang, Ir. Darwin Siagian mengatakan dana yang diberikan akan dipakai untuk membangun perumahan masyarakat di Distrik Batom 100

unit, Tarub 50 Unit, Walapkubun 50 unit, dan Yumakot 50 unit. Bupati Pegunungan Bintang Drs. Wellington Wenda menegaskan bahwa bantuan Presiden itu akan digunakan untuk pembangunan sekolah dasar, puskesmas, perumahan penduduk, jalan, listrik, air bersih dan fasilitas umum lainnya". Sementara itu, dana yang sama diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lani Jaya sebesar Rp 40 miliar. Pelaksana Teknis Proyek di Kabupaten Lani Jaya, Ir. Bismarck Tambunan mengatakan dana itu akan digunakan untuk membangun rumah sehat tipe 36 100 unit, gedung Sekolah Dasar, Kantor dan Rumah Guru 1 unit, Pustu 2 unit, Demlot 1 unit, sarana air bersih 1 unit, pembangkit listrik mikrohidro 2 unit dan pembangunan jalan Pirime-Balingga.

### **30 Agustus**

Sebanyak 580 penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) di Kelurahan Kelapa Lima Merauke dibatalkan karena ada yang sudah pindah rumah dan ada yang berada dalam kategori kelas menengah (memiliki motor dan rumah permanen). "Yang membatalkan ini bukan kami, tetapi berdasarkan kriteria peraturan", tegas Kepala Kelurahan Kelapa Lima Merauke, Daniel Kepok.

### **29 September**

Menanggapi demo Mama-Mama Pedagang Asli Papua di Kantor DPRP yang menuntut pembangunan pasar di tengah Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura, Drs. MR. Kambu mengatakan tidak mungkin membangun pasar di tengah-tengah kota. "Pemerintah Kota tidak memiliki lahan dan dalam Rencana Tata Ruang Kota Jayapura dan di mana saja di Indonesia tidak ada yang namanya pasar tradisional di tengah Kota karena itu untuk memenuhi kebutuhan Mama-Mama kami sedang menyelesaikan pembangunan pasar di Dok IX dan Pasar Hamadi", kata Kambu.

## **4. Pengelolaan Sumber Daya Alam**

### **5 Juli**

Br. Edy Rosariyanto ofm dari Unit Ekopastoral SKP Keuskupan Jayapura yang melakukan penelitian terhadap dampak Perkebunan Kelapa Sawit PT PN II Arso bagi kesejahteraan masyarakat Arso mengatakan kehadiran PT PN II yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Arso, namun hingga saat ini belum dinikmati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan 95% kebun kelapa sawit dikontrakan kepada orang lain. "Berdasarkan data produksi tahun 2006 yang dikeluarkan oleh PT PN II, petani sawit mendapat Rp 1.601. 196 per bulan (pendapatan kotor). Jumlah ini bila dipotong ongkos angkutan Rp 700.000 dan ongkos buruh Rp 400.000, maka pendapatan bersih hanya Rp 501. 169, per bulan. Pendapatan kecil ini belum dihitung dengan waktu dan tenaga yang dipakai untuk merawat kebun sawit", kata Br. Edy. Sementara itu Pastor John Jonga Pr mengatakan sejak awal masyarakat Arso menghendaki supaya kebun kelapa sawit diganti dengan perkebunan kakao. Menanggapi hal ini, Bupati Kabupaten Keerom, Drs. Celcius Watae mengatakan bahwa pihaknya terus berjuang supaya perkebunan kelapa sawit tetap berjalan dan akan memperluas perkebunan kakao. "Dengan kakao masyarakat akan cepat menuai hasil ibu-ibu dan anak-anak juga bisa memanen. Perluasan kebun kakao bagi masyarakat sudah menjadi program kami dan akan terus diupayakan secara bertahap".<sup>4</sup>

Menyikapi maraknya penggalian pasir dan penebangan kayu ilegal di Kabupaten Merauke, Bupati Merauke Drs. Johannes Gluba Gebze mengumpulkan seluruh Muspida untuk membicarakan upaya pencegahannya. Ia menambahkan hal itu terjadi karena ada oknum-oknum yang *memback-up*. "Saya tidak usah menyebutkan oknum-oknum tersebut, karena

---

4 [www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

tidak etis. Ada pengawalan-pengawalan tertentu, harapan saya harus ditertibkan sesuai jalurnya”, tegas Bupati Gebze.

### 23 Juli

Empat dari lima terdakwa kasus *illegal logging* (Mulyadi Bantang, Ansar Dudu, Ahmad Madong dan Yusuf Saleng) membantah tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Wamena yang digelar hari Rabu, 23 Juli 2008. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 2-3 tahun penjara ditambah denda Rp 30 juta. Namun para terdakwa menolak tuntutan JPU dengan alasan tuntutan tersebut berlebihan dan kurang mencermati fakta di persidangan yang sudah mereka miliki seperti adanya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

### 30 Agustus

Berbagai kalangan menilai bahwa harga penjualan LNG Tangguh, Papua sangat merugikan negara, bahkan karena kerugian itu, pengamat perminyakan Kartubi mengusulkan agar pemerintah membatalkan kontraknya. Meski tidak sepekat dengan pembatalan kontrak karena akan mengganggu kinerja perusahaan yang sudah berinvestasi juga konsekwensi terhadap negara, menurut pendapat pengamat perminyakan dari Universitas Indonesia, Dirgo Porbo, penetapan harga harus mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia dan kuncinya, renegotiasi harus dilakukan setiap dua tahun, bukan empat tahun seperti kesepakatan yang berjalan. Perlu diketahui bahwa saat kontrak pertama ditandatangani tahun 2002 harga LNG hanya US\$2,4 per MMBTU, sedangkan pada negosiasi kedua tahun 2006 harganya hanya bisa naik menjadi US\$3,4 per MMBTU, padahal jika formulasi harga dibuat fleksibel mengikuti harga minyak dunia, harga wajar LNG saat ini di pasar internasional mencapai UU\$20 per MMBTU. Menanggapi penilaian soal kontrak yang merugikan tersebut, anggota Komisi VII DPR dari FPDIP Effendi Simbolon menyatakan partainya siap membuktikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa harga jual LNG Tangguh yang disepakati antara Pemerintah RI – masa pemerintahan Megawati – dengan pihak pembeli di Povinsi Fujian, China itu telah melalui prosedur dan pertimbangan yang benar sesuai kondisi pasar serta harga jual LNG internasional saat itu. “Silahkan saja, kami siap berdebat. Kami undang SBY dan JK untuk *hearing* dengan fraksi kami. Kami siap dengan data. Kami main *head to head* saja, “ ujar Simbolon yang justru mencurigai bahwa masalah ini sengaja dipolitisir oleh Jusuf Kala.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, Ir. Melkianus Monim mengatakan bahwa Papua kini menjadi salah satu daerah sasaran para investor untuk menanam investasinya di bidang perkebunan, dan ada 43 investor yang tercatat di seluruh Papua namun 11 di antaranya dinyatakan sudah tidak eksisi lagi. Menurutnya, dari sekian investor itu, terdapat satu perusahaan perkebunan kakao, satu perusahaan perkebunan Jarak Pasar, dan sisanya bergerak pada perkebunan sawit. Terkait soal pengelolaan, satu perusahaan sawit akan menangani mulai dari perkebunan hingga menghasilkan minyak goreng dan bahan lainnya. Selain itu ada pula perkebunan kopi (khusus di kawasan pegunungan) yang sedang diusahakan bekerja sama dengan salah satu perusahaan perkebunan dari Amerika, dan ditargetkan pada Oktober mendatang kopi dari Papua sudah dapat diekspor ke Amerika.

### 1 September

Wali Kota Jayapura Drs M.R Kambu M.Si mengatakan, kelestarian hutan harus tetap terjaga sekali pun masih ada masyarakat yang membangun rumah di tebing-tebing gunung. “Hutan itu punya fungsi ekonomis dan fungsi pelestarian maka kita harus tetap melestarikan hutan tanpa harus melarang masyarakat yang bermukim di hutan atau tebing

untuk mengurangi aktivitasnya". Hal ini dikatakan M. R Kambu sehubungan dengan penghargaan tingkat nasional yang diterimanya, yakni sebagai Walikota Peduli Hutan.

### **5 September**

Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia ke-16, Plt. Sekda Kabupaten Puncak Jaya, Elias Wonda S.Pd mengatakan masyarakat perlu menjaga dan memelihara kelestarian Sumber Daya Alam dengan tidak melakukan pembalakan hutan demi menjaga ketersediaan air serta menghindari bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor.

### **28 September**

Kepala Bapedalda Provinsi Papua, Drs. Wiro Y. Watken mengatakan Teluk Youtefa berada dalam ancaman pencemaran yang sangat serius karena limbah datang dari dua arah yakni Kali Acai dan Siborogony serta sumber sampah utama adalah Pasar Youtefa. Akibat berbagai sampah plastik, dan limbah ini menyebabkan banyak terumbu karang yang mati dan masyarakat kehilangan pekerjaan karena kerang-kerang telah mati. "Sebagian masyarakat Tobati sekarang kehilangan mata pencahariannya karena kerang sudah tidak ada, lalu sekarang mereka mau makan apa lagi?", kata Wiro Watken.

### **29 September**

Pemerintah Provinsi Papua kembali memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk beroperasi di Papua. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya PT Tandan Sawita Papua (TSP) untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Arso Timur, Kabupaten Keerom. Wakil Ketua DPRD Keerom, Herman Yoku mengatakan sebagai langkah awal investasi di Kabupaten Keerom, telah hadir PT TSP yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali Group. Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan Pemkab Keerom dalam pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Arso Timur seluas 26.300 ha dengan pola kemitraan. "Kehadiran PT TSP diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat guna menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat", kata Herman. Ia menambahkan dalam kesepakatan bersama antara Pemkab, Perusahaan dan masyarakat disepakati bahwa a) Penataan dan pembangunan pemukiman masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit; b) Pengembangan sarana dan prasarana umum yang memadai; c) Pembinaan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit; dan d) Memberikan pelatihan bagi karyawan yang akan direkrut oleh perusahaan. Tanah tetap menjadi milik masyarakat adat. Kayu dikelola oleh masyarakat adat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Tim Peneliti Perkebunan Kelapa Sawit dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian SKP Keuskupan Jayapura, Br. Edy Rosariyanto ofm mengatakan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit akan mengakibatkan a) Terjadi deforestasi dan degradasi hutan; b) Pemakaian pupuk pestisida; c) Menghasilkan limbah domestik; d) Penurunan daya dukung lingkungan. Dampaknya ialah meningkatnya bencana alam dan pencemaran tanah, air udara serta berbagai mata pencaharian masyarakat hilang.

### **30 Oktober**

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH melalui Kepala Bapedada Provinsi Papua, Drs. Wiro Y. Watken mengatakan dalam era Otsus Papua menjadi iklim menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Belajar dari masa lalu bahwa investasi telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Oleh karena itu, ke depan instansi Pemerintah terkait harus selektif dalam memberikan izin sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. "Saya minta praktek-praktek pemberian izin tanpa mempertimbangkan lingkungan harus dihentikan karena hanya akan menimbulkan bahaya bagi manusia dan kehidupan di masa mendatang", tegas Bas Suebu melalui Kepala Bapedada, Wiro Watken.

## BAGIAN II

### ANALISIS PERISTIWA

#### Pengantar

Lintasan peristiwa Juli-September ini menggambarkan realitas perkembangan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua. Ada beberapa peristiwa kunci yang menyedot perhatian Orang Asli Papua, pemerintah, bahkan dunia internasional, yakni penembakan Opinus Tabuni pada Perayaan Hari Masyarakat Pribumi Internasional yang diselenggarakan di Lapangan Sinapup Wamena, 9 Agustus oleh Dewan Adat Papua (DAP). Untuk mengungkap peristiwa ini Dewan Adat Papua (DAP) melakukan berbagai aksi, baik melalui diskusi-diskusi publik maupun demonstrasi ke kantor DPRP dan pendekatan ke MRP dan Pemerintah. Pihak Kepolisian, melalui Kapolda Papua, Drs. FX. Bagus Ekodanto dan jajarannya dalam berbagai media menyatakan komitmen untuk mengungkap pelaku penembakan terhadap Opinus, namun hingga detik ini tidak terbukti. Siapa pelaku penembakan tidak diketahui.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007 yang mengatur Lambang Daerah melarang Orang Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora di Tanah Papua. PP No. 77 Tahun 2007 yang memiliki kekuatan tetap menjadi senjata pamungkas untuk menjerat setiap pribadi Orang Papua yang mau mengekspresikan "perasaan" mereka terhadap kinerja Pemerintah Republik Indonesia. Meski pun demikian di belahan Tanah Papua, masyarakat masih mengibarkan Bendera Bintang Kejora sebagai simbol kultur yang mengikat persatuan Orang Papua untuk membangun Papua yang berkeadilan yang melahirkan damai dan suka cita di atas Tanah ini. Dalam tiga bulan saja telah terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Makam Pemimpin Besar Bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay di Sentani, Gedung Pepera Fak-Fak dan Kantor Panel Dewan Adat Papua, Mimika.

Peristiwa lain yang mengguncang Papua ialah terjadinya ledakan bom secara beruntun di areal PT Freeport, Mimika. Siapakah pelaku, tetap menjadi misteri. Aparat kepolisian telah berupaya mengungkap pelaku, tetapi hingga kini masih nihil.

Di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umum dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), masih berjalan di tempat. Banyak siswa terlantar karena guru malas mengajar. Demikian halnya banyak orang meninggal di Kabupaten Dogiyai karena wabah kolera dan muntaber yang tidak segera ditangani pihak-pihak terkait.

#### A. Analisis Hak-Hak Sipil dan Politik

##### 1. Kebebasan Warga

Selama Juli-September kebebasan berekspresi bagi Orang Papua mengalami perubahan yang berarti. Orang Papua berani menyuarakan jeritan hati melalui aksi demonstrasi, lobi-lobi damai dengan Pemerintah dan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI dan pengibaran Bendera Bintang Kejora. Tetapi sangat disayangkan, sikap Orang Papua yang menyadari negerinya sedang berada di ambang kehancuran karena korupsi, pendidikan yang bobrok, HIV-AIDS merajalela dan pengelolaan SDA yang tidak proporsional tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Buntut dari segala daya upaya Orang Papua

untuk memperjuangkan nasib di atas tanah leluhurnya ialah darah dan air mata.

Kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum kembali dilumpuhkan dengan tewasnya Opinus Tabuni, pada 9 Agustus di Lapangan Sinapup Wamena dalam Perayaan Hari Masyarakat Pribumi Internasional. Sebagai Orang Papua yang memiliki ras Melanesia merasa diri pantas merayakan Hari Masyarakat Pribumi Internasional karena Orang Papua merupakan bagian integral dari masyarakat pribumi internasional. Hari yang bersejarah ini tidak memberikan rasa aman dan damai tetapi justru melahirkan duka, darah mengalir di Tanah ini. Sampai kapankah Orang Papua harus dibunuh di atas tanahnya? Menyikapi hal ini Dewan Adat Papua (DAP) melalui berbagai aksi, sikap dan pernyataan menuntut pihak kepolisian segera mengungkap pelaku penembakan terhadap Opinus Tabuni. Aksi massa DAP terjadi pada 17 September di Kantor DPR Papua.<sup>5</sup>

Misteri pembunuhan Opinus Tabuni hingga detik ini tidak terungkap. Kapolda Papua, FX. Bagus Ekodanto, SH mengatakan pihaknya telah berjuang keras untuk mengungkap pelaku, tetapi pernyataan itu tidak terbukti. Pembunuh Opinus Tabuni tidak dapat ditangkap dan diproses secara hukum. Tetapi aneh, para pimpinan Dewan Adat Papua (DAP) yang melaksanakan Perayaan Hari Masyarakat Pribumi di Wamena dipanggil untuk diminta keterangan oleh pihak Polda. Adalah janggal dan sulit dipahami bahwa seorang pembunuh dibiarkan bebas berkeliaran sementara para Tokoh Adat Papua yang berjuang untuk menegakkan keadilan di tanah ini justru dipanggil dan diperiksa oleh Polda Papua. Di manakah letak keadilan?

Lebih aneh lagi ketika Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. FX. Bagus Ekodanto, SH menyatakan sesuai hasil uji balistik ditemukan bahwa proyektil di TKP tidak sesuai dengan proyektil 47 pucuk senjata milik anggota Polisi saat bertugas, mendapat reaksi keras dari Pangdam XVII/Cenderawasih melalui Asistem Kasdam, Letkol Inf. Khairully. Pihak Kodam XVII/Cenderawasih meminta aparat kepolisian menunjukkan bukti akurat, kuat dan sesuai fakta lapangan. Sebagai orang awam muncul pertanyaan, ada apa di balik polemik ini?

Perjuangan menegakkan keadilan di atas Tanah Papua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak jarang perjuangan untuk menarik perhatian Pemerintah Republik Indonesia diekspresikan melalui pengibaran Bendera Bintang Kejora. Setiap kali Orang Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora, pada waktu itu juga mendapat stigma separatis, OPM, dan pengkhianat. Pengibaran Bendera Bintang Kejora selalu dilihat oleh Pemerintah dan aparat keamanan sebagai bentuk ekspresi yang merorong keutuhan NKRI. Oleh karena itu, para pelaku pengibaran bendera harus diadili dan dihukum seberat-beratnya. Pemerintah tidak pernah bertanya dan berefleksi, apa substansi yang mau dicapai oleh Orang Papua dengan melakukan pengibaran bendera? Apa yang melatarbelakangi mereka melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora? Apakah mau merdeka? Kalau Orang Papua mau merdeka, maka mesti diperjelas merdeka dalam arti apa dan bagaimana serta mengapa mereka ingin merdeka?

Adalah tidak bijak apabila hanya memberikan stigma bahwa Orang Papua OPM, separatis, dan pengkhianat. Setiap pribadi pengambil kebijakan di Tanah ini harus berpikir jernih dan utuh serta melihat akar persoalan secara integral dan menyeluruh, sebab masalah lahir karena memang ada soal. Karena itu persoalan tidak dapat diselesaikan dengan persoalan baru, tetapi hanya dapat diatasi dengan nurani yang murni dan bijak.

Hal pertama yang harus dimengerti dan dipahami ialah Orang Papua mengetahui sejarah mereka. Mereka tahu bahwa mereka pernah memiliki simbol, entah lagu maupun lambang

---

5 [www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

kultur yang mempersatukan mereka dari Sorong sampai Merauke. Persoalan yang terjadi saat ini ialah ketika terjadi kemacetan pelayanan terhadap masyarakat maka memori tempo *doe/oe* membangkitkan semangat mereka untuk berjuang menuntut keadilan. Apakah hal ini pernah dipikirkan oleh para pengambil kebijakan di Papua? Orang Papua berteriak merdeka, mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan berbagai aksi lain karena mereka mau menuntut hak-hak mereka untuk diperhatikan. Bumi Papua yang mengandung kekayaan melimpah justru melahirkan penderitaan yang luar biasa bagi Orang Papua. Oleh karena itu, Pemerintah baik di pusat maupun daerah harus mulai membangun budaya malu. Malu terhadap rakyat yang menderita. Malu terhadap rakyat yang setiap hari berteriak merdeka karena mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura terjadi pemukulan terhadap Narapidana politik (Napol), Ferdinand Pakage. Pemukulan dilakukan oleh para petugas LP. Peristiwa ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum profesional dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh negara. Apapun alasannya seorang petugas harus menjadi panutan bagi para Narapida (Napi) yang sedang menjalani masa rehabilitasi perilaku. Para Napi membutuhkan sikap moral untuk mendidik bukan kekerasan, sebab kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan melainkan melahirkan konflik dan kekerasan baru.

## 2. Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan merupakan pokok yang menjadi pergumulan bagi orang Papua. Alasan pertahanan dan keamanan telah melumpuhkan upaya Orang Papua untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Orang Papua selalu dipersempit maknanya sebagai upaya memperjuangkan kemerdekaan. Jika setiap pribadi yang menjadi pemimpin di Tanah ini hidup dalam kecurigaan, sampai kapan Orang Papua akan mengalami kemajuan?

Kecurigaan yang berlebihan dan menuding kelompok tertentu sebagai pengacau bukan "jalan" untuk mempertahankan keamanan dan keutuhan negara dan bangsa. Kecurigaan yang berlebihan justru akan melahirkan *gap* di antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat luas. Ketidakpercayaan merupakan celah yang dapat menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan di tanah ini.

Orang Papua memahami bahwa aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah selalu menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi hal ini masih jauh dari harapan. Kita mengenal semboyan "Polisi Pengayom Masyarakat", tetapi ini hanya semboyan. Fakta menunjukkan bahwa seringkali tindakan aparat kepolisian justru melukai hati masyarakat. Penembakan terhadap seorang warga sipil, Sony Keykera, 26 Agustus di Yahukimo menjadi pertanyaan besar. Demikian halnya dalam tiga bulan ini seorang anggota TNI melakukan penembakan terhadap seorang warga sipil di Kaimana (26 Agustus, di Pasar Baru Kaimana). Sebagai orang awam masyarakat akan mulai menjaga jarak jika kinerja aparat kepolisian dan TNI tidak berpihak kepada masyarakat serta tidak memperhitungkan nilai-nilai kultur masyarakat Papua. Pendekatan kultural merupakan jalan terbaik membangun pertahanan dan keamanan di Papua.

Situasi Papua juga dikejutkan dengan terjadinya ledakan bom secara beruntun di Mimika. Pelaku peledakan hingga saat ini tidak diketahui. Ledakan yang terjadi di sekitar kawasan PT Freeport menunjukkan bahwa situasi di Papua tidak bisa diselesaikan melalui jalur kekuatan militer. Toh, saat ini telah banyak pasukan yang bertugas di Papua, tetapi setiap saat Papua selalu berada dalam ancaman ketidaknyamanan. Apakah kita kekurangan

pasukan pengaman? Ataukah model dan pola pendekatan kita terhadap masyarakat yang harus segera dibenahi? Ataukah ada pihak tertentu yang menginginkan Papua tidak damai sehingga mau menciptakan konflik di Papua? Kita perlu berefleksi dan bertanya mengapa peristiwa demi peristiwa mengguncang stabilitas keamanan di Papua?

Adalah janggal dan mengherankan bahwa lokasi PT Freeport yang dijaga ketat oleh satuan Brimob bisa terjadi ledakan bom berturut-turut. Ada apa di balik ledakan ini?

Ledakan di kawasan PT Freeport mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Polisi Sutanto yang mengatakan bahwa ledakan yang terjadi di Timika berasal dari bom rakitan yang berdaya rendah. Berbagai perhatian baik dari Pemerintah maupun pihak Kepolisian tidak berarti dapat mengungkap pelaku peledakan bom tersebut. Patut dicatat bahwa adalah penting untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku peledakan sehingga masyarakat luas dapat mengetahui peristiwa sebenarnya. Jika aparat terkait tidak mampu mengungkap pelaku maka ada kesan bahwa aparat tidak bekerja dan akan menimbulkan sikap saling curiga, baik di antara warga masyarakat maupun masyarakat dengan pihak keamanan. Apabila hal ini terus dibiarkan maka dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di antara sesama masyarakat dan di antara masyarakat dengan aparat keamanan (Polri-TNI) dan pemerintah.

Pengibaran Bendera Bintang Kejora masih terjadi di Papua. Aparat keamanan selalu bersikap tegas menindak pelaku pengibaran. Misalnya para pengibar Bendera Bintang Kejora di Manokwari, Papua Barat dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Hukuman yang jauh dari keadilan karena seorang yang membentangkan simbol kultur daerahnya dimasukkan ke dalam penjara.

### 3. Penyelenggaraan Pemerintahan

Di bidang penyelenggaraan pemerintahan persoalan Pemilu, Pilkada dan 11 kursi untuk Orang Asli Papua di DPRD menyedot perhatian pihak eksekutif dan legislatif serta lembaga kultural MRP. Pilkada Jayawijaya mendapat sorotan tajam dari kaum intelektual Jayawijaya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI) dan masyarakat Jayawijaya. Mereka menuntut Pilkada Jayawijaya ditunda sampai Plt. Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPKJ). Walaupun telah melakukan perjuangan untuk mengetahui kinerja Nikolas Jigibalom dan mendapatkan data akurat tentang program dan kebijakan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Bupati Jayawijaya, namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayawijaya tetap melakukan proses Pilkada sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD.

Sikap KPU untuk tetap melaksanakan Pilkada meski pun tanpa pertanggung jawaban Plt. Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom menunjukkan bahwa demokrasi belum dialami oleh masyarakat. Masyarakat menghendaki transparansi pertanggung jawaban Bupati tetapi diabaikan oleh pihak penyelenggara Pilkada. Di manakah letak demokrasi?

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengancam akan memboikot Pemilu 2009 jika upaya untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dan 11 kursi DPRD untuk Orang Asli Papua tidak diindahkan oleh Pemerintah. Sikap MRP ini melahirkan pro dan kontra di kalangan pejabat pemerintah dan aparat keamanan di Papua. Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi justru mengimbau kepada MRP sebagai representasi kultur Orang Papua untuk tidak terjun terlalu jauh ke dalam ranah politik. Adalah wajar dan tepat MRP menyuarkan aspirasi keterwakilan perempuan dan 11 kursi DPRD untuk Orang Asli

Papua sebab MRP lahir untuk memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Karena itu, perjuangan MRP untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dan 11 kursi DPRP harus didukung demi kemajuan Orang Asli Papua. Berbagai alasan yang dilontarkan untuk menentang upaya MRP memperjuangkan keterwakilan perempuan dan 11 kursi DPRP antara lain terlambat, dibantah keras oleh Wakil Ketua MRP, Dra. Hana Hikoyabi karena persoalan ini telah disampaikan ke DPRP dalam bentuk pokok pikiran tertulis.

Dalam UU No. 2, Pasal. 28, ayat.3 tentang Otsus Papua, mengatakan bahwa rekrutmen politik oleh Parpol di Provinsi Papua harus memprioritaskan Orang Asli Papua. Pada kenyataannya hal ini belum berjalan. Apakah karena Orang Asli Papua tidak berminat? Ataukah sebaliknya ada unsur kesengajaan untuk tidak menempatkan Orang Asli Papua dalam daftar Caleg?

Selain Pilkada, dan Pemilu legislatif ada juga persoalan korupsi yang masih terus terjadi di Tanah Papua. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Mahmud Mannan, SH, MH mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Papua dan Papua Barat mulai menunjukkan langkah maju. Indikasi kemajuan itu ditunjukkan melalui pelimpahan berkas korupsi ke Pengadilan untuk disidangkan. Selain itu Kejaksaan juga melakukan pembenahan internal dengan memecat empat anggotanya yang melakukan korupsi melalui tindakan pemerasan, pelecehan seksual dan tidak melaksanakan tugas.

Pro dan kontra mewarnai proses sidang terdakwa kasus korupsi pengadaan alat evaporasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II, Jayapura dengan terdakwa dr. Paulina Watofa, Sp.R. Pihak keluarga dan Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Uncen melakukan aksi protes saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura. Aksi protes ini menunjukkan bahwa di satu sisi ada ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat, tetapi di sisi lain memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum sedang ditantang untuk menunjukkan eksistensinya yang harus berpihak pada nilai kebenaran dan keadilan. Kita selalu menuntut supaya Tanah Papua bebas dari korupsi, tetapi ketika upaya penegakan hukum dilakukan kita kurang memberikan dukungan, malahan berupaya menghentikan proses hukum. Toh, kebenaran akan berbicara, yang benar adalah benar dan yang salah tetap salah.

Sementara itu, di Kantor Pengadilan Negeri Wamena juga dilakukan sidang terhadap delapan mantan anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004 yang terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini merupakan langkah maju dalam pemberantasan korupsi, tetapi menjadi lebih penting ialah keputusan yang adil. Orang Papua menderita karena korupsi yang dilakukan oleh pribadi tertentu untuk kepentingan hidupnya maka kepada mereka yang telah merugikan masyarakat harus dihukum setimpal.

Selain berbagai kasus yang telah dan sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan, kasus korupsi yang mulai mencuat ke permukaan dalam tiga bulan terakhir ini ialah kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Merauke, Drs. John Gluba Gebze, dan dugaan penyalahgunaan dana penyusunan Perdasi/Perdasus sebesar Rp 22 miliar oleh DPR Provinsi Papua. Selain itu ada juga dugaan korupsi di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua dan Pembangunan PLTA Mulia. Hal ini menunjukkan adanya langkah maju dalam upaya pengungkapan korupsi di Tanah Papua.

#### 4. Penanganan Konflik

Papua masih menjadi medan konflik. Konflik lahir karena berbagai alasan politik dan kepentingan yang mengatasnamakan lembaga atau komunitas tertentu. Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Keerom membentuk dan mengukuhkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini bertujuan menciptakan kerukunan umat beragama.

Upaya antisipasi dalam menciptakan kerukunan umat beragama amat penting karena di Papua sekarang hidup dan berkembang berbagai agama, Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Penysadaran umat akan pentingnya hidup rukun dan damai dengan sesama meski pun berlainan keyakinan akan membantu Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat melaksanakan tugas masing-masing guna mencapai masyarakat sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Di sisi lain, Forum Komunikasi Kristen Indonesia Papua (FKKIP) melakukan demonstrasi menuntut Gubernur memperhatikan kepentingan Orang Asli Papua. Mereka meminta Gubernur Barnabas Suebu, SH beserta DPRD dan MRP menuangkan ide perlindungan terhadap Orang Asli Papua melalui Perdasu dan Perdasus. Hal ini amat penting demi kelangsungan hidup Orang Papua di negeri ini.

Aspirasi FKKIP yang bernuansa agama ini tidak perlu dilihat sebagai ancaman bagi umat beriman lain. Penyampaian aspirasi yang melibatkan ribuan massa ini merupakan ungkapan keprihatinan Gereja terhadap kondisi Orang Papua yang berada jauh di belakang kaum migran. Maka baiklah aksi ini diletakkan dalam konteks melindungi Hak Hidup Orang Papua.

Hal lain ialah Kantor Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura dirusak oleh sekelompok warga dan mengakibatkan dua orang mengalami luka memar. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada pihak tertentu yang terus berupaya menciptakan suasana tidak damai di Tanah Papua. Adalah penting mencermati situasi ini dan mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.

Komponen masyarakat perlu menahan diri dan mempercayakan aparat penegak hukum untuk menangani permasalahan secara profesional. Upaya penanganan kasus semacam ini membutuhkan keseriusan dan ketekunan. Dengan demikian mampu mengungkap pelaku dan motif tindakan yang tidak berkemanusiaan.

#### 5. Aspirasi M(erdeka)

Setiap pribadi yang ada dan hidup di Tanah Papua pasti bertanya mengapa di era Otsus ini masih ada suara-suara yang memperjuangkan kemerdekaan? Pertanyaan ini memang sulit dijawab, sebab Papua tidak hanya memiliki satu dimensi persoalan melainkan sangat kompleks. Masalah Papua bukan hanya soal kesejahteraan tetapi juga menyangkut sejarah Orang Papua. Oleh karena itu, perlu mencermati aspirasi ini secara jernih dan dengan hati yang bijak.

Aspirasi M(erdeka) yang diungkapkan oleh Orang Papua dengan mengibarkan Bendera Bintang Kejora menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Republik Indonesia. Kita bisa membayangkan sudah 40 tahun sejak Pepera 1969, nyatanya Orang Papua masih berada di bawah garis kemiskinan.<sup>6</sup> Di era Otsus mulai ada kesempatan bagi Orang Papua untuk memimpin negerinya, tetapi di sektor lain, misalnya

6 Bdk. Papua Dalam Angka, BPS Provinsi Papua. 2008

perekonomian, tenaga pendidikan (guru/dosen) dan kesehatan (perawat, bidan, dokter) masih didominasi oleh kaum pendatang.

Ketidakpuasan terhadap pelayanan yang pincang di Tanah Papua melahirkan upaya-upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Model dan pola yang biasa dilakukan ialah dengan mengibarkan Bendera Bintang Kejora, simbol kejayaan masa lampau dan pengikat persatuan Orang Papua. Dalam periode tiga bulan ini telah terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora sebanyak 3 kali yakni di depan makam Theys Hiyo Eluay, di depan Gedung Pepera Fakfak, dan di Lapangan Sinapup Wamena.

Reaksi yang diberikan ketika terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora pun berbeda-beda. Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. FX. Bagus Ekodanto, SH ketika menanggapi pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan makam Theys mengatakan hal ini biasa karena dilakukan oleh oknum tertentu saja. Di sisi lain, pengibaran Bendera Bintang Kejora menyebabkan Orang Papua dijebolkan ke dalam penjara di Fakfak dan bahkan melahirkan pertumpahan darah seperti kasus Opinus Tabuni di Wamena. Kita dapat melihat bagaimana komitmen yang hendak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di atas Tanah Papua. Berbagai dalih telah dipakai untuk membungkam kebebasan berekspresi Orang Papua.

Ketua Komisi F DPRP yang membidangi masalah HAM, Ir. Weynand Watory mengatakan Orang Papua memahami bahwa Bendera Bintang Kejora telah diterima sebagai simbol kultur Orang Papua karena sudah diperjuangkan oleh MRP dan DPRP. Bahkan DPRP telah membicarakan hal ini dengan Menko Polhukam, Mendagri dan Kepala BIN sejak 2007. Meski pun demikian fakta berbicara lain, Pemerintah Jakarta seakan tidak peduli dengan perjuangan para wakil rakyat Papua. Pemerintah Jakarta melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan PP 77 yang melarang Orang Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Ini adalah proses mematikan karakter budaya dan menghilangkan akar sejarah Orang Papua.

Peristiwa lain yang membuat Pemerintah Republik Indonesia kaget ialah 40 anggota kongres Amerika Serikat yang menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membebaskan Filep Karma dan Yusak Pakage, Tapol kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora, 1 Desember 2004, di Lapangan Trikora Abepura. Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Indonesia untuk AS, Sudjandnan Parnohadingrat membenarkan adanya surat dari Kongres Amerika Serikat. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan Papua mendapat perhatian dunia internasional. Meski pun demikian Pemerintah Indonesia tidak memedulikan surat dari para anggota Kongres Amerika Serikat. Indonesia tetap bersikukuh bahwa proses hukum terhadap Filep Karma dan Yusak Pakage telah berjalan sesuai prosedur hukum di Indonesia.

## **6. Pemekaran vs Otsus**

Otsus Papua telah berjalan selama tujuh tahun. Kehadiran UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang diharapkan membawa perubahan bagi Orang Papua, ternyata melahirkan banyak permasalahan baru. Di antara sekian banyak permasalahan itu adalah masalah pengertian dan pemahaman masyarakat Papua tentang Otsus itu sendiri. Otsus diterjemahkan sebagai upaya Pemerintah untuk membagikan uang kepada masyarakat. Pertanyaan yang muncul ialah mengapa pemahaman masyarakat tentang Otsus begitu sempit? Apakah masyarakat salah menangkap ataukah sebaliknya Pemerintah yang belum mensosialisasikan makna UU No. 21 tentang Otsus Papua kepada masyarakat?

Hal lain yang lahir dari Otsus ialah keterpecahan Orang Papua. Berbagai wilayah di Papua menghendaki pemekaran. Dalam tiga bulan ini terjadi berbagai diskusi tentang pemekaran

di Papua. Kerukunan Alumni Gajah Madah (Kagama) di Papua melakukan diskusi yang membahas pemekaran perlu di mulai dari Distrik. Diskusi ini sampai pada kesimpulan bahwa pemekaran Distrik adalah mutlak diperlukan karena pembangunan harus dimulai dari bawah. Program yang perlu mendapat perhatian ialah pemenuhan kebutuhan makan dan gizi, pendidikan, dan kesehatan, pemberdayaan perekonomian kerakyatan dan infrastruktur kampung yang memadai.

Sementara itu, Masyarakat Adat Grime Nawa melaksanakan Musda I untuk merancang pemekaran Kabupaten Grime Nawa. Pemekaran terus menjamur di Tanah Papua demi memperpendek rentang kendali dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berangkat dari alasan ini maka masyarakat adalah subjek dan fokus pelayanan, tetapi fakta menunjukkan bahwa daerah-daerah yang telah dimekarkan tidak mengalami banyak perubahan. Kita menginginkan perubahan, dan mau meningkatkan derajat kesejahteraan Orang Papua melalui pemekaran tetapi sulit terwujud karena kita belum memiliki komitmen yang teguh.

Pemekaran seakan-akan dinikmati oleh pribadi tertentu saja. Masyarakat menjadi penonton setia. Masyarakat tidak lagi menjadi subjek pembangunan melainkan objek untuk meraih kedudukan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, mereka hanya dipakai pada saat tertentu, di mana sang penguasa membutuhkannya. Apakah ini yang dinamakan pembangunan? Apakah ini tujuan pemekaran yang dilakukan di Papua? Kita menciptakan konsep tentang tujuan pemekaran dengan sangat rapi dan bagus di atas kertas, tetapi lupa melaksanakannya.

Pro dan kontra tentang Otsus terus bergulir. Orang Papua masih mempertanyakan makna, maksud dan tujuan Otsus. Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Tanah Papua (KMMPTP) yang dipimpin oleh Buktar Tabuni hendak melakukan demonstrasi menuntut evaluasi menyeluruh tentang Otsus dibubarkan oleh aparat kepolisian karena dianggap tidak memiliki surat izin. Sementara itu, *Papua Indigenous Actioan (PIA)* juga menuntut Gubernur dan MRP untuk segera melakukan dialog tentang Otsus. Di tengah maraknya protes tentang Otsus Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan bahwa Otsus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meredam isu separatis di Tanah Papua.

Kita tentu memiliki argumen untuk mengatakan Otsus bermanfaat. Tetapi pertanyaannya ialah Otsus bermanfaat untuk siapa? Kita juga boleh mengatakan bahwa Otsus tidak bermanfaat karena tidak memberikan kemajuan berarti bagi Orang Papua. Kita akan melihat Otsus berdasarkan, siapakah kita dan kita berada dalam posisi sebagai apa? Apakah kita berada dalam pihak yang tidak pernah merasakan manfaat Otsus atau sebaliknya? Pro dan kontra tidak akan pernah berakhir jika masing-masing kita mempertahankan cara pandang kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah kesempatan yang baik untuk duduk bersama dan membicarakannya dari hati ke hati.

Saat ini Otsus dipahami dalam dua segi, yaitu pemekaran dan bagi-bagi uang. Pemahaman semacam inilah yang telah menghancurkan persatuan dan kesatuan Orang Papua. Pemahaman yang sempit ini telah melahirkan keterpecahan bagi Orang Papua. Setiap suku, dan klen mau memekarkan diri supaya dapat berkembang dengan lebih baik, tetapi justru sebaliknya masyarakat semakin sengsara. Dalam era Otsus, Orang Papua tidak membutuhkan banyak uang. Mengapa? Hal ini terbukti dari sejak awal pelaksanaan Otsus hingga saat ini (sudah 7 tahun Otsus berjalan) dana yang telah dikucurkan sebanyak Rp 18 triliun, tetapi mengapa dana sebanyak itu belum mampu menyentuh dan menyejahterakan Orang Papua yang hanya 1,5 juta jiwa? Di manakah letak kekeliruan dalam menerapkan UU No. 21 tentang Otsus Papua?

## B. Catatan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

### 1. Pendidikan Gratis, Tidak Terlaksana

Di bidang pendidikan terjadi polemik di antara Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Provinsi Papua dengan pihak sekolah karena memungut biaya masuk siswa sangat tinggi. Persoalan ini menarik perhatian dari DPRP, MRP, dan berbagai LSM di antaranya ICW Jakarta. Pungutan biaya pendaftaran siswa baru dipersoalkan karena Pemerintah telah memberikan bantuan kepada sekolah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara pihak sekolah tetap melakukan pungutan dengan dalih untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta didik melalui pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Komisi E DPRP mencoba menjernihkan persoalan ini dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Provinsi Papua, Drs. James Modouw, MM untuk menjelaskan persoalan ini dan diperoleh informasi bahwa surat larangan pungutan biaya masuk siswa baru telah diedarkan ke seluruh Kabupaten/Kota, tetapi tidak diindahkan oleh setiap sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Papua belum mengalami perubahan berarti terutama dalam hal menyamakan persepsi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua. Kita sulit menerima kenyataan bahwa setiap Kabupaten/Kota mau membuat kebijakan sendiri yang tidak memihak kepada Orang Papua, tetapi fakta terjadi demikian.

Pendidikan yang merupakan pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Papua tidak menjadi prioritas pembangunan. Kita boleh mengharapkan Papua akan menjadi daerah yang makmur dan sejahtera, tetapi kalau generasi muda Papua tidak memperoleh pendidikan, apakah impian untuk menyejahterakan orang Papua akan berhasil?

Kita dapat mengambil contoh di SD Inpres Abeale I, Sentani, yang menetapkan biaya masuk siswa baru sebesar Rp 1.000.000 per siswa. Di era Otsus Papua pendidikan semakin mahal. Selain itu, jika dilihat secara nasional Pemerintah telah menganggarkan dana pendidikan sebesar 20% APBN. Mengapa pendidikan semakin mahal? Bukankah dana operasional pendidikan di setiap sekolah telah disiapkan oleh Pemerintah? Jika telah disiapkan oleh Pemerintah, mengapa pihak sekolah harus memungut uang dari siswa baru? Bukankah ini juga bentuk korupsi yang sedang terjadi di atas Tanah Papua?

Coba kita sedikit berpikir, Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengalokasikan dana bantuan pendidikan melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota ditambah Dana Otsus, tetapi mengapa dana selalu kurang? Menyikapi persoalan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan kebijakan sekolah. Sekolah harus membelanjakan hal-hal yang menjadi prioritas, maka dibutuhkan perhitungan yang cermat. Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP, Paskalis Kossy meminta Pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh atas penggunaan Dana BOS. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk menemukan letak permasalahan. Dengan demikian dapat dicarikan jalan keluar untuk memecahkan persoalan ini.

Hal lain yang menjadi pertanyaan ialah apakah berbagai dana yang dialokasikan Pemerintah dalam bentuk BOS, APBD Kabupaten dan APBD Provinsi untuk pendidikan sampai ke tangan pengelola pendidikan di sekolah? Jika dana-dana tersebut tidak sampai ke sekolah maka tidak perlu heran kalau pendidikan semakin mahal. Oleh karena itu, penting memperhatikan proses penyaluran dana sehingga sampai di tingkat paling bawah yakni pengelola pendidikan di sekolah.

Mutu pendidikan di Papua semakin merosot. Menurut Wakil Ketua II MRP, Dra. Hana Hikoyabi hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengakomodir pendidikan di Papua. Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berjalan selama tujuh tahun belum menghasilkan satu ketetapan yang secara spesifik mengatur tentang pendidikan di Tanah Papua. Hal ini menyebabkan pendidikan di Papua belum mengalami kemajuan.

Keprihatinan juga terjadi karena banyak guru tidak mau mengajar. Para guru lebih suka tinggal di Kota. Kita dapat melihat contoh nyata di Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya yang memiliki 4 SD hanya dilayani oleh empat orang guru. Distrik Yamo merupakan bagian kecil potret realitas pendidikan di Papua.

Pendidikan di Papua memang sedang merosot tetapi masih ada harapan untuk maju dan berkembang. Pemerintah Provinsi Papua melalui Subdin Bina Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua memberikan beasiswa bagi para dosen untuk menempuh pendidikan S2 dan S3 di luar negeri. Langkah maju telah dimulai, kini yang perlu diperhatikan ialah tekad untuk membangun pendidikan di Papua. Bahkan Pemerintah pusat pun masih menaruh perhatian terhadap pendidikan di Papua dengan memberikan bantuan untuk sekolah perbatasan (SMP Negeri I Waris) sebesar 400-500 juta untuk triwulan pertama. Dana ini akan dipakai untuk membangun fasilitas asrama.

## 2. Hak Atas Kesehatan

Di bidang kesehatan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah kolera dan muntaber di Kabupaten Dogiyai menyita perhatian banyak pihak di Tanah Papua. Kalangan Gereja yang diwakili oleh Pdt. Dr. Beny Giay dari KPKC Sinode Kingmi Papua yang didampingi oleh Br. J. Budi Hernawan ofm dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Fr. Saul Wanimbo dari SKP Keuskupan Timika dan Pastor Dr. Neles Tebay Pr dari STFT "Fajar Timur" dalam konferensi pers di Kantor Keuskupan Jayapura mengatakan bahwa 172 orang telah meninggal karena wabah kolera. Mereka yang meninggal adalah anak-anak, remaja pemuda dan orang dewasa. Pihak Gereja menuntut Pemerintah, DPRP, MRP segera melihat dan menangani kasus ini.<sup>7</sup>

Perhatian Gereja terhadap wabah yang menelan ratusan korban anak manusia di Dogiyai, ditanggapi secara berbeda oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem. Wakil Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah belum mengetahui kejadian itu. Pemerintah belum menerima laporan tentang wabah kolera di Kabupaten Dogiyai. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Sukaswara mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim dokter ke Dogiyai untuk menangani wabah kolera. Jika kita mengkritisi pernyataan Wakil Gubernur bahwa pihaknya belum mengetahui wabah tersebut, mengapa Dinas Kesehatan telah menurunkan tim ke Dogiyai? Di manakah letak koordinasi kerja yang baik dalam sistem birokrasi Pemerintahan? Bukankah Dinas Kesehatan Provinsi Papua harus segera melaporkan kejadian tersebut ke Pemerintah Provinsi sehingga segera ditangani?

Saling lempar tanggung jawab di antara para pejabat telah menyebabkan banyak Orang Papua di Kabupaten Dogiyai mati. Bahkan untuk meredam maraknya pemberitaan media tentang wabah kolera di Dogiyai Pemerintah Provinsi Papua melalui Wakil Gubernur, Alex Hesegem yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Sukawara mengeluarkan data resmi pada 9 Agustus, yakni jumlah penderita kolera 547 dan yang meninggal adalah 98 orang. Data yang dikeluarkan ini adalah versi Pemerintah. Apakah data ini sesuai fakta yang terjadi? Jika kita berpikir kritis dan mau mengkaji serta meneliti

---

7 [www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

lebih jauh maka dibutuhkan data yang benar. Apa pun argumentasi yang kita ungkapkan, toh kebenaran akan berbicara. Kita bisa berpolemik, tetapi kebenaran tidak dapat disangkal apalagi mau ditiadakan.

Hal yang paling tragis ialah pernyataan Sekretaris Komisi E, Yosephina Pigay, pada 25 Agustus bahwa Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial telah memberikan bantuan, tetapi karena tidak ada dana (uang transportasi) sehingga bantuan tidak diantar ke tempat tujuan. Bagi Orang Papua situasi ini ibarat tikus mati di lumbung padi. Di era Otsus, Orang Papua mati karena tidak ada uang transportasi untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke Dogiyai. Masih adakah hati Orang Papua untuk sesama saudaranya? Gubernur, Pimpinan DPRP, MRP, semua Orang Papua, tetapi mengapa peristiwa memilukan ini harus terjadi? Apakah Papua kekurangan uang ataukah hati sudah dibentengi oleh uang dan jabatan sehingga tidak mampu melihat sesama yang menderita?

Peristiwa lain yang masih terjadi di Papua ialah pesta Minuman Keras (miras). Pesta miras telah menimbulkan lagi korban jiwa. Di Sentani, Kabupaten Jayapura tiga orang tewas dan dua orang kritis setelah melakukan pesta miras serta pesta miras melibatkan anak kecil. Sementara itu, di Kabupaten Merauke 18 orang tewas dan 71 orang dirawat di RSUD Merauke. Pesta miras juga menelan 2 korban jiwa di Koya Barat. Jika kita melihat secara keseluruhan maka dalam tiga bulan terakhir miras telah menyebabkan 23 tewas dan 72 orang dirawat intensif.

Peredaran Minuman Keras perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terutama Pemerintah dan legislatif karena akan mengancam kelangsungan hidup orang Papua. Pemerintah dan pihak legislatif perlu duduk bersama mencari solusi guna menangani permasalahan ini. Selain itu, masyarakat pun perlu berpartisipasi dalam upaya memberantas miras di Tanah Papua. Jika tidak ditangani secara serius ke depan generasi muda Papua akan hancur. Orang muda Papua tidak akan berkembang karena miras telah menghancurkan hidup mereka.

Hal lain yang tidak kalah penting ialah permintaan Kepala Dinas Kebersihan Kota Jayapura, Malikidin Soltif yang meminta masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk membangun budaya bersih karena selama ini masyarakat belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu persoalan yang dihadapi ialah kurangnya tong-tong sampah. Kita semua tentu prihatin karena Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua tampak tidak rapi dan banyak sampah: sampah plastik, ludah pinang, dan parit-parit dipenuhi batu, pasir dan botol-botol. Kebersihan dan keindahan harus menjadi perhatian kita semua.

Untuk mengatasi masalah sampah Pemerintah Kota Jayapura perlu membangun tempat pengolahan sampah, entah sampah organik maupun anorganik. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Nafri bukan solusi karena berdampak pada masyarakat sekitar dan menyebabkan kerusakan hutan di areal sekitar TPA.

### **3. Kesejahteraan Umum**

Setiap pekerjaan yang dilakukan bermuara pada satu tujuan yakni kesejahteraan. Pemerintah Provinsi Papua telah berjuang keras menyejahterakan Orang Papua. Contoh konkrit yang sedang dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya ialah pengadaan listrik melalui tenaga Mikro Hidro. Proyek ini ditangani oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua melalui Dana Otsus 2007, senilai Rp 11 miliar, tetapi hingga saat ini belum membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada komitmen untuk membangun Papua. Ada dana, ada proyek, tetapi tanpa diimbangi nurani yang bersih dan komitmen

yang kuat maka semuanya akan sia-sia.

Papua tetap mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan bantuan pembangunan daerah perbatasan. Bantuan diberikan oleh Asisten Menko Kesra, Mayjen TNI (Purn) Sudyatma kepada Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Drs. Wellington Wenda senilai Rp 98,947 miliar. Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan RI-PNG. Oleh karena itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana antara lain perumahan rakyat, perumahan guru, Puskesmas, jalan, listrik, air bersih dan fasilitas umum lainnya.

Bantuan yang sama juga diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Lani Jaya senilai Rp. 40 miliar. Tujuan utama bantuan ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pribadi yang mengelola dana ini harus dapat memanfaatkannya dengan baik supaya masyarakat bisa merasakan sentuhan pembangunan.

Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu ternyata diterima juga oleh keluarga mampu yang *notabene* memiliki motor dan rumah permanen. Di Kelurahan Kelapa Lima Merauke, ada keluarga mampu yang memiliki kartu BLT. Bahkan jumlahnya mencapai 580 kepala keluarga. Namun, karena kejelikan dan ketelitian aparat kelurahan maka keluarga yang dianggap mampu dibatalkan. Kepala Kelurahan Kelapa Lima, Daniel Kepok mengatakan bahwa yang membatalkan bukan aparat Kelurahan melainkan aturan dan mekanisme yang berlaku.

#### 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemerintah Provinsi Papua memberikan kesempatan kepada para investor untuk berinvestasi di Provinsi Papua. Salah satu bidang yang menjadi incaran para investor ialah pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit. Rencananya Perkebunan Kelapa Sawit akan dibuka di Arso Timur, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Alasan yang selalu diungkapkan oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan di ialah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Tetapi, realitas menunjukkan bahwa Perkebunan Kelapa Sawit telah beroperasi selama 25 tahun di wilayah Arso tetapi masyarakat tidak pernah sejahtera, bahkan semakin menderita karena sumber air bersih hilang, hewan buruan, sagu, kayu bakar, dan berbagai tempat keramat musnah.

Menyikapi hal ini, Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura yang dikoordinir oleh Br. Edy Rosaryanto ofm melakukan penelitian Dampak Perkebunan Kelapa Sawit PT PN II Arso bagi kesejahteraan masyarakat Arso. Hasil penelitian ini diseminarkan pada 5 Juli di Sanggar Kesenian Tanah Papua, Jayapura yang intinya menjelaskan bahwa Perkebunan Kelapa Sawit tersebut tidak mengubah kehidupan masyarakat Arso, bahkan semakin menambah penderitaan masyarakat. Tetapi, kenyataan ini tidak menyurutkan niat Pemerintah untuk mendukung Perkebunan Kelapa Sawit. Bahkan Bupati Kabupaten Keerom, Drs. Celcius Watae dalam kesempatan seminar mengatakan bahwa biarlah Perkebunan Kelapa Sawit tetap berjalan dan ke depan akan dikembangkan pula perkebunan coklat.<sup>8</sup>

Kita dapat melihat bahwa sejauh mana Pemerintah memiliki tekad untuk berpihak kepada masyarakat kecil. Sudah jelas bahwa Perkebunan Kelapa Sawit tidak memberikan

---

8 [www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi mengapa harus dipertahankan? Perkebunan Kelapa Sawit hadir untuk kepentingan siapa? Lebih aneh lagi karena di Yeti, Arso Timur sedang dilakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit sebanyak 26.300 ha.

Perkebunan Kelapa Sawit membawa penderitaan bagi masyarakat adat karena segala kebutuhan hidup yang diperoleh melalui hutan akan hilang. Adat dan budaya akan mengalami pergeseran bahkan kemunduran drastis karena potensi kehilangan akar budaya sangat terbuka lebar. Anak – cucu tidak akan mengetahui di mana tempat keramat leluhurnya. Selain itu, dampak luasnya ialah terjadinya pemanasan global, bencana dan mala petaka, banjir dan angin akan melanda penduduk karena hutan dibabat.

Peristiwa lain yang menarik untuk disimak ialah pernyataan Wali Kota Jayapura yang mengajak seluruh masyarakat menjaga kelestarian hutan. Pernyataan ini berkaitan dengan dipilihnya Wali Kota Jayapura, MR. Kambu sebagai salah satu penerima penghargaan sebagai Walikota peduli hutan. Penghargaan ini menjadi kebanggaan juga bagi warga Kota Jayapura. Tetapi jauh lebih baik kalau penghargaan ini menjadi motivator untuk lebih menggiatkan upaya reboisasi, sebab fakta menunjukkan bahwa banyak perbukitan di Kota Jayapura masih gundul. Demikian halnya Teluk Youtefa yang menjadi kebanggaan Orang Papua telah dicemari limbah dan plastik dari Pasar Youtefa.

### **Penutup**

Berbagai catatan peristiwa di atas mengajak kita untuk menoleh ke belakang sambil berpikir apa lagi yang akan terjadi pada hari ini dan besok di Tanah Papua tercinta. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebagian besar belum mendatangkan sukacita bagi rakyat jelata. Otsus Papua telah berjalan tujuh tahun. Selama itu pula dana Rp 18 triliun telah dikucurkan tetapi rakyat Papua masih menderita.

Apa yang salah? Apa yang membuat penderitaan di atas Tanah Papua tak kunjung henti? Kita boleh bertanya dan terus bertanya entah sampai kapan penderitaan, kepedihan dan duka ini akan berakhir. Orang Papua hingga detik ini terus dibantai di atas tanahnya. Perjuangan demi perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan selalu dibungkam atas nama hukum, ketertiban dan keamanan.

Walaupun demikian kita perlu optimis. Kita tahu dan sadar bahwa ada kepincangan dan kekurangan dalam pelayanan terhadap masyarakat di semua aspek kehidupan, tetapi ada upaya perbaikan dari Pemerintah demi meningkatkan derajat kesejahteraan Orang Papua. Ada usaha memperbaiki kinerja kerja di pendidikan, kesehatan, pengembangan perekonomian pedesaan, dan lain-lain. Upaya perbaikan di bidang hukum pun mulai berjalan, misalnya kasus-kasus korupsi mulai disidangkan. Demikian hanya bidang-bidang yang menyentuh sektor riil masyarakat mendapat perhatian Pemerintah meski pun belum maksimal.

Mari membangun Papua. Pengalaman demi pengalaman, entah yang mendatangkan sukacita maupun dukacita, hendaklah menguatkan setiap insan di atas Tanah ini untuk membangun Papua yang berkeadilan. Dengan demikian tercipta damai yang didambakan.